

PROFIL STATISTIK GENDER KOTA DENPASAR TAHUN 2024

Oleh
**WIDHIANTHINI
AAA WULANDIRA SAWITRI DJELANTIK
NYOMAN AYU SUKMA PRAMESTISARI**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

SAMBUTAN

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Denpasar



Om Swastyastu,

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat asung kertha wara nugraha- Nya penyusunan buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi persoalan gender dan pemberdayaan perempuan, namun sampai saat ini ketimpangan gender pada berbagai bidang pembangunan masih tampak cukup menonjol, seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu, hal penting yang perlu dilakukan secara serius dan konsisten adalah penerapan strategi pengarusutamaan gender (PUG).

Sementara ini masih ada dugaan bahwa, salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada sehingga kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya berperspektif gender. Padahal data terpilah berdasarkan jenis kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat dikatakan sebagai dasar utama dalam menyusun perencanaan yang responsif gender karena atas dasar inilah kita bisa mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat.

Tersusunnya buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2024, tidak lepas dan adanya komitmen dari pemerintah Kota Denpasar untuk mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dan secara berkala memperbaharui data tersebut. Tujuan publikasi ini adalah untuk menunjukkan secara lebih nyata tentang kesenjangan dan isu gender yang masih terjadi pada berbagai aspek pembangunan yang pada gilirannya dapat memberikan petunjuk secara lebih jelas kepada para penentu kebijakan dan penyusun program/kegiatan sehingga penanganan isu gender dapat dilakukan secara lebih cermat dan tepat.

Oleh Karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Walikota Denpasar serta semua pihak yang telah memfasilitasi sampai terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kota Denpasar.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Juni 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Denpasar



Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660311 199503 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Buku Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Tujuan penyusunan data terpilah dalam buku statistik gender adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, publik dan aspek lainnya yang ada di Kota Denpasar. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsive gender.

Melalui buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar diharapkan para perencana dapat menggunakan data-data ini sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan isu-isu gender terutama yang menjadi salah satu permasalahan di Kota Denpasar. Penyusunan buku ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar bekerja sama dengan Kajian Gender dan Perlindungan Anak Universitas Udayana.

Penyusunan buku profil ini merupakan kelanjutan dari buku profil tahun sebelumnya. Melalui kesempatan ini tim penyusun memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam buku ini. Tim penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam melakukan penyusunan buku ini.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pembangunan Kota Denpasar khususnya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan.

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Revolusi Industri 5.0 dan Megatren 2045 menyebabkan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi dan ekonomi yang terjadi. Perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Dengan memperkuat potensi perempuan, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan keadilan gender yang lebih baik.

Terkait dengan permasalahan diatas, tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan kelima dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender yang masih terjadi di Indonesia mengakibatkan ketersediaan Data Terpilah Gender (DTG) menjadi sangat penting. Data terpilah menurut jenis kelamin menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan, terutama bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional. DTG tidak hanya dapat digunakan pemerintah atau pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan yang responsif gender, tetapi juga bermanfaat bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk merancang atau mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan.

Berdasarkan aspek pendidikan disimpulkan sebagai berikut. Anak usia 7-15 tahun hampir seluruhnya bersekolah, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara usia 16 tahun ke atas, untuk laki-laki berkisar antara 75 hingga 82 persen sementara untuk perempuan berkisar 79 hingga 88 persen. APS penduduk laki-laki tahun 2023 mengalami peningkatan daripada tahun

sebelumnya, yaitu sebesar 3,45 persen. Pada tahun 2023, APM SD, APM SMP dan SMA untuk penduduk perempuan angkanya juga lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Total jumlah siswa PAUD menyentuh angka 14.208 siswa dengan komposisi 7.302 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 1.701 siswa lainnya berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari jumlah siswa SD terdapat 42.095 siswa merupakan siswa dengan jenis kelamin laki-laki dan 39.273 siswa lainnya berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah siswa SMP, terdapat 18.882 siswa diantaranya adalah laki-laki dan 17.637 siswa lainnya adalah perempuan. Untuk siswa SMA/MA/SMK, siswa dengan jenis kelamin perempuan menduduki posisi tertinggi yaitu sebesar 10.653 orang. Dilihat dari status putus sekolah, pada tahun 2023 terdapat empat orang SD/ sederajat dan dua orang siswa SMP/ sederajat yang mengalami putus sekolah, Dilihat dari jumlah guru yang ada di Kota Denpasar, dari total 4.229 guru, terdapat 3.185 guru diantaranya adalah perempuan. Berdasarkan jumlah guru yang tersertifikasi, untuk tingkatan SD, SMP dan SMA masih didominasi perempuan. Jumlah kepala sekolah di tingkat SD didominasi oleh perempuan sedangkan di tingkat SMP didominasi oleh laki-laki.

Dari aspek kesehatan, peningkatan kelahiran pada tahun 2023 terbanyak terjadi pada bayi perempuan yang meningkat sebesar 5,5% dan kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki juga meningkat hanya sebesar 1,6%. Terjadi penurunan jumlah balita di Kota Denpasar pada tahun 2023 sebesar 32,2%. Dilihat dari kasus ASI Eksklusif di Kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 12.154 kasus menjadi 25.390 kasus di tahun 2023 atau meningkat sebesar 52,1%. Status Gizi di Kota Denpasar tahun 2022 dan 2023, mengalami penurunan di seluruh kecamatan. Semua UPTD Puskesmas di Kota Denpasar memiliki 1 ruang pojok ASI. Cakupan imunisasi bayi di Kota Denpasar tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan jumlah dokter, jumlah dokter perempuan yang ada di Kota Denpasar untuk tahun 2023 sejumlah 1689 orang (48,3%) dan tahun sebelumnya sebesar 1807 orang (48,5%). Dari jumlah tersebut dapat dilihat dokter yang berjenis kelamin perempuan hampir sebanding jumlahnya dengan dokter laki-laki. Jumlah penggunaan alat kontrasepsi perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin tahun 2023, dari

44.262 orang perempuan pengguna alat KB, penggunaan kontrasepsi terbanyak adalah suntikan KB digunakan oleh 21.495 orang, diikuti dengan AKDR/IUD/Spiral sebanyak 12.427 orang. Alat KB yang paling sedikit digunakan pada tahun 2023 di Kota Denpasar adalah MAL yaitu sebanyak 42 orang saja. Sedangkan ditinjau dari segi pelayanan air bersih, pada tahun 2023 persentase penduduk kota Denpasar yang terlayani air bersih menurun dari 51,83% pada tahun 2022 menjadi 47,07% pada tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk yang belum terlayani air bersih meningkat dari 48,17% pada tahun 2022 menjadi 52,93% pada tahun 2023.

Dari aspek ekonomi, ditinjau dari jumlah penduduk usia produktif, terjadi peningkatan sebesar 0,21% untuk penduduk usia produktif laki-laki dan 0,43% untuk penduduk usia produktif perempuan. Ditinjau dari kegiatan penduduk usia 15 tahun keatas, jumlah perempuan yang bekerja pada tahun 2023 sudah mendekati jumlah laki-laki yaitu sebesar 49,84%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 328.987 orang menjadi 333.682 orang. Jumlah KWT yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2023 sebanyak 14 KWT menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan terjadi di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat. Jumlah penyuluh pertanian pada tahun 2023 di Kota Denpasar berjumlah 17 orang yang terdiri dari penyuluh perempuan sebanyak 11 orang dan penyuluh laki-laki sebanyak 6 orang. Secara keseluruhan nilai TPAK untuk Kota Denpasar mengalami kenaikan dari tahun 2021-2023 sebesar 4,46%. TPAK laki-laki cenderung selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Jumlah tenaga kerja asing pendatang di Kota Denpasar dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 32,59% yang didominasi oleh tenaga kerja asing laki-laki. Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan di Kota Denpasar untuk tahun 2023 adalah sebesar 3,20% sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,39%. Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta di Kota Denpasar untuk tahun 2023 adalah sebesar 78,13% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 77,72 %. Jumlah tenaga kebersihan yang bertugas di pertamanan di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 124 orang orang. Pada tahun

2023 jumlah petugas kebersihan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,7%. Petugas kebersihan masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 969 orang dari 1527 orang. Petugas kebersihan berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 36,54% dan paling banyak bekerja sebagai tenaga kebersihan. Jumlah petugas parkir yang bertugas di gedung dan pelataran (Tabel didominasi oleh laki-laki sebesar 97,21% dibandingkan petugas perempuan yang hanya sebesar 2,79%). Jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha rekreasi dan pariwisata di Kota Denpasar adalah pada tahun 2023 adalah sebanyak 182 orang laki-laki dan 176 orang perempuan. Pemilik usaha salon kecantikan pada tahun 2023 tetap didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 141 orang atau sebesar 84,9%. Dilihat dari usaha UMKM terdapat 8 jenis usaha yaitu kuliner, industri makanan ringan, industri kerajinan tangan, dagang, jasa, pertanian, peternakan dan PKL tersebar merata di empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Sebesar 64,87%.

Untuk sektor publik, tahun 2023 jumlah PNS yang berjenis kelamin perempuan menurun jumlahnya sebesar 9,9% dari tahun sebelumnya tetapi tetap lebih besar dari jumlah PNS laki-laki. Jumlah pegawai Non-ASN laki-laki tetap mendominasi sebanyak 4.600 orang lebih banyak dibandingkan perempuan sebanyak 3.138 orang. Dilihat dari jumlah ASN yang mengikuti diklat, terjadi peningkatan sebesar 83,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa ASN berjenis kelamin perempuan telah diberi kesempatan yang lebih besar untuk dapat mengembangkan potensi diri dan ketrampilannya. Jumlah pejabat perempuan yang mengikuti Diklat PIM tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 14,28% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah ASN pada unit kerja untuk perempuan sebanyak 0,9% dan penurunan terjadi pada unit kerja laki-laki sebesar 4%. Pada tahun 2023, perempuan dengan pangkat penata muda berjumlah paling banyak yaitu sebesar 37,2% naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 33,6%. Pangkat yang mengalami kenaikan terjadi juga pada Penata Muda Tk 1 yaitu naik menjadi 10,8% dari tahun sebelumnya sebesar 9,1%. Penurunan terjadi pada pangkat Pembina Tk 1 yang turun menjadi 7,8%. Dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang ternyata hanya ada 4 orang perempuan saja dan berasal dari PDIP,

Demokrat, Golkar, dan PSI yang bisa menjadi anggota DPRD Kota Denpasar. Pada tahun 2023 kaum perempuan sudah ada yang menjadi pimpinan partai politik yaitu sebanyak dua orang atau sekitar 11%. Anggota Bawaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan di Kota Denpasar kaum laki-laki mendominasi sebanyak 23 orang (53,49%) sedangkan Perempuan hanya sebanyak 20 orang atau sebesar 46,51%. Jumlah anggota KPU di Kota Denpasar sebanyak 5 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini menunjukkan 40% sudah terwakilkan oleh perempuan. Jumlah total anggota PPK sebanyak 20 orang yang terdiri atas 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Disini terlihat keterlibatan perempuan masih dibawah 30% yaitu sebesar 15%. Terdapat 129 orang anggota PPS pada tahun 2023 yang terdiri atas 104 orang laki-laki dan 25 orang perempuan atau sebesar 19,4%. Ditinjau dari jumlah pantarlih seluruhnya masih didominasi oleh kaum laki-laki. Sedangkan ditinjau dari jumlah penegak hukum masih didominasi oleh laki-laki, yang berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 15% dari jumlah keseluruhan.

Berdasarkan aspek lainnya, terjadi penurunan korban kekerasan untuk anak perempuan dan perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Terdapat 166 orang pada kasus kekerasan perempuan di tahun 2022 dan 135 orang pada tahun 2023. Untuk kasus korban kekerasan pada anak perempuan mengalami penurunan sebesar 48,50% dan anak laki-laki meningkat sebesar 38,55% dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Bentuk kekerasan psikis (KDRT) menduduki posisi teratas, namun mengalami penurunan sebesar 14,29% dari tahun 2022-2023. Jika dilihat dari persentase korban kekerasan menurut jenis kelamin, pada tahun 2022 dan tahun 2023 lebih banyak terjadi pada perempuan. Pada tahun 2022 sebanyak 80% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dimana sebanyak 64,24%. Dilihat dari persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Denpasar pada 2 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Untuk anak laki-laki terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 19,95% menjadi 33,43%. Untuk anak perempuan mengalami penurunan dari 40,14% menjadi 25%. Untuk perempuan mengalami penurunan dari 39,90% menjadi 39,24% sedangkan kasus kekerasan pada laki-laki terjadi pada tahun 2023 sebesar 2,33%.

Berdasarkan jenis kasus yang ditangani UPTD PPA Kota Denpasar pada tahun 2023 sudah mengalami penurunan sebesar 17,31% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 KDRT (psikis) menduduki posisi tertinggi, sedangkan pada tahun 2023 kekerasan (fisik, psikis, seksual) menduduki posisi tertinggi. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Kota Denpasar pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,31%, yang terdiri dari penanganan untuk korban anak perempuan anak laki-laki, laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2023 tidak terjadi TPPO jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan dilihat dari gepeng, jumlah gepeng di Kota Denpasar didominasi umur 19 tahun keatas, terdiri atas 112 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Di sisi lain jumlah lansia terlantar PPKS di Kota Denpasar pada tahun 2023 adalah 114 orang laki-laki dan 206 orang perempuan. Perempuan lansia masih mendominasi di Kota Denpasar.

DAFTAR ISI

COVER		i
SAMBUTAN		ii
KATA PENGANTAR		v
RINGKASAN EKSEKUTIF		vi
DAFTAR ISI		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	2
	1.3 Manfaat	3
	1.4 Jenis dan Sumber Data	4
	1.5 Analisis Data	4
BAB II	KONSEP-KONSEP	6
	2.1 Konstruksi Gender	6
	2.2 Pengarusutamaan Gender	8
	2.3 Statistik Gender	10
BAB III	GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR	14
	3.1 Kondisi Geografis dan Topografis	14
	3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar	16
	3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasanannya	17
	3.4 Visi dan Misi	19
	3.5 Sistem Pemerintahan	21
	3.6 Kondisi Demografi	21
	3.7 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	23
	3.8 Indek Pembangunan Gender (IPG)	25
BAB IV	PENDIDIKAN	28
	4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	29
	4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	29
	4.3 Jumlah Siswa	30
	4.4 Sekolah	39
	4.5 Guru	40
BAB V	KESEHATAN	52
	5.1 Angka Kelahiran Bayi	53
	5.2 Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023	55
	5.3 ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2022 dan 2023	57
	5.4 Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	60
	5.5 Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	64
	5.6. Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	66
	5.7 Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar	69
	5.8. Keluarga Berencana (KB)	75

	5.9. Penduduk yang Terlayani Air Bersih Tahun 2022 dan 2023	78
BAB VI	EKONOMI	76
	6.1 Kegiatan Utama Penduduk	79
	6.2 Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin	79
	6.3 Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	81
	6.4 Tenaga Penyuluh Pertanian	85
	6.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	86
	6.6 Tenaga Kerja Asing Pendetang	88
	6.7 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	89
	6.8 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	91
	6.9 Lingkungan Hidup dan Kebersihan	92
	6.10 Juru Parkir	94
	6.11 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata	96
	6.12 Pemilik Usaha Salon Kecantikan	98
	6.13 Tenaga Kerja di Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	99
BAB VII	SEKTOR PUBLIK	102
	7.1 Eksekutif	102
	7.2 Legislatif	111
	7.3 Lembaga Yudikatif	123
BAB VIII	LAIN-LAIN	125
	8.1 Kekerasan	125
	8.2 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	132
	8.3 Lansia (Lanjut Usia) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	133
BAB IX	PENUTUP	135
	DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Tanah di Kota Denpasar Dirinci per Kecamatan (Ha) Tahun 2019-2023	21
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2023	23
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Kota Denpasar 2021-2023	29
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Kota Denpasar 2021-2023	30
Tabel 4.3	Jumlah PAUD berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar pada Tahun 2023	32
Tabel 4.4	Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023	33
Tabel 4.5	Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023	34
Tabel 4.6	Jumlah Siswa SMA/MA/SMK menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023	35
Tabel 4.7	Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2023	36
Tabel 4.8	Jumlah Siswa SD/MI yang Putus Sekolah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023	37
Tabel 4.9	Jumlah Siswa SMP/MTS yang Putus Sekolah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023	37
Tabel 4.10	Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun yang Putus Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2023	38
Tabel 4.11	Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2023	39
Tabel 4.12	Jumlah Guru SD Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	41
Tabel 4.13	Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	43
Tabel 4.14	Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	45
Tabel 4.15	Jumlah Guru SMA yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	48
Tabel 4.16	Jumlah Kepala Sekolah SD Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	49
Tabel 4.17	Jumlah Kepala Sekolah SMP Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	50
Tabel 5.1	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023	53
Tabel 5.2	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023	56

Tabel 5.3	ASI Eksklusif di Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2022 dan 2023	59
Tabel 5.4	Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	61
Tabel 5.5	Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	65
Tabel 5.6	Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	66
Tabel 5.7	Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Tahun 2022 dan 2023	70
Tabel 5.8	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022	72
Tabel 5.9	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	73
Tabel 5.10	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB di Kota Denpasar Tahun 2023	76
Tabel 5.11	Jumlah Perempuan Pernah Nikah Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Nikah Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan Tahun 2023	77
Tabel 5.12	Persentase Penduduk yang Terlayani dan Tidak Terlayani Air Bersih di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	79
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 59 Tahun) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	80
Tabel 6.2	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, Tahun 2022 dan Tahun 2023	83
Tabel 6.3	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2023	84
Tabel 6.4	Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	85
Tabel 6.5	Tenaga Kerja Asing Pendetang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	89
Tabel 6.6	Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	90
Tabel 6.7	Persentase Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	90
Tabel 6.8	Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	91
Tabel 6.9	Persentase Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	92
Tabel 6.10	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	93

Tabel 6.11	Jumlah Petugas Kebersihan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	94
Tabel 6.12	Jumlah Juru Parkir Tepi Jalan Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	95
Tabel 6.13	Jumlah Petugas Parkir Gedung dan Pelataran Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	95
Tabel 6.14	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	96
Tabel 6.15	Jumlah Pemilik Usaha Akomodasi di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	97
Tabel 6.16	Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restaurant Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	98
Tabel 6.17	Pemilik Usaha Salon Kecantikan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	98
Tabel 6.18	Jenis Usaha dan Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin pada UMKM Kota Denpasar Tahun 2023	99
Tabel 7.1	Komposisi ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	103
Tabel 7.2	Jumlah Pegawai Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	105
Tabel 7.3	Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023	106
Tabel 7.4	Jumlah Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	107
Tabel 7.5	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	109
Tabel 7.6	Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	110
Tabel 7.7	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	111
Tabel 7.8	Jumlah Anggota DPRD Kota Denpasar Periode 2019-2024 Berdasarkan Jenis Kelamin	113
Tabel 7.9	Jumlah Pimpinan Partai Politik (Parpol) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021-2023	115
Tabel 7.10	Jumlah Anggota Bawaslu Pileg, Pilpres dan Pilkada Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	116
Tabel 7.11	Jumlah Anggota Bawaslu dan Pengawas Kelurahan Desa Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	116

Tabel 7.12	Jumlah Anggota KPU Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Periode 2018-2023	117
Tabel 7.13	Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	118
Tabel 7.14	Jumlah PPS Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	119
Tabel 7.15	Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2023	120
Tabel 7.16	Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023	121
Tabel 7.17	Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2023	121
Tabel 7.18	Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023	121
Tabel 7.19	Persentase Profesi Sektor Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	123
Tabel 8.1	Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	126
Tabel 8.2	Rekapitulasi Penanganan Kasus Kekerasan di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023	127
Tabel 8.3	Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	128
Tabel 8.4	Persentase Korban Kekerasan yang Ditangani oleh UPTD PPA Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023	129
Tabel 8.5	Jenis Kasus yang Ditangani UPTD PPA Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	129
Tabel 8.6	Jumlah Korban yang Ditangani UPTD PPA Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	130
Tabel 8.7	Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	131
Tabel 8.8	Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	132
Tabel 8.9	Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dan 2022	125
Tabel 8.8	Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	127
Tabel 8.9	Jumlah Lansia Terlantar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kondisi Geografis Kecamatan-kecamatan di Kota Denpasar	14
Gambar 3.2	Luas Lahan Sawah di Kota Denpasar	15
Gambar 3.3	Lambang Kota Denpasar	18
Gambar 3.4	Proyeksi Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2022-2023	22
Gambar 3.5	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2021-2023	25
Gambar 3.6	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2021-2023	26
Gambar 4.1	Persentase Guru SD yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	44
Gambar 4.2	Persentase Guru SMP yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	46
Gambar 4.3	Perbandingan Guru SD dan SMP yang Tersertifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023	47
Gambar 5.1	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	54
Gambar 5.2	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	54
Gambar 5.3	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	56
Gambar 5.4	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	57
Gambar 5.5	ASI Eksklusif di Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2022 dan 2023	60
Gambar 5.6	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 dan 2023	62
Gambar 5.7	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2022 dan 2023	62
Gambar 5.8	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022 dan 2023	63
Gambar 5.9	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022 dan Tahun 2023	63
Gambar 5.10	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 dan 2023	67
Gambar 5.11	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2022 dan 2023	68
Gambar 5.12	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022 dan 2023	68

Gambar 5.13	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022 dan 2023	69
Gambar 6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2021-2023	87
Gambar 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2022 dan 2023	88
Gambar 7.1	Persentase ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023	104
Gambar 7.2	Persentase ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023	107
Gambar 7.3	Persentase Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023	108
Gambar 7.4	Jumlah Pantarlih di Kota Denpasar Tahun 2023	122
Gambar 7.5	Jumlah Penegak Hukum di Kota Denpasar Tahun 2023	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kesetaraan menjadi salah satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara yang berkomitmen dalam MDGs (Millenium Development Goals) dalam pembangunan ekonomi. Salah satu hal mendasar dalam kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat adalah kesetaraan yang mengindikasikan seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, tanpa terkecuali. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan manusia Indonesia yaitu mencapai kesetaraan gender.

Dalam perkembangan dunia yang semakin modern dan maju, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di era Revolusi Industri 5.0 dan Megatren 2045. Perempuan memiliki potensi yang besar untuk memimpin perubahan menuju kemajuan dalam segala bidang, mulai dari teknologi hingga sosial. Oleh karena itu, memperkuat potensi perempuan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menghadapi masa depan yang semakin kompleks dan dinamis.

Revolusi Industri 5.0 merupakan istilah yang menggambarkan era di mana teknologi digital, internet, kecerdasan buatan, dan berbagai inovasi lainnya menyatu dalam segala aspek kehidupan manusia. Sementara, Megatren 2045 merupakan wacana tentang masa depan Indonesia pada tahun 2045 yang dikembangkan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Kedua fenomena ini menandai perubahan besar dalam dunia teknologi dan ekonomi global yang akan berdampak langsung terhadap cara hidup, bekerja, dan berinteraksi manusia.

Dalam Revolusi Industri 5.0 dan Megatren 2045, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi dan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi dan ekonomi yang terjadi. Perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Dengan memperkuat potensi perempuan, dapat meningkatkan kualitas sumber

daya manusia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan keadilan gender yang lebih baik.

Terkait dengan permasalahan diatas, tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan kelima dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender yang masih terjadi di Indonesia mengakibatkan ketersediaan Data Terpilah Gender (DTG) menjadi sangat penting. Data terpilah menurut jenis kelamin menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan, terutama bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional. DTG tidak hanya dapat digunakan pemerintah atau pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan yang responsif gender, tetapi juga bermanfaat bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk merancang atau mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan.

Terbatasnya ketersediaan data gender menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kesenjangan pencapaian pembangunan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal yang sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan yang pada prinsipnya IDG melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Hunt (2004) pemisahan data statistik dan informasi lainnya, berdasarkan jenis kelamin atau data terpilah (*sex-disaggregated data*) sangat diperlukan

sebagai alat untuk melakukan analisis gender. Tanpa data terpilah, akan sangat sulit untuk menilai perbedaan dampak aktivitas pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. Pemilahan data sangat penting untuk dilakukan, untuk kelompok masyarakat yang mungkin akan mendapatkan pengaruh positif atau negatif dari pembangunan. Bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi dapat pula berdasarkan usia, ras, etnis, dan kelompok sosial ekonomi lainnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin di daerahnya melalui Permen Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan data terpilah dalam buku statistik gender adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, publik dan aspek lainnya yang ada di Kota Denpasar. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsive gender. Sasaran kegiatan ini adalah tersusunnya buku data terpilah Profil Statistik Gender Kota Denpasar 2024.

1.3 Manfaat

Manfaat dari penyusunan Profil Statistik Gender adalah sebagai berikut: (1) sebagai baseline/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan partisipasi, kontrol, dan mendapatkan manfaat atas kebijakan, program dan hasil Pembangunan secara adil dan setara; (2) digunakan dalam melakukan analisis gender melalui GAP yang diperlukan untuk penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang

Responsif Gender (PPRG) yang berbasis kinerja; (3) sebagai dasar untuk mengintervensi/mereformulasi kebijakan/program/kegiatan Pembangunan yang responsive gender.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang ditampilkan dalam buku ini adalah data kuantitatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang dipublikasikan ini Sebagian besar berupa data primer yang diambil dari hasil-hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Suvei Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Selain dari BPS, data juga bersumber dari berbagai instansi terkait seperti dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar, Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, Kantor PD Parkir Kota Denpasar, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar, Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta Kota Denpasar, dan Dinas Sosial Kota Denpasar.

1.5 Analisis Data

Profil Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2024 dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data-data kuantitatif. Penampilan data kuantitatif ini akan menjadi lebih bermakna jika apa yang ada dibalik pemunculan data angka itu dianalisis secara mendalam. Analisis yang mendalam dilakukan dengan cara menarasikan secara lengkap atau menganalisis secara kualitatif data yang ada pada setiap tabel. Dalam analisis ini akan diberikan penafsiran-

penafsiran sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat, namun penafsiran ini baru berupa dugaan sementara yang pada gilirannya untuk menguji kebenarannya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

BAB II

KONSEP-KONSEP

2.1 Konstruksi Gender

Promosi kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan untuk memberdayakan masyarakat (semua orang), baik perempuan dan laki-laki, dan mengentaskan diri dari kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup. Dengan kata lain, adanya kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Kesetaraan gender tidak hanya penting dari sisi moralitas dan keadilan, tetapi juga sangat penting dan relevan dari sisi ekonomi.

Perbedaan norma dan perilaku/perlakuan terhadap seseorang yang terlahir sebagai laki-laki atau perempuan inilah yang kemudian membentuk peran, perilaku, dan atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Konstruksi sosial tersebut yang disebut dengan gender. Konstruksi sosial dalam masyarakat yang memberikan perlakuan, norma, dan pandangan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan pada kenyataannya berdampak terhadap adanya diskriminasi gender. Diskriminasi gender ini menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai ketimpangan gender. Lebih lanjut menyebutkan bahwa ketimpangan ini diperkuat dengan tumbuhnya budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki dari perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang bertanggungjawab pada peran publik, sedangkan perempuan hanya berkutat pada peran domestik. Sebenarnya perempuan memiliki hak untuk memilih dan menjalani peran domestik maupun publik. Namun, masalah terjadi ketika peran yang dijalani perempuan dicampuri oleh tekanan pihak luar, bahkan pihak terdekat.

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis Kelamin merupakan konstruksi biologis, universal, tidak dapat diubah karena merupakan kodrat. Misalnya laki laki memiliki sperma dan perempuan memiliki sel telur. Sedangkan gender adalah konstruksi social sehingga dapat merubah sesuai dengan

perkembangan zaman. Untuk mengatasi berbagai polemik atau diskriminasi tersebut, perlu ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki (UN Women).

Secara harfiah bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, dan juga mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, jugadalam hukum, bidangyangekonomi,sertasosial dan budaya, juga dalam pendidikan dan aspek pertahanan dan juga keamanan nasional serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya. Terwujudnya akan adanya kesetaraan dalam gender tentunya ditandai diskriminasi yang tidak ada, baik di antara kaum perempuan dan laki-laki sehingga akses yang ada dapat mereka miliki, berpertisipasi teruka lebar dan adanya kesempatan, kontrol dan juga memperoleh manfaat pembangunan yang setara dan juga adil. Adapun berbagai indikator dalam gender dan kesetaraannya adalah sebagai berikut :

1) Adanya akses

Peluang atau kesempatan dalam menggunakan sumberdaya tertentu. Mempertimbangkan dan juga memperhitungkan bagaimana laki-laki dan perempuan medpaatkan sumberdaya tersebut secara merata dan juga adil, dalam bidang pendidikan adanya program beasiswa, dimana diberikan secara adil dan merata antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkannya.

2) Partisipasi

Aspek dalam partisipasi merupakan suatu keikutsertaan dalam suatu kelompok atau orang tertentu dalam pengambilan keputusan. Disini dapat dilihat bahwa perempuan dan juga laki-laki apakah memang memiliki suatu peran yang sama atau tidak dalam mengambil suatu keputusan.

3) Kontrol

Penguasaan atau juga wewenang atau kekuatan dalam pengambilan suatu keputusan yang ada. Pemegang jabatan dalam hal tertentu dapat dilihat didominasi oleh gender atau tidak.

4) Manfaat

Merupakan manfaat atau kegunaan yang dapat dan juga dirasakan dan dinikmati secara penuh dan optimal. Di mana dalam keputusan tersebut yang telah diambil oleh pihak sekolah dapat memberikan suatu kemanfaatan adil dan sebaik-baiknya serta merata bagi laki-laki dan perempuan.

Jika merujuk pada pandangan yang normatif dimaksudkan bahwa kesetaraan gender didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku, dimana sikap seseorang lebih berpedoman kepada loyalitas, kesetiaan, serta aturan dan kaidah yang berlaku di lingkungannya. Sudut dalam pandangan yang normatif memberikan pengertian bahwa adanya aturan yang mengikat seseorang untuk tidak melakukan penyimpangan atau melanggar suatu kaidah atau norma yang sudah ditetapkan. Ketaatan dan kesetiaan ditunjukkan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada, dimana prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam suatu peraturan hukum, yang mendasarkan pada keadilan,

2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Istilah pengarusutamaan gender (PUG) berasal dari bahasa Inggris "Gender Mainstreaming". Istilah ini digunakan pada saat Konferensi Wanita Sedunia ke IV di Beijing dan dicantumkan pada "Beijing Platform of Action". Semua negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi tersebut secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan "Gender Mainstreaming" tersebut di negaranya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di

berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengarusutamaan gender (PUG), atau dalam istilah Inggris: Gender Mainstreaming, merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki: (1) memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya Pembangunan; (2) berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan Keputusan; (3) mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan (4) memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

Penyelenggaraan pangarusutamaan gender mencakup baik pemenuhan kebutuhan praktis gender maupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki guna menjalankan peran-peran sosial masing-masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, dan pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender adalah kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan

diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan sebagainya.

Pada dasarnya pengarusutamaan gender adalah menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan nasional.

Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptakan mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di semua bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Lebih nyata penyelenggaraan PUG dimaksudkan untuk mencapai kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis adalah pemenuhan jangka pendek, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pemberantasan buta aksara dan sebagainya. Pemenuhan kebutuhan strategis merupakan kebutuhan jangka panjang, seperti perubahan posisi subordinasi perempuan dalam berbagai bidang ke dalam posisi setara dan adil gender. Pentingnya melaksanakan PUG di dalam berbagai bidang Pembangunan bertujuan untuk memastikan apakah laki-laki dan perempuan benar-benar sudah memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat sama dari hasil pembangunan.

2.3 Statistik Gender

Statistik gender didefinisikan sebagai statistik yang secara memadai mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan situasi perempuan dan laki-laki di semua bidang kehidupan (PBB, 2006). Definisi ini sangat mengikuti Platform Aksi Beijing, yang diadopsi pada Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan, yang diadakan di Beijing pada tahun 1995, dan dalam paragraf 206 (a) yang direkomendasikan bahwa layanan statistik nasional, regional dan internasional harus memastikan bahwa statistik yang berkaitan dengan individu dikumpulkan, disusun, dianalisis dan disajikan berdasarkan jenis kelamin dan usia dan mencerminkan masalah, isu dan pertanyaan yang berkaitan dengan perempuan

dan laki-laki dalam masyarakat (PBB, 1996). Ada beberapa persyaratan yang melekat dalam definisi statistik gender (Hedman, Perucci dan Sundström, 1996; United Nations, 2001a, 2001b, 2002, 2006, 2007; Corner, 2003). Pertama, statistik gender harus mencerminkan isu-isu gender, yaitu pertanyaan, permasalahan dan kekhawatiran yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan perempuan dan laki-laki, termasuk kebutuhan khusus, peluang dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Dalam setiap masyarakat, terdapat perbedaan antara apa yang diharapkan, diperbolehkan dan dihargai dalam diri seorang perempuan dan apa yang diharapkan, diperbolehkan dan dihargai dalam diri seorang laki-laki. Perbedaan-perbedaan ini mempunyai dampak spesifik terhadap kehidupan perempuan dan laki-laki di seluruh tahapan kehidupan dan menentukan, misalnya, perbedaan dalam kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan keluarga atau kesejahteraan umum. Pembuatan statistik gender memerlukan pemilahan data berdasarkan jenis kelamin dan karakteristik lainnya untuk mengungkap perbedaan atau ketidaksetaraan tersebut dan mengumpulkan data mengenai isu-isu tertentu yang lebih mempengaruhi satu jenis kelamin dibandingkan yang lain atau berhubungan dengan hubungan gender antara perempuan dan laki-laki. Kedua, statistik gender harus cukup mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan dalam situasi perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data harus dikembangkan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa keragaman kelompok perempuan dan laki-laki serta aktivitas dan tantangan spesifik mereka dapat tercakup. Selain itu, metode pengumpulan data yang menimbulkan bias gender dalam pengumpulan data, seperti tidak dilaporkannya kegiatan ekonomi perempuan, tidak dilaporkannya kekerasan terhadap perempuan, dan terlalu rendahnya penghitungan jumlah anak perempuan, kelahiran dan kematian mereka harus dihindari.

Statistik Gender merupakan statistik yang mengandung isu gender, seperti terefleksikan dari kesenjangan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam isu yang spesifik. Statistik Gender merupakan hasil analisa lebih lanjut dari Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin. Sementara PBB mendefinisikan bahwa Statistik Gender adalah statistik

yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti dalam situasi perempuan dan laki-laki di semua aspek kehidupan (PBB, 2006).

Data terpilah menurut jenis kelamin dan umur memberikan gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki di semua kelompok umur dan diberbagai aspek kehidupan. Data terpilah menurut jenis kelamin, tidak selalu mengandung isu gender. Akan tetapi data terpilah menurut jenis kelamin merupakan unsur dasar yang harus ada untuk mengungkapkan isu gender, yaitu suatu isu yang muncul karena pemberlakuan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin. Isu gender ini selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses pembangunan.

Statistik gender tidak boleh disamakan dengan statistik perempuan. Pemahaman tentang statistik gender, kegunaannya, dan penggunaannya telah berubah seiring berjalannya waktu (Hedman, Perucci dan Sundström, 1996; Corner, 2003). Pekerjaan awal terfokus pada pembuatan statistik perempuan, dalam konteks di mana banyak negara mengumpulkan data berdasarkan jenis kelamin, namun sebagian besar data dianalisis dan/atau disediakan bagi pengguna sebagai data total, tanpa ada kemungkinan untuk membedakan antara perempuan dan laki-laki. Permintaan akan data dan indikator mengenai perempuan datang dari organisasi perempuan dan aktivis perempuan, yang membutuhkan statistik untuk mendukung kebijakan dan program baru yang berorientasi pada pengurangan kerugian yang dihadapi perempuan. Namun sejak saat itu, fokusnya telah bergeser dari “perempuan saja” menjadi “perempuan dan laki-laki”, baik dari segi statistik maupun kebijakan. Dari segi statistik, menjadi jelas bahwa situasi perempuan dapat digambarkan dan dianalisis secara memadai hanya dengan membandingkannya dengan laki-laki. Selain itu, para ahli statistik telah menyadari bahwa perbaikan juga diperlukan dalam bidang statistik laki-laki. (Hedman, Perucci dan Sundström, 1996). Isu-isu khusus yang berkaitan dengan kehidupan laki-laki, seperti tingkat konsumsi alkohol dan merokok yang berbahaya, risiko kecelakaan atau cedera yang lebih besar, dan akses terhadap cuti melahirkan yang dibayar, semakin diperhitungkan dan tercakup dalam statistik gender. Dalam hal kebijakan, perubahan fokus dari perempuan ke gender berasal dari pengakuan bahwa mengisolasi keprihatinan

perempuan dari kebijakan dan strategi pembangunan arus utama akan membatasi dampak kebijakan dan strategi tersebut, sementara memberikan lebih banyak perhatian pada peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki. keterkaitannya dapat membuat kebijakan dan strategi menjadi lebih efektif.

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR

3.1 Kondisi Geografis dan Topografis

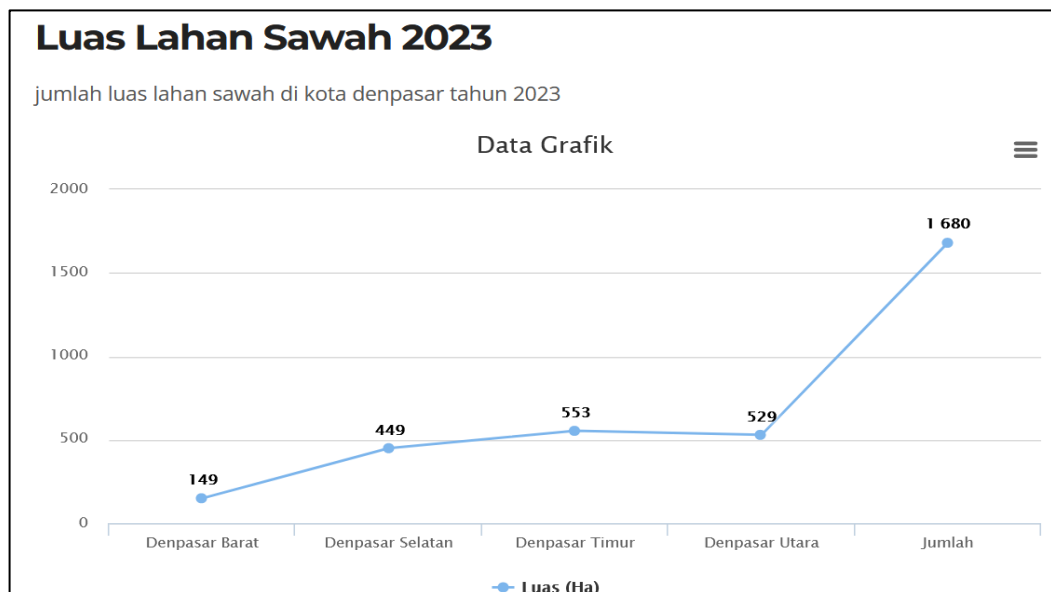
Kota Denpasar merupakan daerah atau salah satu kota yang terletak di tengah – tengah Pulau Bali, yang juga merupakan Ibukota dari Provinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral atau pusat dari berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar memiliki luas wilayah seluas 125,98 km² (BPS Kota Denpasar, 2024). Kota Denpasar terdiri atas 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Barat. Kondisi geografis ini dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 3.1 Kondisi Geografis Kecamatan-Kecamatan di Kota Denpasar

Ditinjau dari tata letak topografisnya, Kota Denpasar terletak di antara 08 35' 31" – 08 44' 49" Lintang Selatan dan 115 10' 23" – 115 16' 27" Bujur Timur. Keadaan topografi Kota Denpasar, posisinya miring ke arah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0—75 meter di atas permukaan laut. Semakin ke arah utara letak wilayahnya tampak semakin tinggi walaupun ketinggiannya agak tidak merata. Sebaliknya, semakin ke arah selatan letak wilayahnya semakin rendah karena paling ujung berbatasan dengan bibir pantai, antara lain Pantai Padang Galak, Pantai Sanur, Pantai Pesanggaran, dan Pantai Serangan. Morfologi wilayah Kota Denpasar yang landai dengan kemiringan lahan sebagian besar berkisar antara 0—5%, tetapi di bagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15% (<https://od/scribd.com>).

Lahan pertanian sawah di Kota Denpasar yang masih bertahan sampai sekarang ini, dapat ditanami secara intensif sepanjang tahun karena didukung oleh aliran air sungai yang memadai. Di wilayah Kota Denpasar terdapat sungai besar bernama Tukad Badung yang sementara ini tidak pernah kering. Selain itu, juga terdapat sungai- sungai yang lain di mana penggunaan airnya dikelola oleh lembaga tradisional bernama subak. Lahan sawah di Kota Denpasar paling tinggi terletak di Denpasar Timur dengan luas 553 Ha.



Gambar 3.2 Luas Lahan Sawah di Kota Denpasar

Sumber: https://dota.denpasarkota.go.id/?domain=dota.denpasarkota.go.id&page=Data-List-Denpasar-Detail&language=id&data_id=1706248017

3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar

Ditinjau dari segi historisnya, Kota Denpasar mempunyai riwayat yang relatif panjang yang pada akhirnya menjadi Ibu Kota Provinsi Bali. Asal usul kata Denpasar berasal dari dua suku kata, yaitu den dan pasar. Kata den berarti utara dan kata pasar berarti pasar atau peken. Sesuai dengan asal-usul katanya, Denpasar berarti di utara pasar yang sekaligus juga menunjukkan lokasi puri yang saat itu menjadi pusat orientasi penduduk berada di sebelah utara pasar (Salain dalam Wiasti, 2010; 52).

Ditinjau dari segi ruang (space), pada awalnya Kota Denpasar menjadi pusat Kerajaan Badung, yang pada mulanya merupakan sebuah taman. Taman ini disebut-sebut bukanlah sekadar taman karena taman ini merupakan kesayangan Raja Badung Kyai Jambe Ksatria yang beristana di Puri Jambe Ksatria di Pasar Satria sampai ke utara, yang sampai sekarang pasar ini masih tetap ajeg. Selain itu, taman ini dilengkapi pula dengan tempat peraduan yang diperuntukkan khusus bagi tamu-tamu yang datang dari luar Badung. Taman itu terletak di sebelah utara pasar, tepatnya di rumah jabatan Gubernur Bali, sekarang bernama Jaya Sabha. Awalnya pasar terletak di lapangan Puputan Badung sekarang, tapi pada zaman Belanda pasar itu dipindah ke dekat Tukad Badung sehingga dikenal sebagai Pasar Badung. Oleh karena itu, Kota Denpasar merupakan perkembangan dari wilayah kerajaan yang saat itu Puri Denpasar menjadi pusat pemerintahannya.

Pada tahun 1779 terjadi konflik antara Kyai Jambe Ksatria dengan I Gusti Ngurah Rai. Padahal, I Gusti Ngurah Rai tak lain orang kepercayaan Kyai Jambe Ksatria, terutama dalam hal permainan aduan ayam. Konflik ini berujung pada terbunuhnya Kyai Jambe Ksatria. Pascaterbunuhnya Kyai Jambe Ksatria, kekuasaan dilimpahkan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Pelimpahan kekuasaan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan menandai berakhirnya kekuasaan Puri Jambe Ksatria. Pasalnya, I Gusti Ngurah Made Pemecutan mendirikan istana baru di Taman Denpasar. Istana baru itulah dinamai Puri Denpasar dan di-pelaspas pada tahun 1788. I Gusti Ngurah Made Pemecutan pun dinobatkan sebagai Raja Denpasar I. Tahun 1788 inilah sebagai tonggak kelahiran Kota Denpasar (Sujaya: <http://www.balebengong.net>).

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dan selanjutnya pada tahun 1958 Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Bali sekaligus menjadi ibu kota. Pada awalnya Kota Denpasar dijadikan sebagai kota Administratif dengan fokus orientasi pada urusan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, dengan dijadikannya sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat II Badung dan sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, maka tidak bisa dipungkiri menjadi pusat orientasi berbagai aspek kehidupan dari berbagai penjurur wilayah pemerintahan sehingga secara pasti mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya maupun demografinya.

Selain sebagai pusat pemerintahan, secara otomatis Kota Denpasar juga menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat pariwisata yang pada awalnya secara keseluruhan wilayahnya di bagi menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Melihat perkembangan kota administratif ini dari berbagai sektor begitu pesat, maka tidak mungkin ditangani oleh pemerintahan sebatas pemerintahan yang berstatus kota administratif. Oleh karena itu, selanjutnya sesuai dengan perkembangan kota serta berbagai pertimbangan antara provinsi Bali dan Kabupaten Badung sepakat untuk meningkatkan status kota administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Setelah kota Denpasar dirubah statusnya, yaitu dari kota administratif menjadi Kota Denpasar berarti juga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan kota.

3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasannya

Masing-masing kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali telah memiliki lambang tersendiri. Lambang Kota Denpasar berbentuk segi lima sama sisi sebagai berikut.



Gambar 3.3 Lambang Kota Denpasar

Warna dasar segi lima sama sisi pada lambang Kota Denpasar, yaitu berwarna biru laut, sedangkan garis pinggirnya berwarna hitam. Pita berwarna putih pada bagian bawahnya tertulis motto “PURADHIPA BHARA BHAVANA”, yang mengandung arti, yaitu “kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat”. Di dalam segi lima sama sisi tersebut, terdapat pula lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang Kota Denpasar. Adapun unsur- unsur lambang yang dimaksud sebagai berikut.

1. Segi lima sama sisi
 - a) Dasarnya berbentuk segi lima sama sisi berarti bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
 - b) Warna dasar biru laut melambangkan keagungan.
 - c) Garis pinggir berwarna putih melambangkan kesucian/budi luhur, dan warna hitam melambangkan kekuatan.
2. Padmasana Jagatnatha
 - a) Melambangkan alam semesta tempat suci untuk pemujaan Ida Sanghyang Widhi Wasa.
 - b) Jagatnatha dapat pula diartikan sebagai tempat pemerintahan atau penguasa. Jadi Jagatnatha dalam hal ini diartikan sebagai Denpasar merupakan pusat pemerintahan.

- c) Warna kuning emas pada Pura Jagadnatha melambangkan tempat suci untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
3. Keris
- a) Melambangkan jiwa/melintas keperwiraan yang lazim disebut jiwa keperwiraan.
 - b) Keris juga melambangkan bahwa Kota Denpasar sebagai kota perjuangan.
 - c) Warna hitam dalam keris melambangkan ketegasan.
4. Candi Bentar
- a) Melambangkan kebudayaan, yakni Kota Denpasar memiliki kebudayaan yang bersifat khas.
 - b) Candi bentar juga diartikan sebagai pintu gerbangnya Provinsi Bali.
5. Tangga yang berjumlah tiga buah
- Melambangkan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar selalu berlandaskan konsep TRI KAYA PARISUDHA.
6. Lingkaran bunga teratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai melambangkan asta dala atau asta beratha.
7. Padi Kapas serta rantai (gelang) 2 (dua) melambangkan:
- a) Padi yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah melambangkan tanggal 27.
 - b) Rantai (gelang) berjumlah dua buah melambangkan bulan dua (Februari).
 - c) Kapas dengan bunga berjumlah 9 (Sembilan) buah dan daun dua helai melambangkan tahun 92. Dengan demikian, padi, kapas, serta rantai sebagai pengikat padi kapas melambangkan bahwa Kota Denpasar lahir pada tanggal 27 Februari 1992.

3.4 Visi dan Misi

Kota Denpasar yang dipimpin oleh Walikota sebagai pucuk pimpinan didalam melaksanakan roda pemerintahan merumuskan program-program pembangunan dan kebijakan-kebijakannya. Penyusunan program-program dan kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan dengan mengacu kepada visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon yang terpilih menjadi Walikota (Walikota dan Wakilnya). Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD

Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, visi dan misi ini mengarahkan pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut.

3.4.1 Visi

Rumusan visi Kota Denpasar adalah “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. Konsep kota kreatif menitikberatkan pada Denpasar Kota Hidup, dimana kota hidup memberikan kesadaran dinamis terhadap sumber daya alam untuk menggugah inovasi, sumberdaya manusia untuk menggugah dinamika kultur dan sumber daya spiritual yang dapat menggugah kreasi aparatur. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreatifitas, baik penciptaan, pelestarian maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban dan keseimbangan sosial. Berbasis budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini, Denpasar menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul.

3.4.2 Misi

Relevan dengan rumusan visi tersebut di atas maka dirumuskan misi Kota Denpasar sebagai berikut.

- a) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- b) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
- c) Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- d) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- e) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

3.5 Sistem Pemerintahan

Terdapat 4 kecamatan di Kota Denpasar, yaitu: (1) Kecamatan Denpasar Selatan, (2) Kecamatan Denpasar Timur, (3) Kecamatan Denpasar Barat, dan (4) Kecamatan Denpasar Utara. Masing-masing kecamatan tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai pucuk pimpinan yang bernama camat.

Secara fungsional dan struktural di masing-masing camat terbagi menjadi beberapa desa dinas/kelurahan, dan desa adat. Pucuk pimpinan di level desa dinas bernama perbekel atau kepala desa, sedangkan di level kelurahan bernama lurah dan di level desa adat bernama bendesa. Selanjutnya, di level desa secara fungsional dan struktural dibagi lagi menjadi banjar dinas dan banjar adat.

Dalam konteks ini, di Bali pada umumnya dan di Kota Denpasar khususnya di level pemerintahan di tingkat desa dan banjar telah terjadi pemisahan penanganan di bidang kedinasan dan bidang adat. Demikian pula, di level banjar, ada disebut banjar adat dan banjar dinas. Walaupun demikian, dalam menjalani kewajiban sehari-hari antara desa dinas dan desa adat serta antara banjar dinas dan banjar adat bersinergi, baik secara intern maupun ekstern. Jumlah desa/kelurahan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Denpasar tidak mengalami perubahan dari tahun 2019-2023, yaitu sebanyak 43 desa/kelurahan.

Tabel 3.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2019-2023

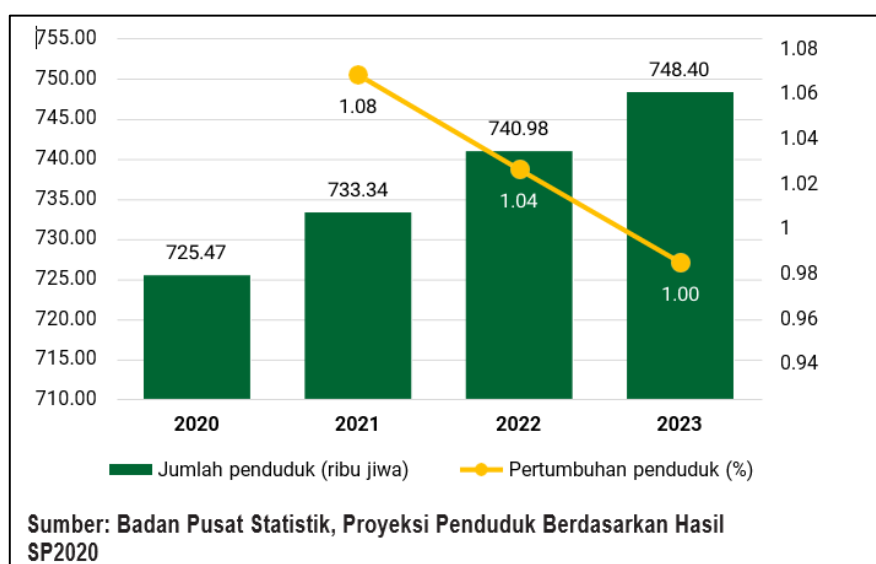
Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Denpasar Selatan	10	10	10	10	10
Denpasar Timur	11	11	11	11	11
Denpasar Utara	11	11	11	11	11
Denpasar Barat	11	11	11	11	11
Denpasar	43	43	43	43	43

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

3.6 Kondisi Demografi

Kota Denpasar, sebagai ibukota provinsi, memiliki populasi penduduk cukup besar di Provinsi Bali. Dengan jumlah penduduk sekitar 748,40 ribu jiwa di tahun 2023, angka ini mencapai 16,99 persen dari total penduduk Bali yang

berjumlah sekitar 4,40 juta orang (berdasarkan proyeksi penduduk menggunakan Hasil SP2020). Jumlah penduduk secara de facto¹ diperoleh dari hasil Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sejak diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Kotamadya pada tanggal 27 Februari 1992 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992, Sensus Penduduk telah dilaksanakan di Kota Denpasar sebanyak 3 kali. Sensus Penduduk yang pertama kali dilaksanakan di Kota Denpasar (setelah lepas dari Kabupaten Badung) adalah Sensus Penduduk tahun 2000. Pada pelaksanaan Sensus Penduduk pada tahun 2000, jumlah penduduk Kota Denpasar tercatat sebanyak 532 ribu jiwa. Kemudian pada Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota Denpasar meningkat cukup signifikan menjadi 788,59 ribu jiwa. Pada Sensus Penduduk terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Denpasar tercatat mengalami penurunan menjadi 725,47 ribu jiwa



Gambar 3.4 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kota Denpasar Tahun 2020-2023

Ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki paling banyak berada di kelompok umur 25-29 tahun (30.300 jiwa), sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan paling banyak berada di kelompok umur 40-44 tahun (29.900 jiwa). Data ini menunjukkan penduduk di Kota Denpasar mayoritas berada pada

kategori produktif. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2023 jika ditinjau dari jenis kelaminnya tidak menunjukkan perbedaan jumlah yang mencolok. Namun, dari perspektif gender, jumlahnya penduduk Kota Denpasar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	26,5	25,2	51,7
5-9	25,3	24,3	49,6
10-14	27,6	26,1	53,7
15-19	29,5	27,6	57,1
20-24	29,7	28,1	57,8
25-29	30,3	29,3	59,7
30-34	29,5	29,0	58,5
35-39	28,5	29,2	57,7
40-44	28,8	29,9	58,7
45-49	29,1	29,7	58,7
50-54	27,0	27,3	54,3
55-59	24,0	22,9	46,8
60-64	17,4	16,4	33,8
65-69	11,7	11,3	23,0
70-74	7,5	7,4	14,9
75+	5,8	6,8	12,6
Denpasar	378,1	370,3	748,4

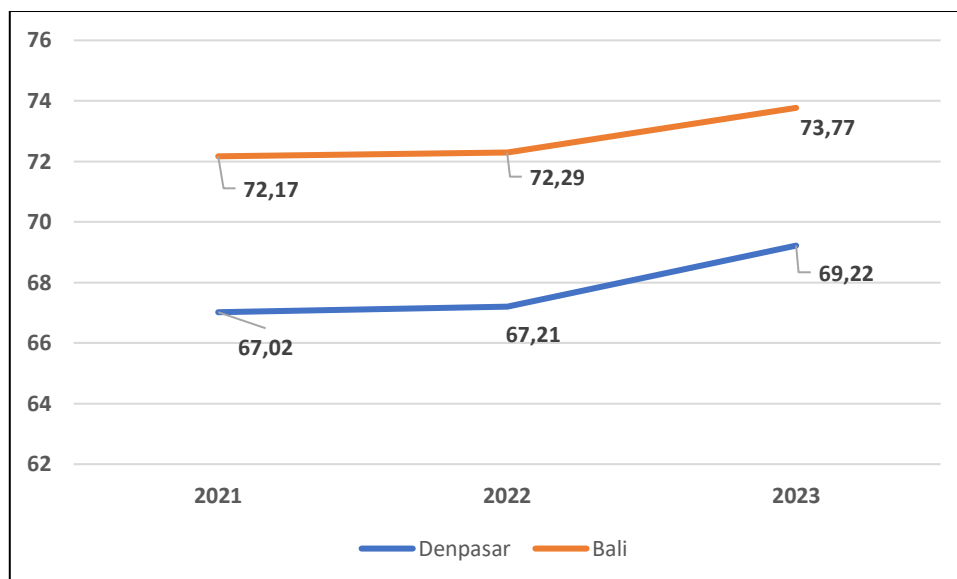
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

3.7 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

BPS mendefinisikan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (<https://www.bps.go.id/subject/40/gender.html>). Dimensi ini mengandung tiga unsur penting yaitu perempuan di legislative, perempuan professional dan kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga.

Indikator pada IDG dapat dilihat dari 3 dimensi utama, diantaranya ada keterwakilan parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi

pendapatan. Keterwakilan parlemen dikategorikan sebagai sebuah arena politik dimana proses kebijakan yang dibuat berfokus pada gerakan perempuan di dunia, selain menuntut hak dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga mendorong partisipasi keterwakilan perempuan dalam mengambil peran baik didalam partai politik di Indonesia untuk melakukan aktivitas *gatekeeping* terutama dalam kandidasi perempuan seperti menjadi Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat daerah maupun nasional (Adeni & Harahap, 2017; Mukarom, 2008; Rodiyah, 2013; Zaetun & Mariyah, 2020). Terlebih kondisi pada gelombang modernisasi yang kian menerpa seakan sangat mudah menenggelamkan orang-orang yang tidak siap dengan perkembangan zaman, mau tidak mau perempuan harus mengikutinya (Aspariyana, 2018). Jika dilihat dari aspek pengambilan keputusan, kondisi ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang mempunyai strategi dalam peningkatan serta pengembangan dari berbagai sektor, baik dari sektor ekonomi, budaya, sosial dan sebagainya. Hal ini diperuntukan untuk kaum gender di Indonesia agar keadilan dari berbagai aspek tersebut bisa dirasakan secara signifikan (Azizah, 2019; Rinawati et al., 2007; Sahban, 2016; Tuapattinaya & Hartati, 2014; Solina et al., 2021). Distribusi pendapatan akan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD), partisipasi perempuan di dalam dunia pekerjaan baik sektor formal dan informal mendorong pengurangan tingkat pengangguran hingga kemiskinan (Adnan & Amri, 2020; Amnesi, 2013), terutama perempuan yang memiliki *softskill* dan *hardskill* yang memberikan kontribusi terhadap industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM (Angin & Sukamto, 2014; Hamid et al., 2020; Sri, 2013; Syarif & Zainuddin, 2017). Namun demikian dari 3 dimensi tersebut, pemberdayaan gender juga harus mengidentifikasi dari strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi dan harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender.



Sumber: <https://denpasarkota.bps.go.id/indicator/40/122/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-kota-denpasar-dan-provinsi-bali-.html>

Gambar 3.5 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2021-2023

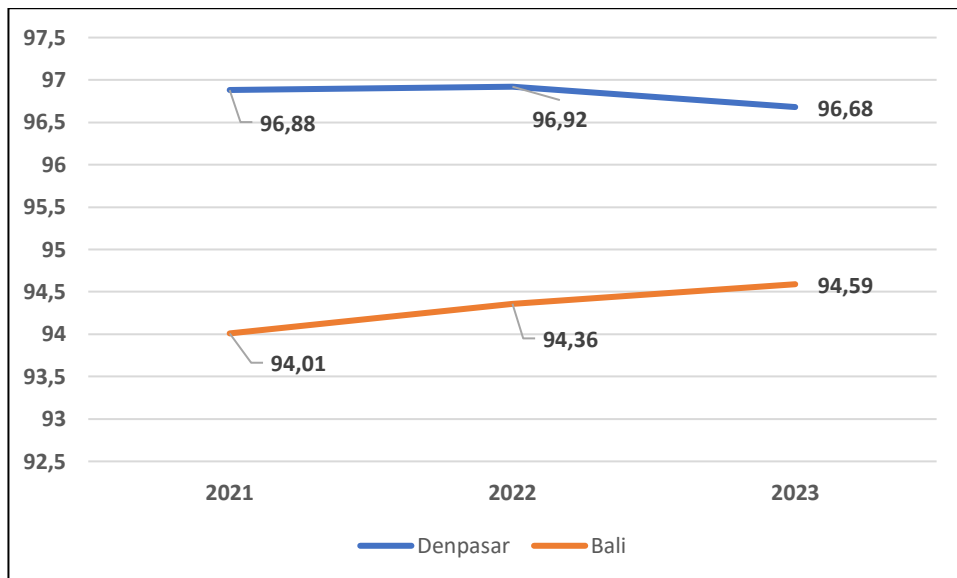
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Denpasar pada tahun 2021-2023 lebih rendah dibandingkan IDG Provinsi Bali. IDG Kota Denpasar mengalami kenaikan sebesar 0,19 poin dari tahun 2021-2022 dan sebesar 2,01 poin dari tahun 2022-2023. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir.

3.8 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.



Sumber: <https://bali.bps.go.id/indicator/40/132/1/indeks-pembangunan-gender-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2021-2023

Berdasarkan Gambar 3.6, IPG Kota Denpasar tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,58 poin dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan kondisi IPG Provinsi Bali, IPG Denpasar masih berada di atas IPG Bali. Ini menandakan kondisi kesetaraan gender di Denpasar masih lebih bagus dibandingkan Bali secara keseluruhan. Dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan gender di beberapa aspek yang terkait dengan indikator IPG seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi disparitas gendernya semakin mengecil.

Sebagai informasi, IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

BAB IV PENDIDIKAN

Tingkat kecerdasan dan wawasan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu peradaban. Pendidikan memperluas peluang seseorang dan meningkatkan kreativitas serta imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga memperluas pilihan-pilihan lain. Untuk meningkatkan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan, ada berbagai macam upaya yang dapat dilakukan. Pendidikan menjadi salah satu program prioritas untuk mewujudkan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Berbagai program di bidang pendidikan telah diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Denpasar.

UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini bermakna bahwa setiap warga Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga dewasa, direkognisi oleh undang-undang memiliki hak dan kesempatan setara untuk mendapat pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia atau UU Sisdiknas turut menjadi pijakan dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Paling tidak terdapat empat isu sentral dalam reformasi pendidikan meliputi, pendidikan agama selaku basis pendidikan nasional, pemerataan kesempatan mengakses pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi pendidikan, efisiensi dalam manajemen pendidikan.

Berbagai macam program pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dasar manusia. Pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah perlu menjamin bahwa warga negaranya minimal menikmati pendidikan dasar hingga 9 tahun. Untuk memonitor kemajuan partisipasi pendidikan, pemerintah menggunakan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Bila dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah, masyarakat Kota Denpasar sudah menyadari pentingnya bersekolah. Terlihat dalam Tabel 4.1 bahwa anak usia 7-15 tahun hampir seluruhnya bersekolah, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara usia 16 tahun ke atas, untuk laki-laki berkisar antara 75 hingga 82 persen sementara untuk perempuan berkisar 79 hingga 88 persen. APS penduduk laki-laki tahun 2023 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,45 persen. Namun, angka tersebut masih di bawah angka pada tahun 2020 sehingga masih perlu menjadi perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Denpasar.

Tabel 4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal dan Non Formal Kota Denpasar Tahun 2021-2023 (Persen)

Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Tahun		
		2021	2022	2023
7 - 12	Laki-laki	99,69	98,79	98,62
	Perempuan	100	100	99,65
13-15	Laki-laki	98,10	98,38	96,98
	Perempuan	100	99,33	100
16-18	Laki-laki	82,01	75,04	78,49
	Perempuan	79,07	87,70	88,56

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

Informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan, indikator APM memang lebih relevan.

4.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Pada tahun 2023, APM SD pada penduduk laki-laki sebesar 98,4 persen sementara

pada penduduk perempuan 99,28 persen. Artinya, pada tahun 2022 sekitar 98,4 persen penduduk laki-laki dan 99,28 persen penduduk perempuan yang berumur 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD sederajat. Sama halnya dengan APM SD, APM SMP dan SMA untuk penduduk perempuan angkanya juga lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. APM SMP penduduk perempuan sebesar 83,44 persen, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 81,04 persen. Artinya, pada tahun 2023 sekitar 83,44 persen penduduk perempuan dan 81,04 persen penduduk laki-laki yang berumur 13-15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMP sederajat. Kemudian, APM SMA penduduk perempuan sebesar 87,23 persen, sedangkan penduduk laki-laki sebesar 78,49 persen yang artinya pada tahun 2023 sekitar 87,23 persen penduduk perempuan dan 78,49 persen penduduk laki-laki yang berumur 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SMA sederajat.

Tabel 4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Non Formal Kota Denpasar, 2021-2023 (Persen)

Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Tahun		
		2021	2022	2023
7 - 12	Laki-laki	97,52	98,79	98,40
	Perempuan	94,95	95,75	99,28
13-15	Laki-laki	76,56	80,95	81,04
	Perempuan	82,11	77,72	83,44
16-18	Laki-laki	70,81	66,87	78,49
	Perempuan	70,13	76,21	87,23

Sumber: BPS Kota Denpasar, 2024

4.3. Jumlah Siswa

Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di mana, dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapai secara optimal. Menurut Ali (2010), siswa adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh orang tua untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan sekolah dengan tujuan menjadi manusia dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kepribadian, akhlak, dan

mandiri. Pada bagian ini akan dijabarkan jumlah siswa menurut jenjang pendidikan di Kota Denpasar tahun 2023.

4.3.1. Siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pada jenjang PAUD mengupayakan pembinaan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Rangsangan pendidikan diharapkan dapat membantu anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan enam perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni sesuai keunikan dan tahap perkembangan kelompok usia.

Data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada tahun 2023 menunjukkan bahwa total jumlah siswa PAUD menyentuh angka 14.208 siswa dengan komposisi 7.302 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 1.701 siswa lainnya berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki jumlah siswa PAUD paling tinggi yakni 3.788 siswa. Setelah Denpasar Selatan, posisi kedua ditempati oleh Denpasar Barat dengan jumlah siswa 3.786 siswa. Adapun posisi ketiga ditempati oleh Denpasar Utara dengan jumlah siswa 3.585 siswa. Kecamatan dengan jumlah siswa PAUD terendah ialah Denpasar Timur dengan jumlah siswa 3.049.

Tabel : 4.3. Jumlah Siswa PAUD Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Kecamatan	Tahun 2023		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	1.942	1.844	3.786
2	Kec. Denpasar Selatan	1.871	1.917	3.788
3	Kec. Denpasar Timur	1.605	1.444	3.049
4	Kec. Denpasar Utara	1.884	1.701	3.585
Jumlah		7.302	6.906	14.208

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

Apabila dibaca berdasarkan jenis kelamin, maka Kecamatan Denpasar Barat memiliki jumlah siswa PAUD tertinggi berdasarkan jenis kelamin laki-laki yakni 1.942 siswa dan Kecamatan Denpasar Timur memiliki jumlah siswa PAUD terendah berdasarkan jenis kelamin laki-laki yakni 1.605 siswa. Sedangkan untuk siswa PAUD dengan jenis kelamin perempuan paling tinggi berada pada Kecamatan Denpasar Selatan yakni 1.917 siswa dan terendah berada pada Kecamatan Denpasar Utara yakni 1.701 siswa.

4.3.2. Siswa Sekolah Dasar (SD)

Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang dasar bagi peserta didik dalam menempuh pendidikan. Pendidikan SD memiliki kontribusi dalam membangun dasar pengetahuan siswa untuk digunakan pada pendidikan selanjutnya, oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar harus berjalan optimal. Selain itu, pendidikan SD juga dapat dipahami sebagai pendidikan anak berusia tujuh sampai 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya.

Berdasarkan Data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada tabel 4.4., pada tahun 2023 terdapat total 81.368 siswa Sekolah Dasar yang tersebar di empat kecamatan Kota Denpasar. Dari total jumlah siswa tersebut, 42.095 siswa merupakan siswa dengan jenis kelamin laki-laki dan 39.273 siswa lainnya berjenis kelamin perempuan. Secara berturut-turut, kecamatan dengan jumlah

siswa SD tertinggi pertama diduduki oleh Kecamatan Denpasar Selatan dengan jumlah 22.369 siswa. Kecamatan dengan jumlah siswa SD tertinggi kedua ialah Denpasar Barat. Sedangkan Denpasar Utara berada di posisi ketiga dengan jumlah 19.895 siswa dan terakhir ialah Denpasar Timur dengan total 16.842 siswa.

Tabel : 4.4. Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Tahun 2023		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	11.456	10.806	22.262
2	Kec. Denpasar Selatan	11.549	10.820	22.369
3	Kec. Denpasar Timur	8.777	8.065	16.842
4	Kec. Denpasar Utara	10.313	9.582	19.895
Jumlah		42.095	39.273	81.368

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, kecamatan dengan jumlah siswa SD laki-laki tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Selatan dan terendah berada di Kecamatan Denpasar Timur. Sedangkan untuk jumlah siswa SD perempuan tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Selatan sejumlah 10.820 siswa dan terendah berada di Kecamatan Denpasar Timur sejumlah 8.065 siswa.

4.3.3. Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari Sekolah Dasar (SD/ sederajat). Sekolah menengah pertama ditempuh dalam kurun waktu tiga tahun. Sekolah menengah pertama diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Di mana, sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah menengah pertama negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada tahun 2023, dapat dilihat bahwa jumlah siswa sekolah menengah pertama di Kota Denpasar mencapai angka 36.519 siswa yang tersebar di empat kecamatan. Dari jumlah tersebut, 18.882 siswa diantaranya adalah laki-laki dan 17.637 siswa lainnya adalah perempuan. Adapun kecamatan dengan jumlah siswa SMP tertinggi ialah Kecamatan Denpasar Utara dengan jumlah 12.497 siswa. Kemudian posisi kedua diisi oleh Kecamatan Denpasar Selatan dengan total jumlah siswa 10.213 siswa. Diikuti dengan Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur dengan jumlah siswa 7.745 siswa dan 6.064 siswa.

Tabel : 4.5. Jumlah Siswa SMP Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Tahun 2023		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	4.094	3.651	7.745
2	Kec. Denpasar Selatan	5.376	4.837	10.213
3	Kec. Denpasar Timur	3.074	2.990	6.064
4	Kec. Denpasar Utara	6.338	6.159	12.497
Jumlah		18.882	17.637	36.519

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5. juga dapat dilihat bahwa siswa SMP dengan jenis kelamin laki-laki tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Utara dengan jumlah 6.338 siswa dan terendah berada di Kecamatan Denpasar Timur dengan jumlah 3.074 siswa. Sedangkan untuk siswa SMP dengan jenis kelamin perempuan tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Utara sejumlah 6.159 siswa dan terendah berada di Denpasar Timur dengan jumlah 2.990 siswa.

4.3.4. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jenjang sekolah ini dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12 dengan siswa berusia 15-18 tahun. SMA tidak termasuk dalam

program wajib belajar sembilan tahun yakni Sekolah Dasar (atau sederajat) 6 tahun dan Sekolah menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun yang dicanangkan pemerintah. Meskipun demikian, SMA telah diikutsertakan program wajib belajar 12 tahun yang ditempuh dalam waktu 3 tahun sebagai program belajar yang diwajibkan.

Berdasarkan Tabel 4.6. jumlah siswa SMA/MA/SMK menurut jenis kelamin dan status sekolah Tahun 2023/2024 di Kota Denpasar dapat dilihat bahwa jumlah siswa SMA/MA/SMK di Kota Denpasar sebesar 20.455 orang yang tersebar di empat kecamatan. Jika dilihat dari status sekolah, jumlah siswa dari sekolah negeri lebih besar dan Denpasar Utara menduduki posisi tertinggi jika dilihat dari jumlah siswa keseluruhan.

Tabel: 4.6. Jumlah Siswa SMA/MA/SMK Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2023/2024

Kecamatan	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	Negeri	Swasta	Subjml	Negeri	Swasta	Subjml	Negeri	Swasta	Subjml
Denpasar Selatan	2.571	719	3.290	2.608	878	3.486	5.179	1.597	6.776
Denpasar Timur	992	165	1.157	1.049	130	1.179	2.041	295	2.336
Denpasar Barat	1.060	1.035	2.095	1.208	1.141	2.349	2.268	2.176	4.444
Denpasar Utara	2.211	1.049	3.260	2.591	1.048	3.639	4.802	2.097	6.899
Kota Denpasar	6.834	2.968	9.802	7.456	3.197	10.653	14.290	6.165	20.455

Sumber: <https://data.kemdikbud.go.id/dataset/detail/5/L2-226000/2023/SMA-3>

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, siswa dengan jenis kelamin perempuan menduduki posisi tertinggi yaitu sebesar 10.653 orang. Kecamatan Denpasar Utara menduduki posisi dengan jumlah siswa perempuan yang paling tinggi, sedangkan Kecamatan Denpasar Selatan menduduki posisi tertinggi dengan jumlah siswa laki-laki paling banyak. Terjadi perbedaan yang signifikan antara jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan di tingkat SMA/MA/SMK.

Jika dilihat dari keseluruhan jumlah siswa baik tingkat SD sampai SMA maka jumlah siswa terbanyak terdapat pada tingkat SD yaitu sebanyak 42.088 orang laki-laki dan 39.229 orang perempuan.

Tabel: 4.7. Jumlah Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar Tahun 2023

Tingkatan Sekolah	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	42.088	39.229	81.317
SMP	18.882	17.637	36.519
SMA	9.802	10.653	20.455
Jumlah	70.772	67.519	138.291

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Bali, 2024

<https://data.kemdikbud.go.id/dataset/detail/5/L2-226000/2023/SMA-3>

Dilihat dari jenis kelamin, siswa laki-laki memiliki posisi tertinggi dibandingkan siswa perempuan. Kondisi ini menunjukkan masih terjadi perbedaan signifikan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan.

4.3.5. Siswa Putus Sekolah

Putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya (Gunawan, 2010). Misalnya seorang warga masyarakat atau anak yang hanya mengikuti pendidikan di SD hingga kelas lima, disebut putus sekolah SD. Dengan kata lain, putus sekolah ialah berhentinya anak atau anak yang keluar dari suatu lembaga pendidikan sebelum mereka menamatkan pendidikan sesuai dengan jenjang waktu sistem persekolahan yang diikuti, baik SD, SMP maupun SMA. Berbagai faktor dapat mempengaruhi anak putus sekolah baik internal maupun eksternal. Oka (2000) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi putus sekolah anak diantaranya status ekonomi, jenis pendidikan siswa, kenakalan siswa, penyakit, minat, tradisi atau adat istiadat, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, usia orang tua, dan jumlah tanggungan keluarga. Meskipun perbandingan antara siswa putus sekolah dengan bersekolah sangat jauh, tetapi hal tersebut tidak dapat diabaikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Denpasar, pada tahun 2023 terdapat empat orang

SD/ sederajat yang mengalami putus sekolah. Di mana kasus siswa putus sekolah terjadi di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Timur dengan masing-masing berjumlah dua orang.

Tabel: 4.8. Jumlah Siswa SD/MI yang Putus Sekolah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Tahun 2023
1	Kec. Denpasar Barat	2
2	Kec. Denpasar Selatan	0
3	Kec. Denpasar Timur	2
4	Kec. Denpasar Utara	0
	Jumlah	4

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

Berbeda dengan jumlah siswa SD/ sederajat yang putus sekolah berjumlah empat orang, kasus siswa putus sekolah pada jenjang SMP/ sederajat di Kota Denpasar pada tahun 2023 berjumlah dua orang. Berdasarkan Tabel 4.9. Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah berdasarkan Kecamatan Tahun 2023, dari dua kasus putus sekolah tersebut terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Utara dengan masing-masing satu kasus.

Tabel : 4.9. Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Tahun 2023
1	Kec. Denpasar Barat	0
2	Kec. Denpasar Selatan	1
3	Kec. Denpasar Timur	0
4	Kec. Denpasar Utara	1
	Jumlah	2

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

Pada Tabel 4.10. Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun Yang Putus Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2023 memperlihatkan bahwa dalam rentang usia anak sekolah terdapat total enam anak putus sekolah dari jenjang SD dan SMP. Empat kasus diantaranya terjadi pada jenjang Sekolah Dasar dan dua kasus lainnya terjadi pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, putus sekolah tertinggi dialami oleh anak laki-laki baik pada jenjang SD maupun SMP. Dari empat kasus putus sekolah SD, tiga kasus dialami anak laki-laki dan satu kasus dialami anak perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP, dua kasus putus sekolah dialami oleh anak laki-laki. Untuk kasus putus sekolah SD terjadi di kecamatan Denpasar Timur sejumlah dua kasus dan Denpasar Barat sejumlah dua kasus. Sedangkan untuk putus sekolah SMP terjadi di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Selatan dengan masing-masing satu kasus.

Tabel : 4.10. Jumlah Anak Umur 7-18 Tahun Yang Putus Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Kecamatan	SD		SMP	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Kec. Denpasar Utara	-	-	1	-
2	Kec. Denpasar Timur	1	1	-	-
3	Kec. Denpasar Selatan	-	-	1	-
4	Kec. Denpasar Barat	2	-	-	-
	Jumlah	3	1	2	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

4.4. Sekolah

Sekolah dapat dipahami sebagai lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. Di sisi lain, sekolah dapat dipahami sebagai bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran. Setiap sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan kepala sekolah dibantu oleh wakilnya. Bangunan sekolah disusun dan ditata dengan memanfaatkan lahan yang tersedia lengkap dengan berbagai sarana prasarana sesuai jenjang sekolah yang dibutuhkan. Ketersediaan sarana terutama gedung sekolah memiliki peran vital dalam terlaksananya proses pendidikan.

Berdasarkan Tabel 4.11. Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2023 dapat dilihat bahwa dari jenjang pendidikan TK, PAUD, TPA, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat terdapat 839 sekolah. Di mana jumlah sekolah terbesar berada pada jenjang TK yakni menyentuh angka 306 sekolah. Kemudian disusul dengan Sekolah Dasar dengan total jumlah 252 sekolah, dan PAUD dengan total jumlah 126 sekolah. Adapun SMP/ sederajat memiliki total gedung sekolah berjumlah 88 sekolah, SMA/ sederajat sebanyak 41 sekolah, dan TPA memiliki sekolah paling sedikit yakni 26 sekolah.

Tabel : 4.11. Jumlah Sekolah di Kota Denpasar Tahun 2023

Pendidikan	2023
TK	306 sekolah
PAUD	126 sekolah
TPA	26 sekolah
SD/ Sederajat	252 sekolah
SLTP/ Sederajat	88 sekolah
SLTA/ Sederajat	41 sekolah
Jumlah	839 sekolah

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

4.5. Guru

4.5.1. Guru Menurut Jenjang Pendidikan

Guru dapat dipahami sebagai seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, hingga melakukan evaluasi kepada peserta didik. Mengajar berarti seorang guru bertanggungjawab untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada murid. Dalam konteks mendidik menjadi berbeda dengan mengajar yang mana lebih menekankan pada upaya mengubah tingkah laku murid menjadi lebih baik. Proses mendidik merupakan proses lebih sulit dibandingkan mengajar sehingga guru sangat wajib menjadi teladan baik bagi murid demi tercipta karakter peserta didik sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.

Dalam konteks melatih, guru memiliki harus memiliki keterampilan dan kecakapan dasar. Kemudian fungsi mengarahkan berarti guru bertugas untuk membimbing agar anak didik tetap berada di jalur tepat sesuai dengan tujuan pendidikan. Wewenang guru dalam memberi penilaian berkaitan dengan memberikan nilai output atas proses belajar mengajar yang telah diberikan kepada peserta didik. Termasuk pada tahap akhir evaluasi guru bertugas untuk memberikan ukuran tingkat keberhasilan pada serangkaian kegiatan proses belajar mengajar.

Komposisi antara jumlah guru dan peserta didik menjadi penting untuk memastikan proses belajar mengajar menjadi berkualitas. Ketimpangan dalam jumlah guru dan peserta didik dapat memicu berbagai persoalan signifikan seperti tidak maksimalnya fungsi guru dalam proses belajar mengajar. Guna mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kota Denpasar memperhatikan komposisi guru dengan baik baik berdasarkan jenis kelamin maupun jenjang pendidikan terakhir para guru. Seperti data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada tabel 4.12. Jumlah Guru SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 dapat dilihat bahwa terdapat empat klasifikasi jenjang pendidikan Guru SD yakni SMA, Diploma 1,2,3, Sarjana 1, dan Sarjana 2.

Berdasarkan Tabel 4.12. jumlah Guru SD di Kota Denpasar pada tahun 2023 menyentuh angka 4.229 guru. Jumlah tersebut tersebar di empat

kecamatan dengan komposisi terbanyak berada pada jenjang S1 yakni 3.968 guru. Jumlah guru terbanyak kedua setelah jenjang pendidikan S1 adalah S2 yakni 163 guru. Sedangkan secara berturut-turut jenjang pendidikan D1/2/3 dan SMA memiliki 53 guru dan 35 guru. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas guru berdasarkan jenjang pendidikan terakhir sudah sangat baik.

Tabel : 4.12. Jumlah Guru SD Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Kecamatan	Jenjang Pendidikan							
	SMA		Dip 1/2/3		S1		S2	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Denpasar Utara	4	6	3	10	213	746	8	24
Denpasar Timur	0	0	5	7	200	600	9	27
Denpasar Selatan	8	13	5	15	297	862	21	33
Denpasar Barat	2	2	3	15	255	795	11	30
Jumlah	14	21	16	47	965	3.003	49	114

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka baik dari jenjang pendidikan SMA, D1/2/3, S1, dan S2 mayoritas adalah perempuan. Dari total 4.229 guru, 3.185 guru diantaranya adalah perempuan. Dengan komposisi terbesar berada pada jenjang pendidikan S1 yakni 3.003 guru, diikuti dengan jenjang pendidikan S2 yakni 114 guru, kemudian jenjang pendidikan D1/2/3 yakni 47 guru, dan terakhir jenjang pendidikan SMA 21 guru. Adapun untuk guru dengan jenis kelamin laki-laki terbanyak berada pada jenjang pendidikan S1 dengan jumlah 965 guru, diikuti jenjang pendidikan S2 yakni 49 guru, kemudian jenjang pendidikan D1/2/3 yakni 16 guru, dan terakhir SMA yakni 14 guru.

4.5.2. Guru yang Tersertifikasi

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditekankan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Maksud profesional pada tataran ini meliputi pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Di lain sisi, menyambung UU No. 14 Tahun 2005, terdapat Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru BAB II Pasal 2 dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, sertifikasi guru merupakan salah satu instrumen rekognisi bahwa seorang guru telah lolos standar kualifikasi sebagai seorang tenaga pendidik. Dapat dilihat pada Tabel 4.15. Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 terdapat 1.669 guru, dimana 1.286 diantaranya adalah guru dengan jenis kelamin perempuan dan 383 guru lainnya dengan jenis kelamin laki-laki.

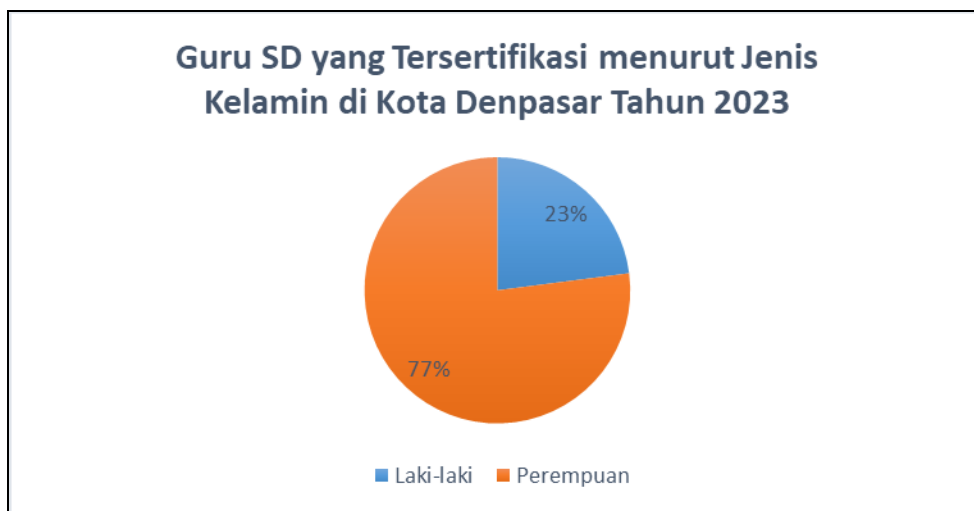
Tabel : 4.13. Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2023	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa dan Sastra Bali	7	34
Bahasa Inggris	2	19
Bahasa Jepang	1	0
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	0	0
Ekonomi	0	0
Guru Kelas SD/MI	243	1.024
Kependidikan Dasar	3	11
Kewirausahaan	0	0
Lainnya	0	4
Matematika	7	12
Muatan Lokal Bahasa Daerah	5	23
Pendidikan Agama Budha	2	3
Pendidikan Agama Hindu	16	102
Pendidikan Agama Islam	19	25
Pendidikan Agama Katholik	0	2
Pendidikan Agama Kong hu chu	0	3
Pendidikan Agama Kristen	0	3
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	0	0
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	78	20
Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)	0	0
Seni Budaya	0	1
Jumlah	383	1.286

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

Dari 21 bidang studi sertifikasi, Guru Kelas SD/MI memiliki jumlah guru tersertifikasi tertinggi yakni 1.267 guru. Posisi kedua ditempati oleh guru

dengan sertifikasi Pendidikan Agama Hindu dengan total 118 guru. Adapun posisi ketiga adalah guru dengan sertifikasi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Di lain sisi, penting untuk diperhatikan terdapat beberapa bidang studi sertifikasi yang sama sekali tidak terdapat guru dengan sertifikasi. Bidang studi tersebut diantaranya Bimbingan dan Konseling, Ekonomi, Kewirausahaan, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Jika ditelisik dalam konteks gender berdasarkan jenis kelamin, komposisi antara guru tersertifikasi di dominasi oleh guru perempuan. Secara jumlah tentu hal ini menjadi timpang, di mana 77% dari jumlah guru tersertifikasi ialah perempuan.



Gambar 4.1 Persentase Guru SD yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Selain data mengenai Guru SD yang tersertifikasi, Dinas Pendidikan Kota Denpasar turut memiliki data Guru SMP yang tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023. Berdasarkan Tabel 4.16. Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 terdapat 723 guru yang tersertifikasi. Dari 723 guru tersertifikasi, 257 diantaranya adalah guru dengan jenis kelamin laki-laki, dan 466 lainnya berjenis kelamin perempuan. Apabila dilihat dari bidang studi sertifikasi, bidang studi matematika memiliki guru tersertifikasi tertinggi yakni menyentuh angka 91 guru. Posisi kedua diisi oleh bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam dengan total 88 guru. Posisi ketiga tertinggi adalah bidang studi Bahasa Indonesia dengan jumlah 83 guru.

Di lain sisi, terdapat satu bidang studi yang sama sekali tidak memiliki guru tersertifikasi yaitu bidang studi KPPI. Selain itu, terdapat lima bidang studi dengan jumlah guru tersertifikasi hanya satu guru. Lima bidang studi dengan satu guru tersertifikasi ialah Bahasa Perancis, Pendidikan Agama Budha, Pendidikan Agama Kristen Protestan, Sejarah, dan Lainnya. Hal ini perlu diperhatikan kembali sebab jumlah guru yang sangat minim.

Tabel : 4.14. Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2023	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa Bali	3	7
Bahasa Indonesia	22	61
Bahasa Inggris	19	62
Bahasa Prancis	0	1
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	6	26
Fisika	4	1
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	30	58
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	24	48
Keterampilan	0	5
KKPI	0	0
Matematika	42	49
Muatan Lokal Bahasa Daerah	14	17
Pendidikan Agama Budha	0	1
Pendidikan Agama Hindu	11	21
Pendidikan Agama Islam	8	3
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	19	37
Pendidikan Agama Katholik	3	9
Pendidikan Agama Kong hu chu	4	11
Pendidikan Agama Kristen Protestan	1	0
Pendidikan Biologi	1	4

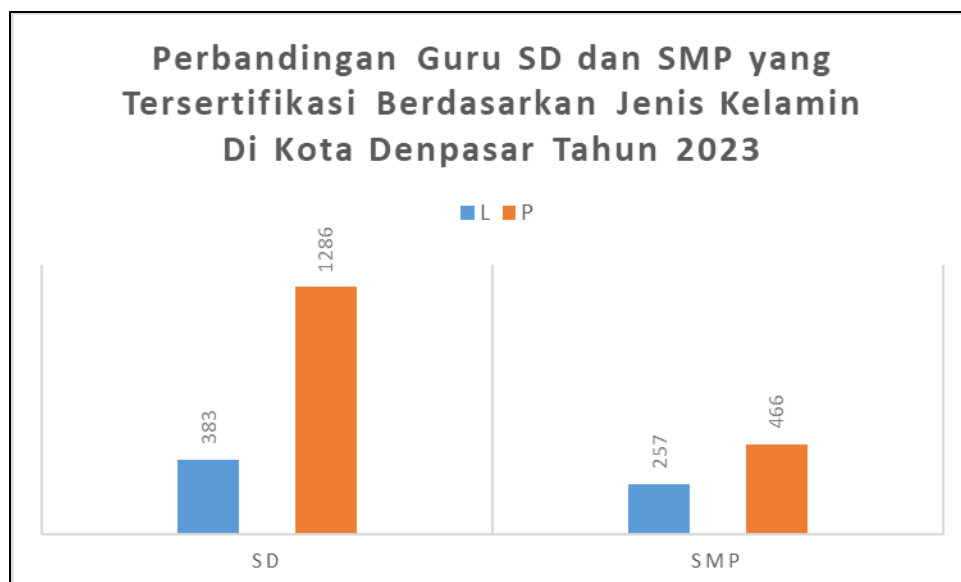
Pendidikan Ekonomi	1	2
Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	33	6
Sejarah	0	1
Seni Budaya	11	33
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	2
Lainnya	0	1
Jumlah	257	466

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024



Gambar 4.2 Persentase Guru SMP yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Jika diperhatikan berdasarkan gender khususnya jenis kelamin, dapat dilihat bahwa mayoritas guru tersertifikasi berjenis kelamin perempuan. Bahkan dari 26 bidang studi tersertifikasi, masing-masing bidang studi memiliki guru dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan guru dengan jenis kelamin laki-laki. Dalam konteks persentase, dari total 723 orang, 64% diantaranya ialah guru perempuan. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai ketimpangan gender dalam arena guru yang tersertifikasi secara kuantitas.



Gambar 4.3 Perbandingan Guru SD dan SMP yang Tersertifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah guru tersertifikasi lebih banyak berada pada guru SD. Di mana, 60% dari total guru SD dan SMP yang tersertifikasi berasal dari guru SD. Jika dilihat dalam konteks gender berdasarkan jenis kelamin, guru dengan jenis kelamin perempuan juga tetap mendominasi jumlah guru tersertifikasi baik dalam kategori SD maupun SMP.

Jika dilihat dari jumlah guru SMA yang tersertifikasi berdasarkan jenis kelamin, terdapat sebanyak 313 orang guru perempuan dan 215 orang guru laki-laki. Posisi guru perempuan masih lebih banyak dibandingkan guru laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara guru laki-laki yang tersertifikasi dengan guru perempuan yang tersertifikasi.

Tabel : 4.15. Jumlah Guru SMA yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2023	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa Bali	5	5
Bahasa Indonesia	8	25
Bahasa Inggris	21	34
Bahasa Prancis	1	0
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	7	14
Fisika	23	19
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	0	4
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	2	0
Keterampilan	0	0
KKPI	0	0
Matematika	25	38
Muatan Lokal Bahasa Daerah	1	8
Pendidikan Agama Budha	1	1
Pendidikan Agama Hindu	9	9
Pendidikan Agama Islam	2	3
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	4	5
Pendidikan Agama Katholik	0	0
Pendidikan Agama Kong hu chu	0	1
Pendidikan Agama Kristen Protestan	0	0
Pendidikan Biologi	11	30
Pendidikan Ekonomi	7	26
Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	18	2
Sejarah	4	12
Seni Budaya	12	9
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	6	9
Lainnya	48	59
Jumlah	215	313

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Denpasar, 2024

4.5.3. Kepala Sekolah

Secara sederhana kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru dengan tugas memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antar guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Adapun tugas utama sebagai kepala sekolah ialah mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi atau lembaga, dan menjadi juru bicara kelompok. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama memberdayakan masyarakat sekolah, kepala sekolah dituntut untuk berperan ganda. Pertama, *catalyst* yakni berperan meyakinkan orang lain tentang perlunya perubahan menuju kondisi lebih baik. Kedua, *solution givers* yakni berperan memberikan solusi dan pertimbangan ketika terdapat persoalan. Ketiga, *process helper* yakni berperan membantu kelancaran proses perubahan. Keempat, *resource linkers* yakni berperan menghubungkan antar sumber daya yang terlibat.

Sebagai pucuk pimpinan sebuah sekolah, kepala sekolah harus mampu membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan bawahannya menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan. Sehingga posisi kepala sekolah sangat vital untuk maju mundurnya sebuah sekolah. Data Dinas Pendidikan Kota Denpasar pada Tahun 2023 menunjukkan dua data penting yakni 4.16 Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin dan 4.17. Jumlah Kepala Sekolah SMP menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Tabel : 4.16. Jumlah Kepala Sekolah SD Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Tahun 2023	
	Laki-laki	Perempuan
<S1	0	0
S1	64	125
>S1	19	44
Jumlah	83	169

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

Berdasarkan Tabel 4.16 Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 252 kepala sekolah. Di mana, 83 diantaranya adalah laki-laki dan 169 lainnya adalah perempuan. Apabila dilihat dari jenjang pendidikan, seluruh kepala sekolah tidak ada berasal dari jenjang pendidikan kurang dari Sarjana 1. Adapun kepala sekolah dengan jenjang pendidikan Sarjana 1 berjumlah 189 kepala sekolah dengan 125 diantaranya adalah perempuan dan 64 lainnya adalah laki-laki. Sedangkan untuk kepala sekolah dengan jenjang pendidikan lebih tinggi dari Sarjana 1 berjumlah 63 kepala sekolah, di mana 19 adalah laki-laki dan 44 lainnya adalah perempuan.

Data kedua terkait jumlah kepala sekolah dapat dilihat pada Tabel 4.17. Jumlah Kepala Sekolah SMP menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023. Melalui tabel di bawah, dapat dilihat bahwa terdapat 88 kepala sekolah Smp di Kota Denpasar. Di mana, dari 88 jumlah tersebut, 46 diantaranya adalah laki-laki dan 42 lainnya adalah perempuan. Komposisi jumlah ini menunjukkan dalam konteks gender berdasarkan jenis kelamin, antara kepala sekolah laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan secara signifikan.

Tabel : 4.17. Jumlah Kepala Sekolah SMP Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Tahun 2023	
	Laki-laki	Perempuan
<S1	0	0
S1	24	24
>S1	22	18
Jumlah	46	42

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024

Apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, sejalan dengan kepala sekolah SD, tidak ada satupun kepala sekolah SMP di Kota Denpasar dengan jenjang pendidikan kurang dari S1. Jumlah terbesar berada pada jenjang S1 yakni 48 kepala sekolah dengan komposisi sama rata yakni 24 untuk masing-masing

laki-laki dan perempuan. Untuk jenjang pendidikan lebih dari S1 terdapat 40 kepala sekolah dengan komposisi 22 diantaranya kepala sekolah laki-laki dan 18 lainnya kepala sekolah perempuan.

BAB V KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor vital yang sangat berharga dalam hidup. Melalui tubuh sehat maka akan sanggup meringankan setiap manusia untuk melakukan berbagai kegiatan produktif. Dengan memiliki raga yang bugar, berarti memiliki jiwa yang damai dan perasaan yang seimbang. Pada konteks masyarakat, kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia bahkan meletakkan kesehatan sebagai salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Kondisi umum kesehatan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan terdiri dari beberapa komponen antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Urgensi kesehatan bagi setiap masyarakat dapat dilihat pertama kali sejak dalam kandungan dan lahir ke dunia. Maka dari itu, pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan beberapa data kesehatan dimulai dari kasus kelahiran bayi.

Lahir hidup (*live birth*) adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda tersebut seperti bernafas, terdapat denyut jantung atau denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot. Secara sederhana dapat dipahami bahwa lahir hidup adalah anak yang dilahirkan hidup (menunjukkan tanda-tanda kehidupan) pada saat dilahirkan, tanpa memperhatikan lamanya di kandungan, walaupun akhirnya meninggal dunia. Pendataan mengenai hal ini menjadi sangat penting untuk melihat kondisi kesehatan masyarakat dan lebih jauh untuk menganalisis berbagai persoalan kesehatan. Menyadari pentingnya pendataan akan berbagai persoalan kesehatan, pemerintah Kota Denpasar secara konsisten mendata berbagai

persoalan kesehatan yang akan dibahas pada bab ini secara lebih komprehensif.

5.1 Angka Kelahiran Bayi

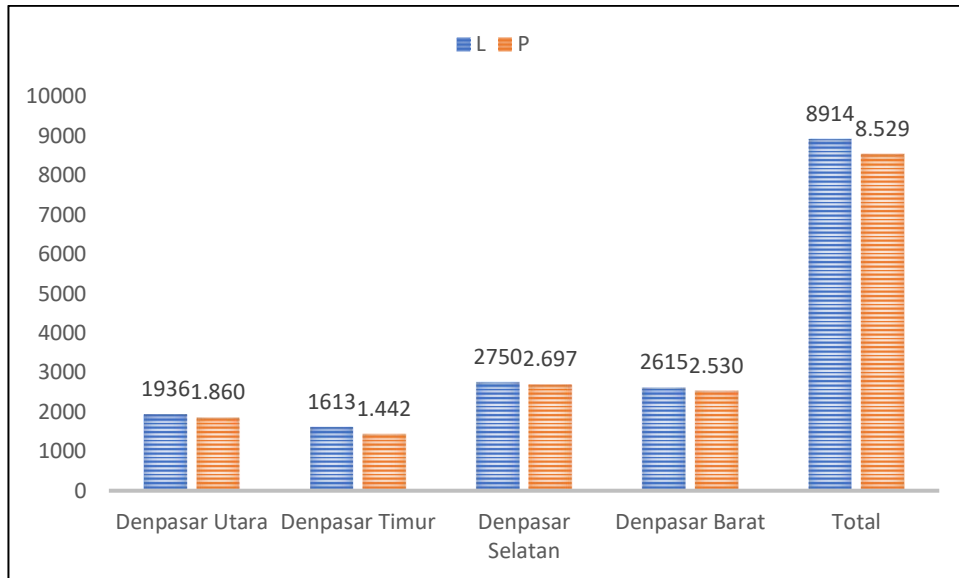
Angka kelahiran bayi di suatu daerah merupakan indikator untuk mengetahui jumlah bayi yang lahir setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa perhitungan jumlah kelahiran di sebuah wilayah ditentukan dari jumlah kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Dalam istilah lain juga dikenal sebagai Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR). Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan memiliki data mengenai jumlah angka kelahiran bayi menurut jenis kelamin dan kecamatan seperti pada tabel 5.1.

Tabel : 5.1. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023

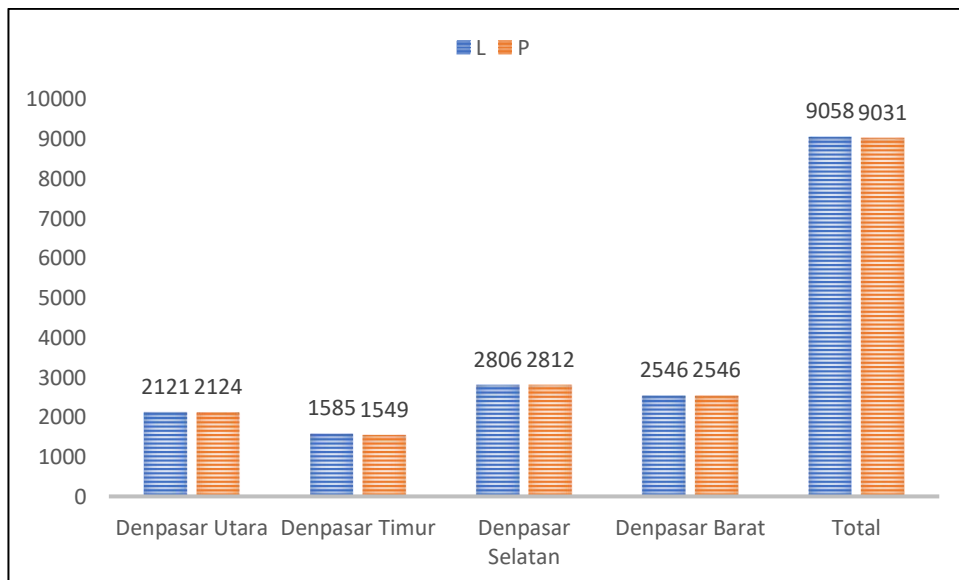
No	Kecamatan	2022		2023	
		L	P	L	P
1	Denpasar Utara	1.936	1.860	2.121	2.124
2	Denpasar Timur	1.613	1.442	1.585	1.549
3	Denpasar Selatan	2.750	2.697	2.806	2.812
4	Denpasar Barat	2.615	2.530	2.546	2.546
Jumlah		8.914	8.529	9.058	9.031

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar , 2024

Tabel 5.1. tentang Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan terjadinya peningkatan terutama pada bayi berjenis kelamin perempuan. Gambar 5.1. dan 5.2. di bawah menunjukkan jumlah angka kelahiran bayi di Kota Denpasar pada tahun 2022 dan 2023 dalam bentuk grafik.



Gambar 5.1. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Gambar 5.2. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Dari tabel dan grafik, data kuantitatif menunjukkan bahwa secara akumulatif kelahiran bayi laki-laki dan perempuan pada tahun 2022 berjumlah 17.443 jiwa mengalami peningkatan di tahun berikutnya menjadi 18.089 jiwa atau meningkat sebesar 3,6%. Peningkatan kelahiran pada tahun 2023 terbanyak terjadi pada

bayi perempuan yang meningkat sebesar 5,5% dan kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki juga meningkat hanya sebesar 1,6%.

Melalui Tabel 5.1. juga dapat dilihat kelahiran tertinggi pada tahun 2023 berturut-turut terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Barat, Denpasar Utara dan Denpasar Timur memiliki jumlah kelahiran yang paling rendah. Jumlah kelahiran bayi di Kecamatan Denpasar Selatan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 7.379 bayi meningkat sebesar 10,81% dari tahun sebelumnya. Sedangkan di Kecamatan Denpasar Timur yang memiliki jumlah kelahiran bayi terendah pada tahun 2023 yaitu sebanyak 3.134 bayi (meningkat sebesar 2,5%) dibandingkan dengan tahun 2022.

5.2. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023

Masa bayi balita merupakan fase setelah dilahirkan sampai sebelum berumur 59 bulan. Kesehatan bayi dan balita sangat penting diperhatikan sebab pada masa balita pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental terjadi sangat signifikan. Upaya kesehatan bayi dan balita meliputi tata laksana dan rujukan, gizi, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, rehabilitasi dan perawatan jangka panjang pada penyakit kronis/langka, pola asuh dan stimulasi perkembangan, serta penyediaan lingkungan yang sehat dan aman.

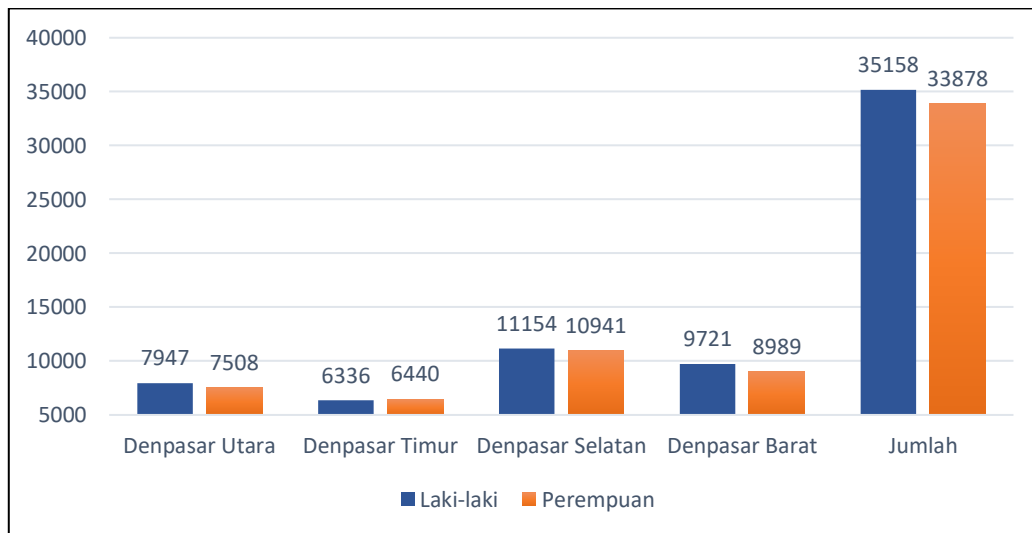
Pada tahap tumbuh kembang setiap anak tentu menjadi berbeda disebabkan berbagai latar belakang. Beberapa latar belakang yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang balita meliputi faktor nutrisi, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi keluarga. Maka dari itu, kompleksitas faktor pengaruh tumbuh kembang balita perlu untuk diperhatikan mengingat secara balita merupakan tahap awal seseorang untuk mengenal lingkungan sosial, termasuk konsep pemahaman diri. Di lain sisi, tahap balita juga merupakan tahap di mana anak berupaya melakukan kegiatan meniru meski belum sempurna. Pemerintah Kota Denpasar menyadari pentingnya kehadiran data untuk memantau dan mengantisipasi berbagai persoalan anak khususnya balita bahkan secara spesifik telah dikategorisasi berdasarkan jenis kelamin. Tabel 5.2.

menunjukkan jumlah angka balita di Kota Denpasar pada tahun 2022 dan 2023. Secara spesifik data turut dihadirkan dalam bentuk grafik.

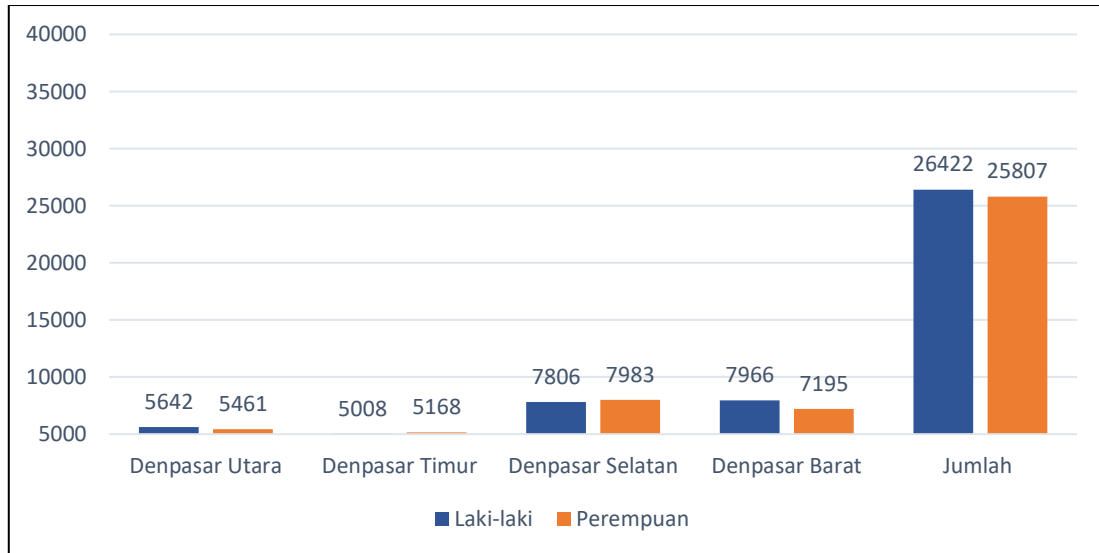
Tabel : 5.2. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023

No	Kecamatan	2022		2023	
		L	P	L	P
1.	Denpasar Utara	7.947	7.508	5.642	5.461
2.	Denpasar Timur	6.336	6.440	5.008	5.168
3.	Denpasar Selatan	11.154	10.941	7.806	7.983
4.	Denpasar Barat	9.721	8.989	7.966	7.195
Jumlah		35.158	33.878	26.422	25.807

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024



Gambar 5.3. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Gambar 5.4. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Dari data tabel dan grafik di atas, dapat dilihat jumlah balita (laki-laki dan perempuan) pada tahun 2022 berjumlah 69.036 balita dan pada tahun 2023 berjumlah 52.229 balita. Dengan kata lain, terjadi penurunan jumlah balita di Kota Denpasar pada tahun 2023 sebesar 32,2%. Sejalan dengan angka kelahiran bayi, jumlah balita dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2022 jumlah balita laki-laki 35.158 balita dan perempuan 33.878 balita. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah balita laki-laki 26.422 balita dan perempuan 25.807 balita.

Penurunan atau berkurangnya jumlah balita didominasi oleh Kecamatan Denpasar Selatan dengan total penurunan jumlah balita sebanyak 6.952 balita. Adapun kecamatan balita terendah berada di Kecamatan Denpasar Timur baik pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 jumlah balita sejumlah 12.776 balita dan pada tahun 2023 menyentuh angka 10.176 balita.

5.3. ASI Eksklusif di Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), angka ibu yang pernah menyusui anak di Indonesia terbilang tinggi yakni 90%. Namun,

yang memberikan ASI eksklusif selama enam bulan masih tergolong rendah yakni 20%. Pemberian ASI eksklusif direkomendasikan sampai dua tahun atau lebih. Secara medis, alasan ASI tetap diberikan setelah bayi berusia enam bulan dikarenakan 65% kebutuhan energi seorang bayi pada umum 6-8 bulan masih terpenuhi dari ASI. Pada umur 9-12 bulan sekitar 50% kebutuhannya dari ASI dan 1-2 tahun sekitar 20% dari ASI.

Secara spesifik pemberian ASI eksklusif menurut Roesli (2008) dapat bermanfaat untuk ibu dan anak. Bagi anak ASI dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kecerdasan, dan kedekatan emosional dengan ibu. Bagi ibu ASI dapat mengurangi perdarahan setelah melahirkan, mengurangi potensi anevia, menunda kehamilan, mengecilkan rahim, lebih ekonomis, dan memberi kepuasan psikologis bagi seorang ibu. Vitalnya peran ASI eksklusif bagi ibu dan anak mengakibatkan dorongan seluruh stakeholder untuk menyukseskan program ini semakin marak. Meski demikian, penting untuk dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif tersebut baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal faktor ini meliputi pendidikan sebab berkaitan dengan sumber informasi mengenai ASI eksklusif, sikap atau perilaku berkaitan dengan kesadaran ibu untuk memberikan ASI eksklusif, psikologis berkaitan dengan perasaan yang menyelimuti keseharian ibu seperti nyaman dan bahagia atau cenderung stress dan sedih. Adapun faktor eksternal meliputi faktor yang dipengaruhi dari luar seperti dukungan keluarga khususnya suami, perubahan sosial budaya seperti kesibukan pekerjaan sehingga kurang memperhatikan kebutuhan ASI, kurangnya sosialisasi dari petugas kesehatan, usia yang terlalu tua. Secara khusus, data mengenai pemberian ASI eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan Gambar 5.5.

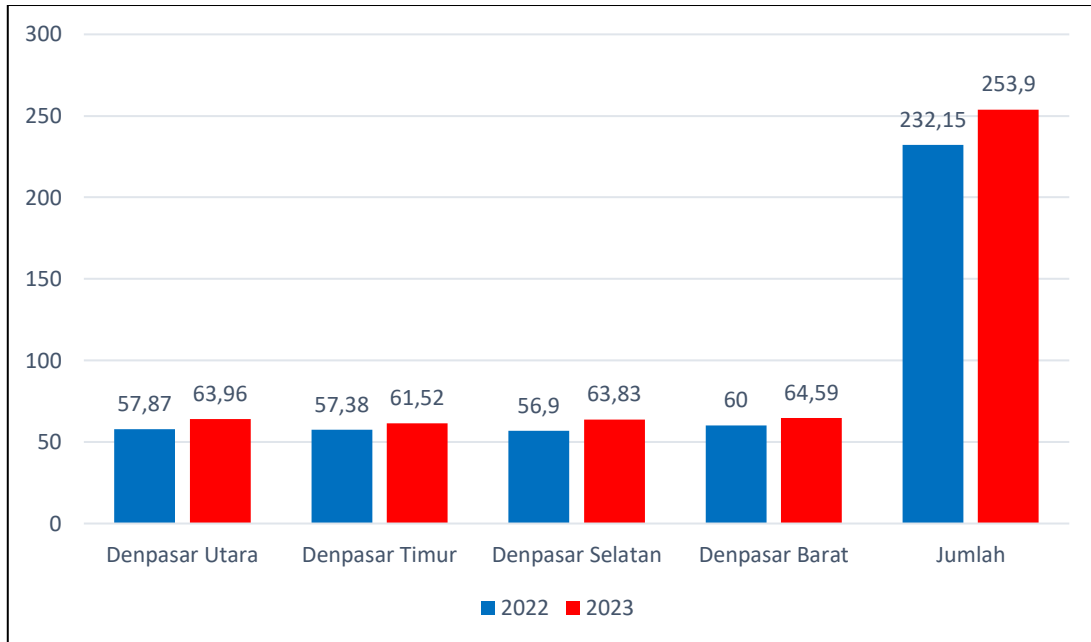
**Tabel : 5.3. ASI Eksklusif di Kota Denpasar Menurut Kecamatan
Tahun 2022 dan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Denpasar Utara	5.787	6.396
2.	Denpasar Timur	5.738	6.152
3.	Denpasar Selatan	569	6.383
4.	Denpasar Barat	60	6.459
Jumlah		12.154	25.390

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024

Data di atas memperlihatkan secara kuantitatif ASI eksklusif dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Secara keseluruhan kasus ASI Eksklusif di Kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 12.154 kasus menjadi 25.390 kasus di tahun 2023 atau meningkat sebesar 52,1%.

Jika dikontekstualisasi dengan jumlah balita pada tahun 2023 maka 25.390 balita dari total 52.229 balita telah mendapatkan ASI eksklusif. Berarti hampir setengah lebih balita yang belum mendapatkan ASI Eksklusif di tahun 2023. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut tentang kendala pemberian ASI eksklusif kepada balita disebabkan oleh faktor apa saja. Beberapa langkah strategis paska melakukan penelitian menjadi penting guna meningkatkan persentase pemberian ASI eksklusif. Seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif, tidak saja kepada ibu-ibu melainkan keluarga pendamping khususnya suami. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi proses pemberian ASI eksklusif oleh ibu pada bayi.



Gambar 5.5. ASI Eksklusif di Kota Denpasar Menurut Kecamatan Tahun 2022 dan 2023

5.4. Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Status gizi dapat dipahami sebagai sebuah keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Gizi merupakan salah satu faktor penting penentu tingkat kesehatan dan keserasian antara perkembangan fisik dan mental. Dalam masa tumbuh kembang anak, kecukupan gizi merupakan hal mutlak yang harus selalu diperhatikan orang tua. Maka dari itu, gizi merupakan pondasi kesehatan masyarakat. Apabila terdapat gangguan gizi baik, gizi kurang, maupun gizi lebih pertumbuhan tidak akan berlangsung optimal. Ironisnya, kekurangan gizi berakibat pada daya tangkap berkurang, pertumbuhan fisik tidak optimal. Selain kekurangan gizi, kelebihan gizi juga berakibat buruk seperti risiko penyakit degeneratif di masa yang akan datang.

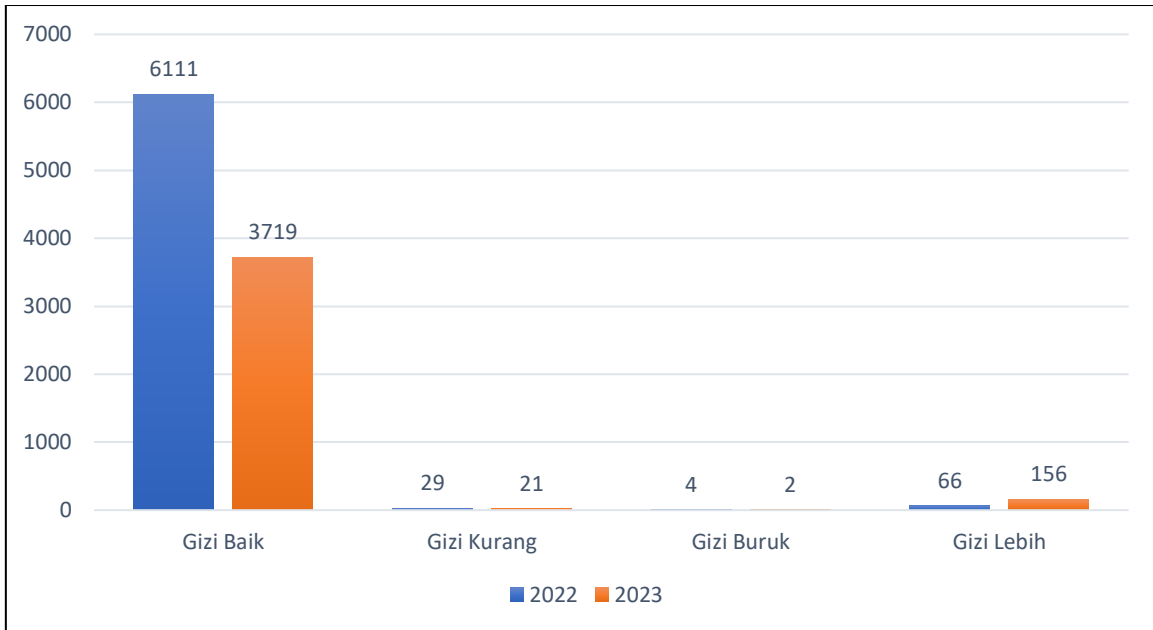
Pengukuran status gizi paling mudah dimengerti masyarakat umum ialah dengan menggunakan indeks BB/U (Berat Badan menurut Umum). Indeks BB/U ialah pengukuran total berat badan termasuk air, lemak, tulang dan otot. Status gizi dengan indikator BB/U menurut baku WHO NCHS kategori Z- Score Status

gizi lebih >2,0 SD. Status gizi baik -2,0 SD sampai 2,0 SD. Status gizi kurang <-2,0 SD. Status gizi buruk ≤ -3,0 SD (Persagi, 2003). Secara khusus gambaran tentang status gizi dari masyarakat Kota Denpasar pada tahun 2022-2023 terlihat pada Tabel 5.4.

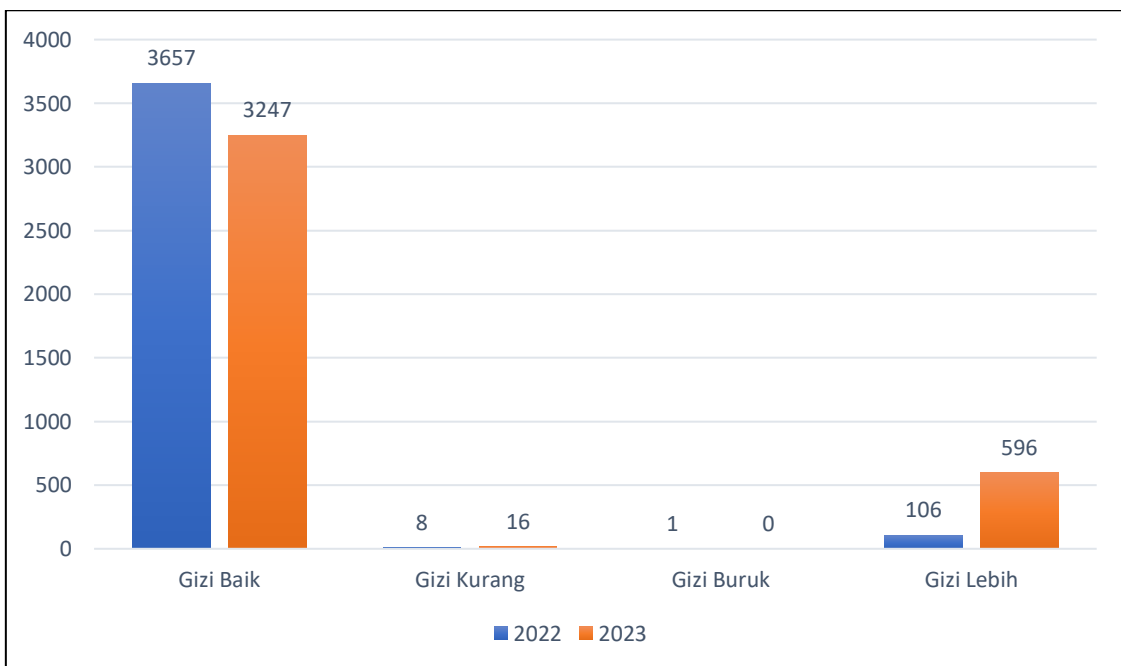
Tabel : 5.4. Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

No	Kecamatan	Status Gizi	2022	2023
1.	Denpasar Utara	Gizi Baik	6111	3719
		Gizi Kurang	29	21
		Gizi Buruk	4	2
		Gizi Lebih	66	156
2.	Denpasar Timur	Gizi Baik	3657	3247
		Gizi Kurang	8	16
		Gizi Buruk	1	0
		Gizi Lebih	106	596
3.	Denpasar Selatan	Gizi Baik	5590	4722
		Gizi Kurang	12	9
		Gizi Buruk	1	3
		Gizi Lebih	35	313
4.	Denpasar Barat	Gizi Baik	3388	2705
		Gizi Kurang	36	39
		Gizi Buruk	4	4
		Gizi Lebih	163	491

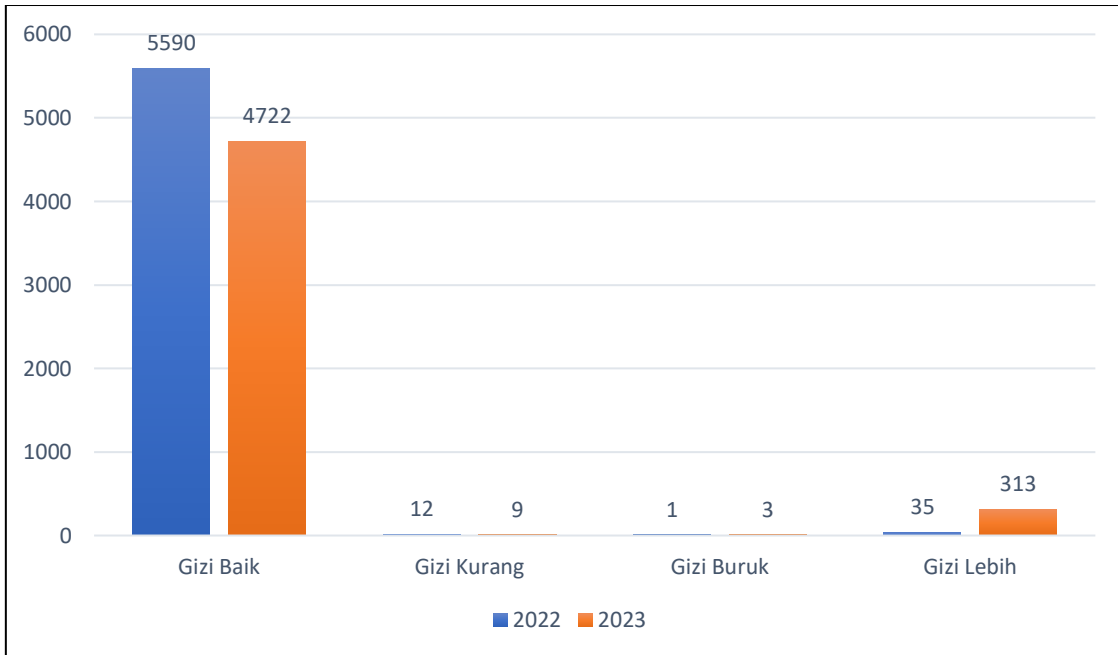
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024



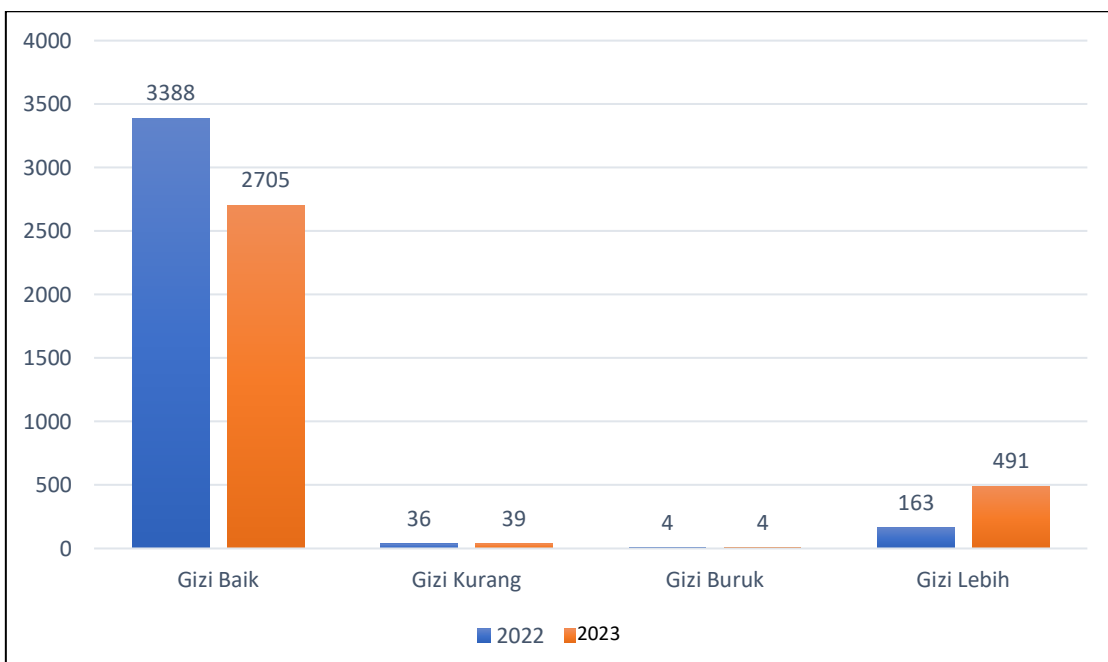
Gambar 5.6 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 dan 2023



Gambar 5.7 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2022 dan 2023



Gambar 5.8 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022 dan 2023



Gambar 5.9 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Barat tahun 2022 dan 2023

Berdasarkan data statistik pada tabel dan grafik tentang Status Gizi di Kota Denpasar tahun 2022 dan 2023, mengarahkan pemahaman bahwa jumlah status gizi baik mengalami penurunan di seluruh kecamatan. Penurunan tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Utara, di mana pada tahun 2022 terdapat 6.111 kasus gizi baik sedangkan tahun 2023 menurun sejumlah 2.392 kasus menjadi 3.719 kasus. Denpasar Selatan mengalami penurunan nomor dua dengan total 868 kasus. Kemudian Denpasar Barat mengalami penurunan status gizi baik sejumlah 683 kasus. Terakhir Denpasar Timur sejumlah 410 kasus. Menariknya peningkatan terhadap status gizi lebih terjadi di seluruh kecamatan dengan tingkat peningkatan cukup signifikan. Denpasar Timur mengalami peningkatan 490 kasus, Denpasar Barat 328 kasus, Denpasar Selatan 278 kasus, dan Denpasar Utara 90 kasus.

5.5 Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Indonesia mendukung penuh pemberian ASI eksklusif dengan mengatur Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu melalui Permen Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013. Bahkan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 disebutkan “Pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”.

Terkait hal tersebut maka dibuatlah Pojok ASI atau yang kerap disebut Ruang Laktasi adalah sebuah ruangan khusus yang sengaja disediakan oleh institusi (perkantoran, perusahaan, tempat bekerja) yang memiliki fungsi untuk memberikan privasi bagi seorang ibu menyusui yang juga bekerja untuk memberikan ASI pada bayinya atau untuk memerah ASI. Kota Denpasar selaku ibu kota Provinsi Bali juga berkomitmen untuk mendukung penyediaan ruang laktasi bagi para ibu menyusui. Di bawah ini disajikan data jumlah pojok ASI atau ruang laktasi pada tahun 2022 dan 2023. Semua UPTD Puskesmas di Kota Denpasar memiliki 1 ruang pojok ASI.

Tabel : 5.5 Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

NO	Instansi	Tahun	
		2022	2023
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
3	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
4	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	1	1
5	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	1	1
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	1	1
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	1	1
8	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
9	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
10	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
11	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
12	Dikes Kota Denpasar	1	1
Jumlah		12	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024

5.6. Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk melindungi tubuh atau membuat tubuh kebal terhadap penyakit tertentu. Vaksin terbuat dari kuman yang sudah melalui proses pelemahan atau bahkan dimatikan. Imunisasi dapat memberikan sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat sehingga merangsang terbentuknya zat antibodi. Pemberian vaksin akan melindungi tubuh anak terhadap infeksi penyakit menular di masa mendatang. Selain untuk sistem kekebalan pribadi, imunisasi juga bermanfaat untuk masyarakat umum secara keseluruhan. Karena, apabila satu komunitas sudah cukup banyak yang kebal terhadap infeksi, maka penyakit tersebut akan semakin sulit menyebar dan menular ke orang lain yang belum diimunisasi.

Permenkes RI No. 12 Tahun 2017 mengatur bahwa imunisasi bertujuan menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD31). Tujuan khusus program ini antara lain tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi sesuai target RPJMN, tercapainya *Universal Child Immunization/UCI* (Persentasi minimal 80% bayi yang mendapat IDL disuatu desa/kelurahan). Berikut adalah data cakupan imunisasi pada bayi di Kota Denpasar pada tahun 2022 dan 2023.

Tabel : 5.6 Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

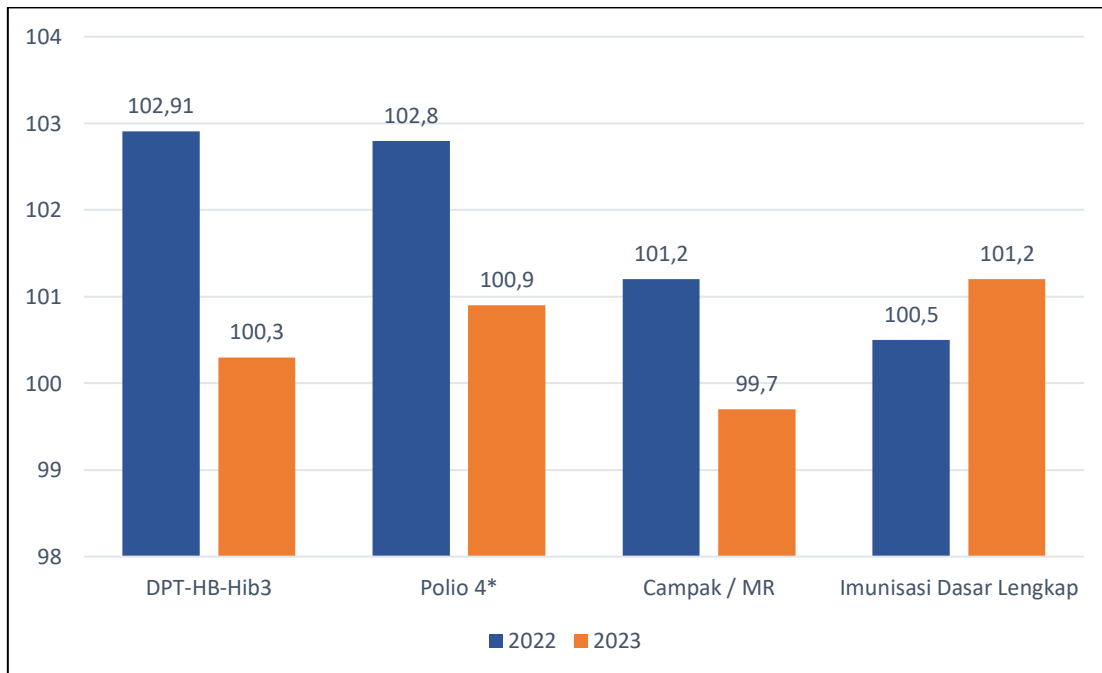
Kecamatan	Bayi Diimunisasi	2022	2023
Denpasar Utara	DPT-HB-Hib3	102,91	100,3
	Polio 4*	102,8	100,9
	Campak / MR	101,2	99,7
	Imunisasi Dasar Lengkap	100,5	101,2
Denpasar Timur	DPT-HB-Hib3	93,1	99,1
	Polio 4*	92,7	98,5

PROFIL STATISTIK GENDER DENPASAR TAHUN 2024

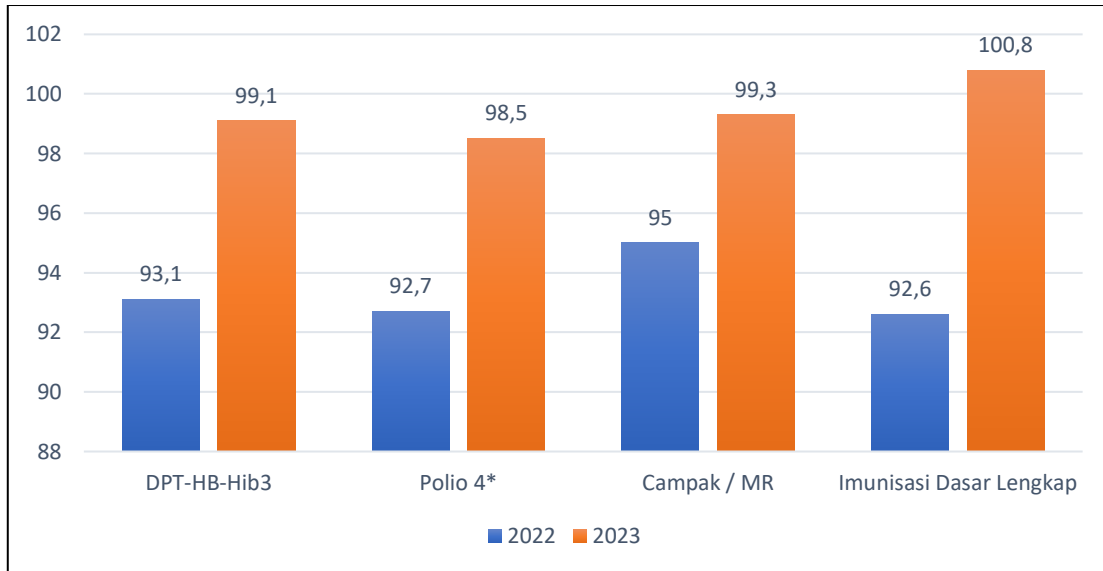
	Campak / MR	95	99,3
	Imunisasi Dasar Lengkap	92,6	100,8
Denpasar Selatan	DPT-HB-Hib3	97,5	99,6
	Polio 4*	97,4	98,5
	Campak / MR	98,2	99,3
	Imunisasi Dasar Lengkap	98,7	100,8
Denpasar Barat	DPT-HB-Hib3	104,2	93,6
	Polio 4*	104,1	94,5
	Campak / MR	109,4	95,7
	Imunisasi Dasar Lengkap	109,4	100,5
Jumlah			

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024

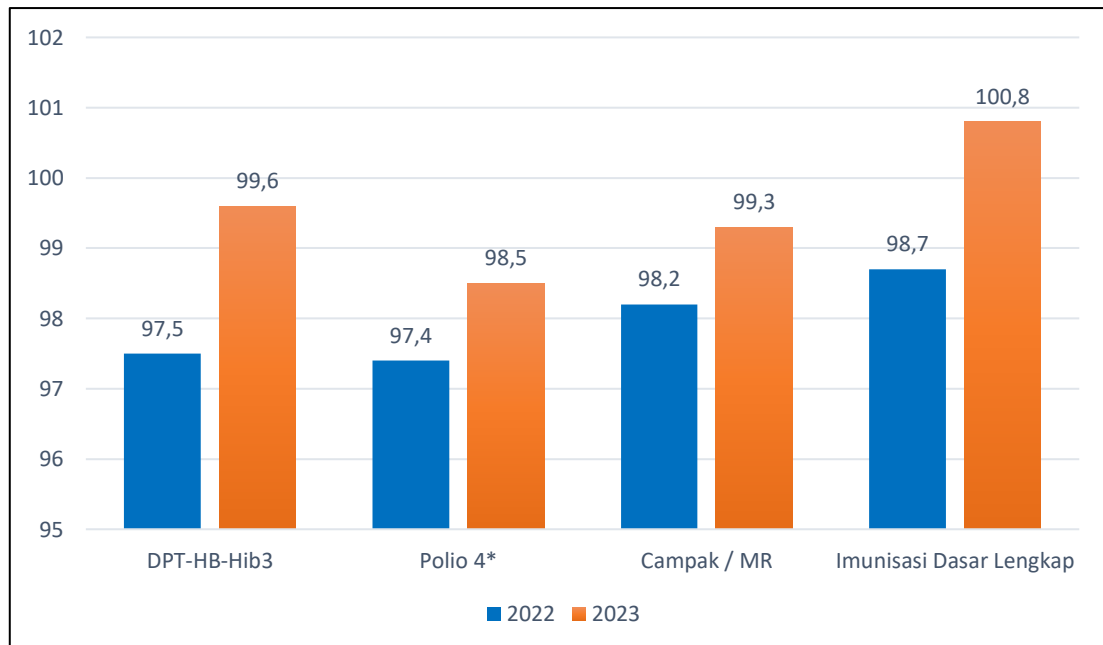
Cakupan imunisasi pada bayi di Kota Denpasar juga disajikan dalam bentuk gambar seperti berikut.



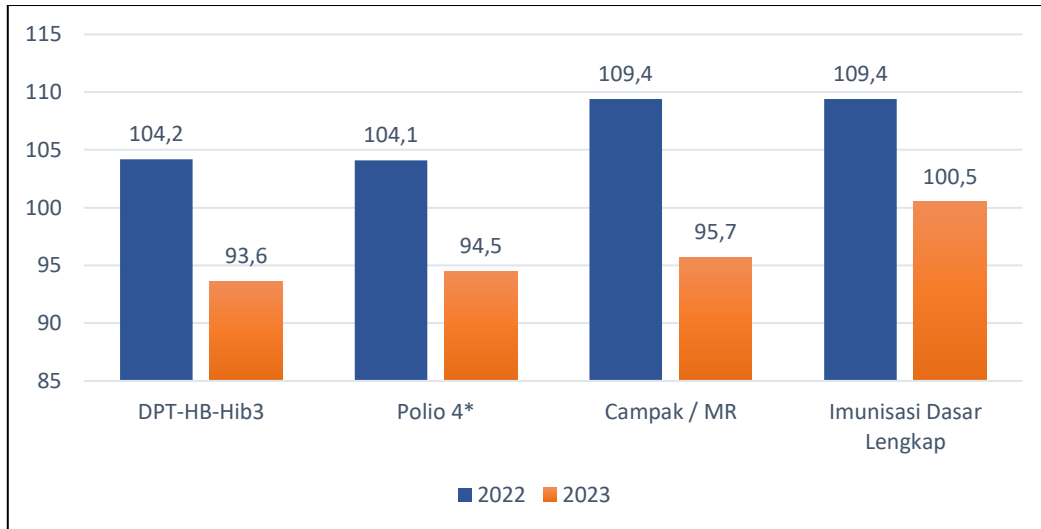
Gambar 5.10 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2022 dan 2023



Gambar 5.11 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2022 dan 2023



Gambar 5.12 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2022 dan 2023



Gambar 5.13 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2022 dan 2023

Dari Tabel dan Gambar tersebut dapat dilihat cakupan imunisasi bayi di Kota Denpasar tahun 2023 ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Kecamatan yang mengalami cakupan imunisasi yang meningkat ada di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan. Sedangkan penurunan cakupan imunisasi terjadi di dua kecamatan yang lain yaitu di Kecamatan Denpasar Barat dan Denpasar Utara. Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut apa yang menjadi penyebabnya.

5.7. Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar

Peran penting tenaga kesehatan terletak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Dengan derajat kesehatan yang tinggi merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia produktif baik secara sosial dan ekonomi. Tenaga kesehatan merujuk pada mereka yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan ataupun keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Salah satu unsur tenaga Kesehatan adalah Dokter umum. Dokter umum dapat dipahami sebagai dokter yang berfokus untuk menangani gejala dan penyakit pada pasien secara umum. Layanan yang diberikan berada pada ranah pencegahan, diagnosis, penanganan awal hingga rujukan ke dokter spesialis jika diperlukan. Pemenuhan layanan tingkat pertama dalam konteks dokter umum di Kota Denpasar pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah. Dilihat dari Tabel 5.7, jumlah dokter umum mengalami penurunan sebesar 7,95%. Jumlah dokter laki-laki mengalami penurunan satu terakhir ini.

Tabel : 5.7 Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

No	Tempat Tugas	Dokter Umum					
		2022			2023		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas Denpasar Utara	9	13	22	7	16	23
2	Puskesmas Denpasar Timur	5	15	20	4	17	21
3	Puskesmas Denpasar Selatan	14	14	28	11	15	26
4	Puskesmas Denpasar Barat	5	13	18	3	8	11
Jumlah		33	55	88	25	56	81

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024

Jika dilihat secara keseluruhan jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi mengalami penurunan dari total sebanyak 3.584 orang pada tahun 2022 menjadi 3.362 orang pada tahun 2023 atau pengurangan sebanyak 6,19%.

Jumlah ideal dokter yang dimiliki oleh suatu negara jika merujuk pada standar WHO adalah 1:1000 (1 dokter per 1.000 penduduk, red). Sementara di Indonesia sendiri masih menempati perbandingan 0,47 dokter per 1.000 penduduk. Jumlah ini masih sangat jauh dari yang seharusnya. Maka pengabdian dokter di berbagai daerah Indonesia akan dapat membantu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, kesenjangan terhadap tingkat pelayanan kesehatan di daerah-daerah kedepannya diharapkan juga akan semakin berkembang (<https://www.liputan6.com/regional/read/5367571/jumlah-dokter-di-indonesia-disebut-kurang-berapa-idealnya>).

Di Provinsi Bali saat ini terdapat 1.604 dokter spesialis. Selain jumlahnya masih minim dibandingkan jumlah penduduk, sebaran dokter spesialis di Bali juga belum merata. Berdasarkan cut off data SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) per 31 Desember 2022, total jumlah dokter spesialis di Bali 1.604 orang. Kementerian Kesehatan melalui RUU Kesehatan 2023 mendorong para dokter mengambil pendidikan spesialis. RUU Kesehatan memuat di antaranya upaya pemenuhan dokter spesialis di Indonesia. Produksi dokter spesialis perlu ditingkatkan melalui penerapan pendidikan kedokteran di rumah sakit (*hospital based*) (<https://www.nusabali.com/berita/139179/dokter-spesialis-di-bali-masih-kurang-dan-belum-merata>). Tabel 5.8. dan Tabel 5.9. berikut menyajikan data mengenai jumlah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis di Kota Denpasar Tahun 2023.

Tabel : 5.8 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022

No	Tempat Tugas	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi		Dokter Gigi Spesialis		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kec Denpasar Utara	0	0	2	3	1	2	0	0	8
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec Denpasar Utara	0	0	2	7	2	4	0	0	15
3	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kec Denpasar Utara	0	0	5	3	1	2	0	0	11
4	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kec Denpasar Timur	0	0	4	11	1	5	0	0	21
5	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec Denpasar Timur	0	0	1	4	0	3	0	0	8
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kec Denpasar Selatan	0	0	4	4	1	2	0	0	11

PROFIL STATISTIK GENDER DENPASAR TAHUN 2024

7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec Denpasar Selatan	0	0	1	3	1	4	0	0	9
8	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kec Denpasar Selatan	0	0	2	3	0	4	0	0	9
9	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kec Denpasar Selatan	0	0	7	4	0	4	0	0	15
10	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kec Denpasar Barat	0	0	1	3	1	5	0	0	10
11	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec Denpasar Barat	0	0	4	10	1	7	0	0	22
	Sub Total 1	0	0	33	55	9	42	0	0	139
1	RSUP Prof.Dr.IGN Ngoerah	191	114	830	821	1	8	2	3	1970
2	RSK Mata Ramata	4	13	2	7	0	0	0	0	26
3	RSIA Pucuk Permata Hati	8	2	1	3	0	0	0	0	14
4	RSUD Wangaya	41	25	14	19	0	5	1	1	106
5	RS Tk II Udayana	30	17	6	14	0	5	1	1	74
6	RS Manuaba	16	4	5	2	0	1	1	0	29
7	RS Mata RSBM	4	10	6	11	0	0	0	0	31
8	RS Surya Husada	48	27	7	10	2	3	3	2	102
9	RSU Bros	67	44	11	19	4	3	2	1	151
10	RS Kasih Ibu	55	34	8	19	5	3	2	4	130
11	RS Darma Yadnya	28	14	6	5	1	0	0	0	54
12	RS Puri Raharja	50	21	17	16	0	3	0	0	107
13	RS Bakti Rahayu	34	22	8	13	0	0	0	0	77
14	RSIA Harapan Bunda	8	6	1	4	0	0	0	0	19
15	RSGM Fak Kedokteran Mahasaraswati	0	0	1	3	17	43	14	8	86
16	RS Prima Medika	70	37	18	16	3	1	2	2	149
17	RS Bali Med	80	41	12	27	1	4	2	0	167
18	RSIA Puri Bunda	35	17	7	8	0	0	0	0	67
19	RS Bayangkara	23	13	6	15	0	2	0	0	57

20	RS Surya Husada Ubung	26	23	5	5	1	4	1	0	65
21	RSUD Bali Mandara	30	34	14	35	4	12	1	1	131
	Sub Total 2	848	518	985	1072	39	97	32	23	3584
	JUMLAH TOTAL (Sub Total 1 dan 2)	848	518	1018	1127	48	139	32	23	3723

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024

Dari Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan dokter yang ada di Kota Denpasar untuk Tahun 2022 berjumlah 3723 orang dokter yang terbagi menjadi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Dari jumlah tersebut dokter yang paling banyak adalah dokter umum dengan pembagian 47,5% laki-laki dan 52,5% orang dokter umum perempuan, diikuti oleh dokter spesialis dengan pembagian 62,1% dokter spesialis laki-laki dan 37,9% orang dokter spesialis Perempuan. Untuk dokter gigi dan dokter gigi spesialis didominasi oleh dokter Perempuan yaitu sebesar 66,9%.

Tabel : 5.9 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Tempat Tugas	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi		Dokter Gigi Spesialis		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kec Denpasar Utara	0	0	4	5	1	3	0	0	13
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec Denpasar Utara	0	0	1	5	1	4	0	0	11
3	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kec Denpasar Utara	0	0	2	6	1	4	0	0	13
4	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kec Denpasar Timur	0	0	2	10	1	5	0	0	18
5	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec Denpasar Timur	0	0	2	7	0	3	0	0	12

PROFIL STATISTIK GENDER DENPASAR TAHUN 2024

6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kec Denpasar Selatan	0	0	4	3	1	2	0	0	10
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec Denpasar Selatan	0	0	3	4	1	4	0	0	12
8	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kec Denpasar Selatan	0	0	0	2	0	3	0	0	5
9	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kec Denpasar Selatan	0	0	4	6	0	4	0	0	14
10	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kec Denpasar Barat	0	0	1	3	1	6	0	0	11
11	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kec Denpasar Barat	0	0	2	5	1	5	0	0	13
	Sub Total 1	0	0	25	56	8	43	0	0	132
1	RSUP Prof.Dr.IGN Ngoerah	66	50	823	813	1	7	1	4	1765
2	RSK Mata Ramata	4	13	2	7	0	0	0	0	26
3	RSIA Pucuk Permata Hati	9	3	2	2	0	0	0	0	16
4	RSUD Wangaya	43	26	16	17	0	3	1	1	107
5	RS Tk II Udayana	34	17	11	16	0	3	1	1	83
6	RS Manuaba	17	4	3	3	0	2	1	0	30
7	RS Mata RSBM	4	10	5	12	0	0	0	0	31
8	RS Surya Husada	51	27	6	9	2	3	3	2	103
39	RSU Bros	71	47	7	13	3	4	3	1	149
10	RS Kasih Ibu	50	32	8	15	4	3	2	4	118
11	RS Darma Yadnya	29	16	5	4	0	1	1	0	56
12	RS Puri Raharja	50	22	3	11	0	3	1	0	90
13	RS Bakti Rahayu	27	17	4	4	0	0	0	0	52
14	RSIA Harapan Bunda	8	4	3	1	0	0	0	0	16
15	RSGM Fak Kedokteran Mahasaraswati	2	0	1	3	16	39	14	9	84
16	RS Prima Medika	74	37	16	15	2	1	2	1	148
17	RS Bali Med	78	43	13	15	0	5	2	0	156

18	RSIA Puri Bunda	43	21	6	12	0	0	0	0	82
19	RS Bayangkara	26	16	7	13	0	2	0	0	64
20	RS Surya Husada Ubung	27	21	3	7	1	4	1	0	64
21	RSUD Bali Mandara	34	22	12	34	4	12	1	1	120
	Sub Total 2	747	448	958	1026	33	92	34	24	3362
	JUMLAH TOTAL (Sub Total 1 dan2)	747	448	983	1082	41	135	34	24	3494

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar,2024

Dari Tabel 5.9. dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan dokter yang ada di Kota Denpasar untuk Tahun 2023 berjumlah 3494 orang dokter yang terbagi menjadi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Dari jumlah tersebut dokter yang paling banyak adalah dokter umum dengan pembagian 47,6% laki-laki dan 52,4% orang dokter umum perempuan, diikuti oleh dokter spesialis dengan pembagian 62,5% dokter spesialis laki-laki dan 37,5% orang dokter spesialis perempuan. Untuk dokter gigi dan dokter gigi spesialis juga didominasi oleh dokter Perempuan yaitu sebesar 68%.

Jumlah dokter yang ada di Kota Denpasar untuk tahun 2023 secara keseluruhan menurun sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya demikian juga untuk dokter spesialis dan dokter umum yang juga mengalami penurunan jumlah, sedangkan untuk dokter gigi dan dokter gigi spesialis mengalami kenaikan sebesar 47,9%. Dan secara keseluruhan jumlah dokter perempuan yang ada di Kota Denpasar untuk tahun 2023 sejumlah 1689 orang (48,3%) dan tahun sebelumnya sebesar 1807 orang (48,5%). Dari jumlah tersebut dapat dilihat dokter yang berjenis kelamin perempuan hampir sebanding jumlahnya dengan dokter laki-laki dan hal tersebut mengindikasikan sudah banyak kaum perempuan yang bekerja sebagai dokter.

5.8. Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. KB (Keluarga Berencana) menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat

melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional. Karena Keluarga Berencana adalah suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk, maka dari itu program KB ini diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Perlu diketahui, bahwa Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan yaitu dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

5.8.1 Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB

Fasilitas kesehatan yang melayani KB di Kota Denpasar terdiri atas puskesmas, klinik pratama, klinik utama, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Pada tahun 2023 di Kota Denpasar terdapat 11 puskesmas, 19 klinik pratama, 3 klinik utama, 15 RS Umum dan 3 RS Khusus yang melayani Program KB. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel: 5.10 Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	11
2	Klinik Pratama	19
3	Klinik Utama	3
4	RS Umum	15
5	RS Khusus	3
	Jumlah	51

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2024

5.8.2 Alat/Cara KB yang Digunakan

Salah satu wujud dari program Keluarga Berencana ini adalah pemakaian alat kontrasepsi yang dimaksudkan untuk menunda/mencegah kehamilan. Berbagai alat kontrasepsi diproduksi untuk dapat dipilih dan digunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Alat kontrasepsi dapat dibagi menjadi alat kontrasepsi yang bersifat temporer (sementara) dan alat kontrasepsi permanen (selamanya).

Dilihat dari jenisnya ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang diharapkan akan dapat menjadi pilihan bagi seorang suami atau istri yang dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan, perasaan nyaman dan aman pemakainya. Pada Tabel 5.11 di bawah ada 8 jenis alat kontrasepsi yang dapat dijadikan pilihan bagi laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar tahun 2023, yaitu MOW/tubektomi; AKDR/IUD/Spiral, Suntikan KB;MOP; Pil KB; Kondom/karet KB' dan Implan. Pada Tabel 5.11. berikut disajikan jumlah perempuan pernah nikah usia 15-49 tahun yang berstatus nikah menurut Alat/Cara KB yang Digunakan.

Tabel 5.11 Jumlah Perempuan Pernah Nikah Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Nikah Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan Tahun 2023

Alat/Cara KB yang Digunakan	2023
Tubektomi/MOW	3.439
Vasektomi/MOP	124
AKDR/IUD/Spiral	12.427
Suntikan KB	21.495
Pil KB	3.245
Kondom/Karet KB	2.092
IMPLAN	1.461
MAL	42
Total	44.262

Sumber : PPPAPPKB Kota Denpasar, 2024

Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah penggunaan alat kontrasepsi

perempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun yang berstatus kawin tahun 2023. Dari 44.262 orang perempuan pengguna alat KB, penggunaan kontrasepsi terbanyak adalah suntikan KB digunakan oleh 21.495 orang, diikuti dengan AKDR/IUD/Spiral sebanyak 12.427 orang. Alat KB yang paling sedikit digunakan pada tahun 2023 di Kota Denpasar adalah MAL yaitu sebanyak 42 orang saja.

Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah metode kontrasepsi alami bersifat sementara yang dapat digunakan setelah persalinan. MAL memiliki cara kerja berupa penekanan ovulasi. Peningkatan hormon prolactin (hormon pembentukan ASI) usai persalinan menyebabkan penurunan hormon lain seperti LH dan estrogen yang diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi sehingga ovulasi (pematangan sel telur) tidak terjadi.

Suntikan KB merupakan alat kontrasepsi yang mejadi pilihan terbanyak bagi Perempuan pada tahun 2023. Suntikan KB ada yang digunakan untuk menunda kehamilan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dan ada pula yang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Oleh karenanya alat kontrasepsi ini termasuk kategori temporer dan tergolong murah sehingga banyak disukai oleh kaum Perempuan.

Pilihan kedua terbanyak adalah AKDR/IUD/Spiral. AKDR merupakan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD (*Intra Uterine Device*) atau spiral adalah alat kontrasepsi yang berupa perangkat plastik berbentuk huruf T yang diletakkan di dalam rahim dengan maksud untuk menghadang sperma agar tidak membuahi sel telur. Satu kelebihan dari AKDR adalah pemakaiannya cukup satu kali saja tetapi berlaku untuk jangka waktu yang cukup panjang.

5.9. Penduduk yang Terlayani Air Bersih

Pengertian air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.416/Menkes/PER/IX/1990 adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum setelah dimasak. Pengertian lain mengenai air minum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.907/MENKES/SK/VII/2002 adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan (bakteriologis,

kimiawi, radioaktif, dan fisik) dan dapat langsung diminum (Permenkes RI No.416/Menkes/PER/IX/1990).

Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, dan biologi, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping. Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut. Air merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan.

Pengolahan air bersih selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak sembarang air bisa dikatakan air bersih. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari termasuk sanitasi. Tabel 5.12. menyajikan data mengenai persentase penduduk di Kota Denpasar yang sudah mendapat pelayanan dan belum mendapatkan pelayanan air bersih.

Tabel 5.12. Persentase Penduduk yang Terlayani dan Belum Terlayani Air Bersih di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Keterangan	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Orang	%	Orang	%
Jumlah penduduk terlayani air bersih	344.812	51,83	342.124	47,07
Jumlah penduduk yang belum terlayani air bersih	320.516	48,17	384.684	52,93

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma, 2024

Pada Tabel 5.12. terlihat bahwa secara umum pada tahun 2023 persentase penduduk kota Denpasar yang terlayani air bersih menurun dari 51,83% pada tahun 2022 menjadi 47,07% pada tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk yang belum terlayani air bersih meningkat dari 48,17% pada tahun 2022 menjadi 52,93% pada tahun 2023.

BAB VI EKONOMI

Perempuan dan anak masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami berbagai masalah, seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia. Perempuan acapkali dianggap sebagai kelompok kelas kedua (subordinat) sehingga mereka tidak memperoleh persamaan hak dengan laki-laki. Perempuan dinilai hanya becus dalam melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu, perempuan mulai bangkit dan berhasil membuktikan bahwasannya keberadaan mereka layak untuk diperhitungkan. Kecerdasan serta kepiawaian perempuan-perempuan Indonesia, khususnya, tidak bisa lagi dianggap remeh karena telah turut berkontribusi terhadap pembangunan.

Peran suatu negara demi mendukung terciptanya kesetaraan gender sangat dibutuhkan. Kepedulian negara kepada perempuan dapat dilakukan dengan memberi ruang bagi perempuan untuk terus berkarya. Keberadaan perempuan terus mengalami peningkatan terbukti dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan di beberapa bidang pembangunan. Banyak bidang yang dulunya belum bisa dimasuki perempuan, tetapi sekarang sudah bisa masuk ke dalamnya. Hal ini tidak lepas dari kebijakan afirmasi terkait alokasi 30 persen bagi legislator Perempuan serta dibentuknya kelembagaan yang terkait dengan peran perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Komnas Perempuan.

Di Indonesia, penduduk perempuan mencapai 49,5 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 273 juta. Dengan memberdayakan perempuan sesuai potensinya, diharapkan bisa membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Peran perempuan diharapkan meningkatkan perekonomian bagi keluarga, serta di bidang sosial, budaya, bahkan politik. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang terus menggabungkan perjuangan kesetaraan gender, kaum perempuan masa kini mulai

mengambil peran yang cukup aktif dan penting bahkan kini peranannya tidak lagi pada urusan rumah tangga saja.

Badan PBB untuk pemberdayaan perempuan, UN Women, mencatat berdasarkan Laporan Kesenjangan Gender Global dari Forum Ekonomi Dunia, kualitas pemberdayaan perempuan di Indonesia berada pada peringkat 87 dari 146 negara-negara di dunia. (<https://www.mpr.go.id/berita/Keterlibatan-Perempuan-di-Sektor-Ekonomi-dan-Politik-Harus-Ditingkatkan>). Berdasarkan data tersebut partisipasi Perempuan dalam pembangunan masih harus ditingkatkan.

Pemberdayaan perempuan, bukan sekadar mewujudkan kesetaraan gender dari sisi jumlah tetapi juga harus berperan signifikan di berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan sebuah proses agar perempuan memiliki daya untuk menjadi “*bread winner*” sehingga mampu menghilangkan ketergantungan ekonomi dan melepaskan dari jerat kemiskinan (Elliott, 2008). Sementara itu, pemberdayaan dalam politik bermakna proses untuk meningkatkan ketertarikan perempuan dalam dunia politik dan berperan serta dalam pengambilan keputusan (World Bank, 2011).

Dalam bidang ekonomi, perempuan juga perlu diberikan kesempatan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan, baik sebagai pengusaha ataupun bagian dari tim manajerial. Memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam area publik, termasuk dunia kerja, bermanfaat baik untuk pengembangan kapasitas perempuan itu sendiri juga untuk meningkatkan persaingan. Dengan kehadiran kaum hawa, maka dunia kerja lebih berwarna. Pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif terutama untuk menghadapi globalisasi (Seguino, 2000; World Bank, 2011). Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Penelitian Klasen & Lamanna (2009) memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam kesempatan kerja menghambat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan sekitar empat kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan. Ada empat hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan produktivitas perempuan. Pertama, mengintensifkan upaya untuk mengarusutamakan/memfokuskan

peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam seluruh sektor pembangunan secara sinergi, terutama di sektor-sektor yang melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat. Kedua, menumbuhkan kesadaran sektor maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan program-program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan. Ketiga, mendorong tumbuhnya forum komunikasi program peningkatan ekonomi perempuan untuk mengakses sumberdaya dan informasi program-program pemberdayaan ekonomi baik dari pemerintah, swasta atau pun organisasi non-pemerintah. Keempat, mengembangkan model desa mandiri untuk mengurangi beban keluarga miskin (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2012).

Kota Denpasar menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Bali. Kota Denpasar yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bali, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, dan pusat pariwisata. Penetapan Kota Denpasar menjadi pengembangan pembangunan ekonomi di Bali bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Implikasi penetapan ini dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Bali secara merata sehingga kesenjangan kehidupan warga masyarakat di bidang ekonomi tidak berbeda secara tajam.

Dengan demikian, pelaksanaan sensus ekonomi menjadi sangat signifikan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan ekonomi angkatan kerja dengan menanyakan tentang lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan penduduk yang bekerja. Variabel tersebut dikaitkan dengan variabel ekonomi seperti tingkat dan laju GNP (Gross National Product/ Produk Nasional Bruto) per kapita dan alokasi GNP per sektor. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor.

Melihat gambaran tersebut negara harus peduli pada perempuan dan memberikan jalur-jalur yang dapat mendukung terciptanya kesetaraan gender. Dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya, maka negara dapat mencapai kemajuan. Beberapa tabel dan gambar di bawah ini, menunjukkan

tentang pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor sebagai berikut.

6.1 Kegiatan Utama Penduduk

Kepadatan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kepadatan penduduk merupakan rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk Kota Denpasar pada tahun 2022 adalah 5.769 orang/ km² meningkat dari tahun sebelumnya 5.686 orang/ km² dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 6.003 orang/km² (BPS Provinsi Bali, 2024).

Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat pariwisata di Provinsi Bali sehingga relatif banyak menciptakan kesempatan kerja. Pencari kerja tersebut bukan saja berasal dari orang asli Kota Denpasar saja tetapi juga yang beraal dari luar Kota Denpasar bahkan dari luar Bali. Para migran yang merantau ke Kota Denpasar, ternyata bagi yang berhasil sebagian tinggal menetap di Kota Denpasar dan menjadi penduduk kota ini. Dengan semakin bertambah banyaknya migran yang menetap dan bekerja atau mengais rejeki di Kota Denpasar menyebabkan penduduk Kota Denpasar menjadi heterogen, baik dari segi etnis, ras, agama, maupun pekerjaan. Dengan demikian, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan relatif tinggi, baik di sektor formal maupun informal.

Di Kota Denpasar, daya beli masyarakat menjadi relatif tinggi sehingga secara kuantitas mempengaruhi juga pemanfaatan tenaga manusia di sektor informal, antara lain semakin banyak yang menekuni profesi sebagai pedagang, karyawan toko, karyawan kios, karyawan supermarket, dan sejenis. Selain itu, relatif banyak juga di kalangan penduduk lokal dan pendatang membuat bidang usaha sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

6.2 Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020- 2035, dimana tingkat kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk

usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun (BPS, 2023). Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Bonus demografi merupakan suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang jumlah usia semakin kecil dan jumlah usia lanjut belum terlalu banyak. Tingginya angka usia produktif biasa disebut dengan Bonus Demografi. Jumlah Penduduk usia produktif (15-59 tahun) menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : 6.1. Jumlah Penduduk Usia Produktif (15 – 59 Tahun) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Kelompok Umur	Tahun 2022 (org)			Tahun 2023 (org)		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 14 Tahun	65.906	61.718	127.624	70.953	66.389	137.342
15 – 59 Tahun	223.938	228.229	452.167	224.405	229.235	453.640
60 Tahun +	37.574	39.040	76.614	36.288	38.058	74.346
Jumlah	327.418	328.987	656.405	331.646	333.682	665.328

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2024

Tabel 6.1 menggambarkan mengenai jumlah secara keseluruhan penduduk Kota Denpasar yang terdiri dari tiga kelompok umur yaitu penduduk kelompok umur 0-14 tahun, kelompok umur 15-59 tahun dan kelompok umur di atas 60 tahun. Jumlah keseluruhan penduduk usia produktif (15-59 tahun) untuk tahun 2023 secara umum mengalami kenaikan sebesar 0,32% dari tahun sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan jumlah penduduk usia produktif baik laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 jumlahnya juga lebih banyak dari tahun 2022. Terjadi peningkatan sebesar 0,21% untuk penduduk usia produktif laki-laki dan 0,43% untuk penduduk usia produktif perempuan. Dari keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2023 jumlah penduduk usia produktif adalah sebesar 68,18% menurun sedikit dari tahun sebelumnya yaitu 68,88%.

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 kota Denpasar masih memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia non produktif. Dengan tingginya angka usia produktif yang disebut sebagai bonus demografi ini, kota Denpasar diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktifitas masyarakatnya. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

6.3 Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Penduduk Kota Denpasar yang bekerja menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terbagi ke dalam 83 jenis pekerjaan yang mencakup berbagai bidang dari Aparatus Sipil Negara, wirausaha hingga swasta.

Ditinjau menurut status pekerjaan, secara umum pekerjaan penduduk Kota Denpasar tahun 2023 didominasi sebagai karyawan swasta diikuti oleh pelajar/mahasiswa dan belum/tidak bekerja di urutan ketiga (Tabel 6.2). Pekerjaan tukang jahit, guru, dosen, dokter dan sopir berada di urutan selanjutnya. Pilihan masyarakat untuk menjadi karyawan swasta memiliki persentase tertinggi, yaitu sekitar 23,42% pada tahun 2022 dan 23,71% pada tahun 2023.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah perempuan yang bekerja pada tahun 2023 mendekati jumlah laki-laki yaitu sebesar 49,84%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 328.987 orang menjadi 333.682 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan pada saat sekarang sudah semakin berperan dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Tabel: 6.2 Jumlah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

STATUS	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
BELUM/TIDAK BEKERJA	66.708	69.725	63.741	66.550	130.449	136.275
MENGURUS RUMAH TANGGA	2	3	66.074	65.991	66.076	65.994
PELAJAR/MAHASISWA	79.650	79.114	72.394	71.706	152.044	150.820
PENSIUNAN	5.694	5.690	2.397	2.441	8.091	8.131
PEGAWAI NEGERI SIPIL	9.281	9.126	8.656	8.621	17.937	17.747
TENTARA NASIONAL	1.670	1.691	97	93	1.767	1.784
KEPOLISIAN RI	2.368	2.362	262	267	2.630	2.629
PERDAGANGAN	2.106	2.057	3.075	3.001	5.181	5.058
PETANI/PEKEBUN	1.865	1.835	1.360	1.368	3.225	3.203
PETERNAK	110	103	34	31	144	134
NELAYAN/PERIKANAN	534	530	147	146	681	676
INDUSTRI	178	171	114	112	292	283
KONSTRUKSI	339	333	69	70	408	403
TRANSPORTASI	486	473	34	33	520	506
KARYAWAN SWASTA	89.867	91.681	63.916	66.116	153.783	157.797
KARYAWAN BUMN	2.275	2.272	1.217	1.224	3.492	3.496
KARYAWAN BUMD	525	515	268	271	793	786
KARYAWAN HONORER	1.529	1.534	1.426	1.428	2.955	2.962
BURUH HARIAN LEPAS	4.320	4.316	2.342	2.337	6.662	6.653
BURUH TANI/PERKEBUNAN	808	789	636	632	1.444	1.421
BURUH NELAYAN/PERIKANAN	80	79	11	12	91	91
BURUH PETERNAKAN	21	21	12	10	33	31
PEMBANTU RUMAH TANGGA	19	18	281	278	300	296
TUKANG CUKUR	56	54	6	5	62	59
TUKANG LISTRIK	179	176	2	2	181	178
TUKANG BATU	428	415	13	13	441	428
TUKANG KAYU	548	525	9	9	557	534
TUKANG SOL SEPATU	14	14	2	1	16	15
TUKANG LAS/PANDAI BESI	114	114	2	2	116	116
TUKANG JAHIT	328	322	884	867	1.212	1.189
TUKANG GIGI	3	3	0	0	3	3
PENATA RIAS	2	2	118	115	120	117
PENATA BUSANA	8	8	14	14	22	22
PENATA RAMBUT	8	8	71	70	79	78
MEKANIK	470	466	1	1	471	467
SENIMAN	311	313	49	49	360	362
TABIB	11	10	1	1	12	11
PARAJI	7	6	3	3	10	9

PROFIL STATISTIK GENDER DENPASAR TAHUN 2024

PERANCANG BUSANA	1	1	27	27	28	28
PENTERJEMAH	23	24	9	9	32	33
IMAM MESJID	8	7	0	0	8	7
PENDETA	252	254	19	22	271	276
PASTOR	6	6	0	0	6	6
WARTAWAN	92	94	17	15	109	109
USTADZ/MUBALIGH	22	22	9	9	31	31
JURU MASAK	101	98	52	51	153	149
PROMOTOR ACARA	3	3	1	1	4	4
ANGGOTA DPR-RI	2	1	0	0	2	1
ANGGOTA DPD	1	1	0	0	1	1
ANGGOTA BPK	1	1	1	1	2	2
ANGGOTA	1	1	0	0	1	1
WALIKOTA	1	1	0	0	1	1
WAKIL WALIKOTA	1	1	0	0	1	1
ANGGOTA DPRD PROVINSI	3	3	0	0	3	3
ANGGOTA DPRD	17	15	1	1	18	16
DOSEN	1.058	1.069	780	804	1.838	1.873
GURU	995	1.012	3.095	3.141	4.090	4.153
PILOT	13	13	0	0	13	13
PENGACARA	181	186	54	59	235	245
NOTARIS	108	108	100	107	208	215
ARSITEK	421	417	58	60	479	477
AKUNTAN	21	21	24	24	45	45
KONSULTAN	130	128	43	44	173	172
DOKTER	1.162	1.218	1.275	1.336	2.437	2.554
BIDAN	0	0	441	448	441	448
PERAWAT	120	124	780	808	900	932
APOTEKER	54	54	122	133	176	187
PSIKIATER/PSIKOLOG	8	8	27	30	35	38
PENYIAR TELEVISI	0	0	3	3	3	3
PENYIAR RADIO	11	11	4	5	15	16
PELAUT	249	241	7	6	256	247
PENELITI	17	15	15	14	32	29
SOPIR	1.446	1.422	6	6	1.452	1.428
PIALANG	4	4	4	5	8	9
PARANORMAL	9	9	6	6	15	15
PEDAGANG	2.966	2.913	6.550	6.476	9.516	9.389
PERANGKAT DESA	97	93	59	60	156	153
KEPALA DESA	12	12	0	0	12	12
BIARAWATI	0	0	6	6	6	6
WIRASWASTA	44.825	45.101	25.594	26.010	70.419	71.111
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI	52	51	60	61	112	112

CHEFF	1	1	0	0	1	1
MANAJER	1	1	0	0	1	1
PEKERJAAN LAINNYA	0	7	0	4	0	11
TOTAL	327.418	331.646	328.987	333.682	656.405	665.328

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, 2024

Urban Farming adalah bentuk pertanian perkotaan menanam makanan di daerah perkotaan di darat, biasanya di halaman belakang atau di tanah kosong, tetapi terkadang ruang terabaikan seperti median jalan, yang biasanya tidak didedikasikan untuk memproduksi makanan. *Urban farming* paling sering ditemukan di daerah perkotaan, di mana ruang tersedia dan tidak mahal. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud keberlanjutan sektor pertanian di perkotaan, disamping di perdesaan. *Urban Farming* lebih banyak diminati oleh kaum perempuan dan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang menjadi wadah perhimpunannya. Kaum perempuan lebih tertarik untuk bekerja *urban farming* dikarenakan dapat dikerjakan di rumah tanpa harus meninggalkan keluarga dan dapat memberikan tambahan penghasilan yang berguna bagi keluarga. Jumlah KWT yang ada di Kota Denpasar untuk tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.3. Dari tabel dapat dilihat jumlah KWT yang ada di Kota Denpasar tahun 2023 sebanyak 14 KWT menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan terjadi di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat.

Tabel : 6.3. Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Jumlah KWT	
	2022	2023
Denpasar Utara	6	4
Denpasar Timur	3	3
Denpasar Selatan	5	5
Denpasar Barat	4	2
Jumlah	18	14

Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2024

6.4 Tenaga Penyuluh Pertanian

Terselenggaranya aktivitas di sektor pertanian tidak lepas dari peran penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian diharapkan mampu meningkatkan partisipasi petani untuk bekerjasama dengan ikut serta dalam kegiatan program kerja dan mendukung jalannya program kerja, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Penyuluh pertanian memiliki tugas dan fungsi memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usahatani guna meningkatkan kesejahteraannya. Dalam melaksanakan tugasnya agar berjalan efektif dan efisien, setiap penyuluh pertanian perlu melakukan tahapan-tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan pertanian.

Sebagai seorang agen perubahan penyuluh senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya agar dapat berubah ke arah kemajuan. Dalam hal ini penyuluh berperan sebagai katalis, pembantu memecahkan masalah (*solution gives*), pembantu proses (*process helper*), dan sebagai sumber penghubung (*resources linker*). Kondisi tenaga penyuluh di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel : 6.4. Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Kecamatan	No	Nama	Jenis Kelamin
1	Denpasar Utara	1	Luh Ketut Ari Abadi, SP	P
		2	Rully Fitri Sianti Dewi, SP. M.Si	P
		3	Ni Luh Erna Wati, SP	P
		4	I Ketut Budiawan, SP	L
2	Denpasar Timur	1	Marcella Wayan Kartika Rini, SP	P
		2	Ni Wayan Lilis Sukma Dewi	P
		3	Ir. Luh Mas Ayustini	P

		4	Drh. Putu Gede Eka Dharmana, S.KH	L
		5	I Made Dwipayasa, SP	L
3	Denpasar Selatan	1	Ni Nyoman Ayu Trisna Kartika, SP	P
		2	Drh. Man Hetik, S.KH	P
		3	I Putu Mindra, SP	L
		4	I Komang Adi Widyastama, SP	L
		5	Muhammad David Hermawan, SP	L
4	Denpasar Barat	1	Luh Ketut Ayu Sukarmi, SP	P
		2	Drh. Kadek Nancy Marcolina, S.KH	P
		3	Randini Resmi Anitis, SP	P

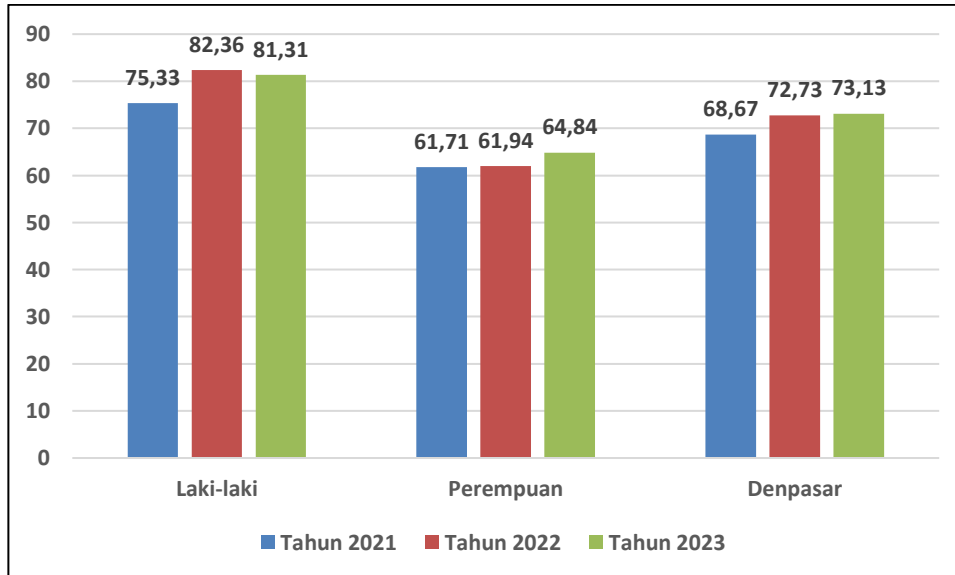
Sumber: Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2024

Jumlah penyuluh pertanian pada tahun 2023 di Kota Denpasar berjumlah 17 orang yang terdiri dari penyuluh perempuan sebanyak 11 orang dan penyuluh laki-laki sebanyak 6 orang (Tabel 6.4). Hal ini membuktikan telah terjadi kesetaraan gender dalam sektor pertanian. Penyuluh tidak hanya untuk kaum laki-laki saja tetapi perempuan bisa ikut andil dalam Pembangunan pertanian. Peningkatan partisipasi perempuan sebagai penyuluh diharapkan dapat membantu mengubah posisi penyuluhan pertanian agar lebih efektif dalam memfasilitasi program penyuluhan.

6.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dalam melihat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah dapat digunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. TPAK didefinisikan sebagai ukuran

yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. TPAK biasanya dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, budaya, demografi serta keadaan daerah. Berikut disajikan data mengenai TPAK di Kota Denpasar periode Tahun 2021-2023.



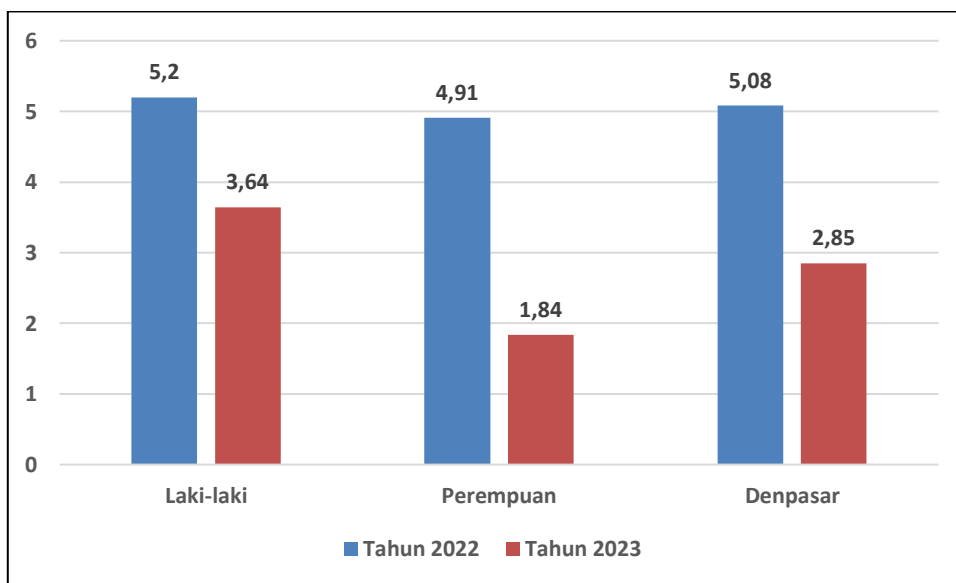
Sumber : BPS Prov Bali,Keadaan Ketenagakerjaan Prov Bali, Agustus 2023

Gambar 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021-2023

Gambar 6.1 menunjukkan angka TPAK Kota Denpasar selama kurun waktu tiga tahun terakhir secara umum menunjukkan tren yang fluktuatif. Secara keseluruhan nilai TPAK untuk Kota Denpasar mengalami kenaikan dari tahun 2021-2023 sebesar 4,46%. TPAK laki-laki cenderung selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Lebih rendahnya TPAK perempuan ini dinilai wajar, mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga, apalagi setelah menikah kebanyakan perempuan memilih untuk mengurus rumah tangga (bukan angkatan kerja) sehingga akan mengurangi nilai TPAK nya.

TPAK perempuan selama periode tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Di tahun 2023 ada kenaikan sebesar 3,13% dibandingkan tahun 2021. Hal ini menggambarkan kaum perempuan mulai membuka diri untuk beraktifitas bekerja untuk memperbaiki taraf hidup keluarga seiring dengan semakin membaiknya kinerja perekonomian di Kota Denpasar.

Salah satu ukuran pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Denpasar masih berada di angka 5 persen. Namun, pada tahun 2023 TPT Kota Denpasar turun secara signifikan sampai di bawah angka 3 persen atau sebesar 2,85 persen. Kondisi ini hampir mirip dengan kondisi sebelum pandemi, yaitu TPT Kota Denpasar berada di angka sekitar 2 persen. Menurut Todaro (2003), pengangguran muncul karena rendahnya tingkat pertumbuhan permintaan terhadap tenaga kerja di sektor industri modern dan tingkat pertumbuhan yang cepat dari persediaan tenaga kerja kota yang berasal dari desa. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat.



Sumber : BPS Prov Bali, Keadaan Ketenagakerjaan Prov Bali, Agustus 2023

Gambar 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

6.6 Tenaga Kerja Asing Pendatang

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia (UU Nomor 13 Tahun 2003). Tenaga kerja asing yang ada di Kota Denpasar sebagiann besar bekerja di dunia pariwisata KA itu

banyak bekerja di industri pariwisata, mulai dari hotel, restoran, guide, fotografer, hingga penyewaan properti. Keberadaan tenaga kerja asing di Kota Denpasar perlu mendapatkan pengawasan dan ada regulasi yang mengatur sebagai batasan-batasan yang jelas agar tidak memicu persaingan bagi tenaga Ikerja lokal. Tabel 6.5. berikut menyajikan jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Denpasar.

Tabel: 6.5. Tenaga Kerja Asing Pendatang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Jenis Kelamin	Tahun 2022 (orang)	Tahun 2023 (orang)
Laki-laki	141	211
Perempuan	101	148
Laki-laki + Perempuan	242	359

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2024

Pada Tabel 6.5 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja asing pendatang di Kota Denpasar dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 32,59% yang didominasi oleh tenaga kerja asing laki-laki. Peningkatan jumlah tenaga kerja asing ini disebabkan salah satunya adalah mulai pulihnya keadaan perekonomian akibat pandemi Covid -19 di Indonesia secara umum dan Kota Denpasar khususnya yang merupakan pusat perekonomian di Provinsi Bali.

6.7 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Kaum perempuan pada saat sekarang sudah semakin berperan dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Dari data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menyatakan bahwa banyak jenis pekerjaan yang sudah dilakukan oleh kaum Perempuan. Hal ini menandakan bahwa perempuan sudah berani melakukan berbagai macam pekerjaan hampir sama dengan kaum laki-laki khususnya di Lembaga pemerintah dan juga di Lembaga swasta. Tabel 6.6. hingga Tabel 6.10. berikut

menyajikan data mengenai jumlah perempuan serta persentase partisipasi Perempuan yang bekerja di Lembaga pemerintahan dan juga Lembaga swasta di Kota Denpasar pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel: 6.6. Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

No	Perempuan yg bekerja di Lembaga Pemerintah	Tahun		Jumlah
		2022	2023	
1	ASN	3.719	3.753	7.472
2	Tentara	97	93	190
3	polisi	262	65	327
4	Anggota BPK	1	1	2
5	Anggota DPRD	1	1	2
6	Hakim	4	8	12
7	Jaksa	15	21	36
8	Perangkat Desa	59	60	119
9	Anggota Lembaga Tinggi	60	61	121
	Jumlah	4.218	4.063	8.281

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kantor Pengadilan Denpasar, 2024

Tabel: 6.7. Pesentase Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	Tahun	
		2022	2023
1	Jumlah pekerja Perempuan (orang)	124.381	126.994
2	Jumlah pekerja Perempuan di lembaga pemerintahan (orang)	4.218	4.063
3	Persentase Partisipasi Perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintahan(%)	3,39	3,20

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kantor Pengadilan Denpasar, 2024

Dari Tabel 6.6. dapat dilihat mengenai jumlah perempuan yang bekerja di Lembaga Pemerintahan di Kota Denpasar. Secara umum pekerja perempuan yang bekerja di Lembaga pemerintahan di Kota Denpasar adalah sebagai ASN, tentara, polisi, anggota BPK, Anggota DPRD, Hakim, Jaksa dan perangkat desa

serta anggota Lembaga tinggi. Pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan secara keseluruhan tahun 2022 dan tahun 2023 adalah berjumlah 8.281 orang. Untuk tahun 2023 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan berjumlah 4.063 orang menurun 3,8% dari tahun sebelumnya dengan mayoritas bekerja sebagai ASN yaitu 3.753 orang (92,3%) dan diikuti oleh polisi dan tentara.

Dari data di atas diperoleh partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan di Kota Denpasar untuk tahun 2023 adalah sebesar 3,20% sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,39% (Tabel 6.7.). Hal ini disebabkan jumlah pekerja Perempuan mengalami penurunan yang cukup besar di beberapa jenis pekerjaan yaitu tentara dan polisi.

6.8 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Selain bekerja di Lembaga pemerintahan, kaum Perempuan di Kota Denpasar juga bekerja di Lembaga swasta. Tabel 6.8. menyajikan jenis pekerjaan dan jumlah Perempuan di Kota Denpasar yang bekerja di Lembaga swasta. Pada Tabel terlihat ada beberapa jenis pekerjaan yang digeluti oleh kaum perempuan di Kota Denpasar dan mayoritas bekerja sebagai karyawan, wiraswasta, pedagang dan sisanya tersebar di beberapa jenis pekerjaan lainnya.

Tabel: 6.8. Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

No	Perempuan yg bekerja di Lembaga Swasta	Tahun		Jumlah
		2022	2023	
1	Karyawan Swasta	63.916	66.116	130.032
2	Wiraswasta	25.594	26.010	51.604
3	Konsultan	43	44	87
4	Akuntan	24	24	48
5	Arsitek	58	60	118
6	Notaris	100	107	207
7	Pengacara	54	59	113
8	Pedagang	6.550	6.476	13.026
9	Perancang busana	27	27	54
10	seniman	49	49	98
11	Juru masak	52	51	103

12	Mekanik	1	1	2
13	Penata rias	118	115	233
14	Penata Busana	14	14	28
15	Penata Rambut	71	70	141
	Jumlah	96.671	99.223	195.894

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kantor Pengadilan Denpasar, 2024

Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta jauh lebih besar daripada yang bekerja di lembaga pemerintahan. Tahun 2023 jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta yaitu 99.223 orang meningkat 2,6% dari tahun sebelumnya yaitu 96.671 orang. Peningkatan terlihat pada jenis pekerjaan karyawan swasta dan wiraswasta.

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta di Kota Denpasar untuk tahun 2023 adalah sebesar 78,13% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 77,72 % (Tabel 6.9.). Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan jumlah pekerja perempuan sebagai karyawan swasta dan wiraswasta.

Tabel: 6.9. Pesentase Perempuan yang Bekerja di Lembaga Swasta di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator	Tahun	
		2022	2023
1	Jumlah pekerja Perempuan (orang)	124.381	126.994
2	Jumlah pekerja Perempuan di lembaga swasta (orang)	96.671	99.223
3	Persentase Partisipasi Perempuan yang bekerja di Lembaga Swasta (%)	77,72	78,13

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kantor Pengadilan Denpasar, 2024

6.9 Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Budaya hidup sehat terus menerus disosialisasikan di semua sektor di Kota Denpasar. Slogan BERSERI (Bersih, Sehat, Rindang, dan Indah) yang Berwawasan Budaya” merupakan salah satu slogan Pemerintah Kota Denpasar.

Pepatah “hidup bersih pangkal kesehatan” ini acapkali dipublikasikan kepada masyarakat, mulai dari pemasangan tulisan yang dipasang di sekolah-sekolah di Denpasar. Selain itu, budaya hidup sehat tersebut juga disosialisasikan oleh instansi-instansi terkait secara langsung kepada masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi budaya hidup sehat itu yang dituangkan dalam slogan Kota Denpasar diharapkan pemandangan Kota Denpasar menjadi bersih, sehat, rindang, dan indah sehingga warga masyarakat akan merasa nyaman dan sehat.

Kebersihan Kota Denpasar tidak bisa hanya mengandalkan partisipasi masyarakat saja tetapi diperlukan juga bantuan tenaga-tenaga kebersihan yang dengan siap sedia bekerja demi terwujudnya Kota Denpasar yang BERSERI. Data mengenai jumlah tenaga kebersihan yang ada di Kota Denpasar Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.10.

Tabel : 6.10. Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sektor Taman Kota	13	7	21
2	Sektor Lapangan Lumintang	6	3	9
3	Sektor Puputan Badung	1	10	11
4	Sektor Taman Janggan	3	3	6
5	Sektor Penyiraman	29	0	29
6	Sektor Pembibitan	9	1	10
7	Sektor Perawatan	64	2	66
Jumlah		124	26	150

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2024

Pada Tabel 6.10 terlihat bahwa jumlah tenaga kebersihan yang bertugas di pertamanan di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 124 orang orang. Pada sektor penyiraman, sektor perawatan, sektor perompesan, dan tenaga kebersihan dan penyiraman lebih didominasi oleh laki-laki. Tenaga kerja perempuan yang bekerja sebagai petugas kebersihan taman hanya sebesar

17,33%. Hal ini dikarenakan pekerjaan membersihkan taman memerlukan kekuatan fisik yang lebih besar sehingga banyak diminati oleh laki-laki.

Petugas kebersihan di Kota Denpasar terbagi menjadi empat macam yaitu mandor, tenaga kebersihan, tenaga pertamanan dan satgas. Pada Tabel 6.11 terlihat bahwa pada tahun 2023 jumlah petugas kebersihan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,7%. Petugas kebersihan masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 969 orang dari 1527 orang. Petugas kebersihan berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 36,54% dan paling banyak bekerja sebagai tenaga kebersihan.

Tabel : 6.11. Jumlah Petugas Kebersihan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Petugas	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Satgas	44	-	44	43	-	43
Mandor	28	9	37	30	9	39
Tenaga Kebersihan	814	523	1337	772	523	1295
Tenaga Pertamanan	124	26	150	124	26	150
Jumlah	1010	558	1568	969	558	1527

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar, 2024

6.10 Juru Parkir

Juru parkir bertugas mengumpulkan retribusi parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Tarif parkir pada tempat parkir yang demikian biasanya bertarif tetap, tidak tergantung waktu

karena karcis tidak dilengkapi dengan waktu kedatangan dan waktu kendaraan meninggalkan ruang parkir.

Jumlah juru parkir tepi jalan umum di Kota Denpasar lebih didominasi oleh laki-laki. Juru parkir perempuan sangat jarang ditemui. Rata-rata mereka bekerja sebagai juru parkir karena sebagai tulang punggung keluarga atau menggantikan suami yang sedang sakit. Tabel 6.12. dan Tabel 6.13. menyajikan data mengenai jumlah juru parkir yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2023.

Tabel : 6.12. Jumlah Juru Parkir Tepi Jalan Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Kecamatan	Tahun 2023		
	L	P	Jumlah
Denpasar Utara	116	3	119
Denpasar Timur	107	5	112
Denpasar Selatan	94	1	95
Denpasar Barat	93	6	99
Jumlah	410	15	425

Sumber : Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, 2024

Tabel : 6.13. Jumlah Petugas Parkir Gedung dan Pelataran Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Kecamatan	Tahun 2023		
	L	P	Jumlah
Denpasar Utara	123	7	130
Denpasar Timur	148	4	152
Denpasar Selatan	97	1	98
Denpasar Barat	189	4	193
Jumlah	557	16	573

Sumber : Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, 2024

Terdapat 425 orang juru parkir yang bekerja di tepi jalan umum yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Denpasar. Dari jumlah tersebut laki-laki mendominasi yaitu sebesar 96%. Hanya sedikit perempuan yang bekerja sebagai juru parkir di tepi jalan di Kota Denpasar.

Kondisi ini sama dengan jumlah petugas parkir yang bertugas di gedung dan pelataran (Tabel 6.9), dimana laki-laki juga mendominasi sebesar 97,21% dibandingkan petugas perempuan yang hanya sebesar 2,79% . Terdapat 573 orang petugas parkir gedung dan pelataran di Kota Denpasar pada tahun 2023, naik sebesar 3,7% dari tahun sebelumnya. Pekerjaan sebagai juru parkir sepertinya kurang diminati oleh kaum Perempuan di Kota Denpasar karena pekerjaan sebagai juru parkir memang umumnya biasa dilakukan oleh untuk kaum laki-laki.

6.11. Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata Bali telah menunjukkan pemulihan yang luar biasa pasca pandemi COVID-19. Selain itu, Bali juga berhasil membuktikan ketahanan dan daya tariknya sebagai destinasi wisata kelas dunia. Situasi ini memberikan kesegaran etelah sebelumnya pandemi Covid-19 memurukkan ekonomi Bali.

Pariwisata masih menjadi napas Bali. Bergerak pulih pada 2022, sektor pariwisata mendorong kebangkitan perekonomian Bali. Peningkatan wisman ke Bali yang cukup cepat di tahun 2023 berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Bali 2023. Tren pariwisata ke depan yang akan terus meningkat harus dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadukung. Tabel 6.14. menyajikan data mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata di Kota Denpasar Tahun 2023.

Tabel : 6.14. Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Jenis Usaha	2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usaha Rekreasi dan Usaha Pariwisata	182	176	358

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2024

Dilihat dari tabel 6.14, jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha rekreasi dan pariwisata di Kota Denpasar adalah pada tahun 2023 adalah sebanyak 182 orang laki-laki dan 176 orang perempuan. Walaupun tenaga kerja laki-laki berjumlah lebih besar tetapi tidak ada perbedaan signifikan antara jumlah tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan untuk tahun 2023.

Dilihat dari jumlah pemilik usaha akomodasi, jenis usaha yang paling banyak terdapat di Kota Denpasar pada Tahun 2023 adalah restoran sebanyak 618 restoran. Hotel non Bintang ada di urutan kedua sebanyak 516 hotel dan diikuti oleh rumah makan dan villa. Dari 618 buah restoran yang ada di Kota Denpasar, pemiliknya didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 74,27%. Hampir semua jenis akomodasi didominasi oleh kaum laki-laki. Data bisa dilihat pada Tabel 6.15.

Tabel : 6.15. Jumlah Pemilik Usaha Akomodasi di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Jenis Usaha	Tahun 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Hotel Bintang	66	14	80
Hotel Non Bintang	419	97	516
Pondok Wisata	69	12	81
Villa	121	47	168
Restoran	459	159	618
Rumah Makan	370	102	472
Bar	7	1	8
Jumlah	1.448	432	1.943

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2024

Dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap di hotel dan restoran, jumlah tenaga kerja laki-laki masih mendominasi. Terjadi perbedaan yang signifikan antara jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan pada tahun 2023.

Tabel : 6.16. Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restoran Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Jenis Usaha	Tahun 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Hotel	4469	1982	6651
Restoran	3188	2753	5941
Jumlah	7657	4735	12592

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2024

6.12 Pemilik Usaha Salon Kecantikan

Penampilan wajah dan rambut saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Penampilan seseorang sangat menentukan kepercayaan diri. Semakin banyaknya orang-orang yang bekerja akan membutuhkan semakin banyak tempat perawatan wajah dan rambut yaitu salon. Usaha salon kecantikan makin prospektif, karena layanan perawatan kecantikan jadi kebutuhan setiap perempuan dan laki-laki. Hal tersebut menuntut pebisnis meningkatkan layanan, sehingga mampu memuaskan konsumen atau pengguna jasa. Berikut disajikan jumlah salon yang ada di Kota Denpasar tahun 2023.

Tabel : 6.17. Pemilik Usaha Salon Kecantikan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(Orang)	(Orang)	(Orang)
Denpasar Utara	1	23	24
Denpasar Timur	6	29	35
Denpasar Selatan	10	58	68
Denpasar Barat	8	31	39
Jumlah	25	141	166

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, 2024

Tabel 6.17 mencantumkan data mengenai jumlah usaha salon kecantikan yang tersebar di empat kecamatan di Kota Denpasar. Terdapat total 166 salon

yang ada meningkat 10,24% dari tahun sebelumnya yaitu 149 usaha salon kecantikan. Pemilik usaha salon kecantikan tahun 2023 tetap didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 141 orang atau sebesar 84,9%. Usaha salon paling banyak terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 68 salon dan paling sedikit ada di Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 24 salon.

6.13 Tenaga Kerja di Sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Tidak kalah dengan sektor pariwisata, sektor UMKM juga semakin menggeliat bangkit untuk meningkatkan sektor perekonomian yang ada di Kota Denpasar. Sektor UMKM di Kota Denpasar memiliki peranan penting karena merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar disektor pariwisata. Berkembangnya sektor pariwisata juga akan ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi, termasuk UMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah Denpasar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan UMKM di Denpasar mempunyai dampak positif dari segi penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya khususnya di bidang ekonomi dan peningkatan pendapatan domestik regional bruto. Selain itu, aspek pariwisata bisa menumbuhkan jiwa berwirausaha warga Denpasar untuk melakukan kegiatan bisnis yang berbasis kearifan lokal. Berikut disajikan jumlah dan jenis usaha UMKM yang ada di Kota Denpasar Tahun 2023

Tabel: 6.18 Jenis Usaha dan Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin pada UMKM Kota Denpasar 2023

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Jenis Kelamin		
			L	P	Jml
1	Denpasar Utara	1. Kuliner	1718	3188	4906
		2. Industri Makanan Ringan	339	629	968
		3. Industri Kerajinan	170	314	484

		Tangan			
		4. Dagang	678	1259	1937
		5. Jasa	238	440	678
		6. Pertanian	34	62	96
		7. Peternakan	102	188	290
		8. PKL	1133	2103	3236
2	Denpasar Selatan	1. Kuliner	1097	2037	3134
		2. Industri Makanan Ringan	549	1018	1567
		3. Industri Kerajinan Tangan	137	254	391
		4. Dagang	412	763	1175
		5. Jasa	165	305	470
		6. Pertanian	28	50	78
		7. Peternakan	83	152	235
		8. PKL	276	510	786
3	Denpasar Barat	1. Kuliner	1819	3376	5195
		2. Industri Makanan ringan	728	1350	2078
		3. Industri Kerajinan Tangan	146	269	415
		4. Dagang	364	675	1039
		5. Jasa	109	202	311
		6. Pertanian	73	134	207
		7. Peternakan	37	66	103
		8. PKL	336	677	1043
4	Denpasar Timur	1. Kuliner	660	1224	1884
		2. Industri Makanan Ringan	165	306	471

		3. Industri Kerajinan Tangan	83	152	235
		4. Dagang	248	458	706
		5. Jasa	99	183	282
		6. Pertanian	116	213	329
		7. Peternakan	132	244	376
		8. PKL	150	277	427

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, 2024

Dari Tabel 6.18 dapat dilihat bahwa usaha UMKM yang terdiri dari 8 jenis usaha yaitu kuliner, industri makanan ringan, industri kerajinan tangan, dagang, jasa, pertanian, peternakan dan PKL tersebar merata di empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Dari data tersebut terlihat jumlah tenaga kerja UMKM perempuan di semua kecamatan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Hal ini menandakan bahwa kaum perempuan memiliki jiwa wirausaha yang lebih tinggi daripada kaum laki-laki. Jiwa kewirausahaan dapat mendorong suksesnya seseorang terutama pada era globalisasi dan informasi dalam menekuni suatu usaha. Proses kreatif dan inovatif hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa, sikap, kepribadian dan perilaku kewirausahaan. Oleh sebab itu perlu jiwa wirausaha dan bisnis yang kuat agar mampu mengembangkan usahanya yang telah dirintisnya. Selain itu, perlunya informasi dari Dinas UMKM agar tercipta talent-talent baru dalam berwirausaha.

BAB VII SEKTOR PUBLIK

Buku Statistik Gender Kota Denpasar 2024 sebagai lanjutan dari tahun sebelumnya juga menampilkan sektor publik sebagai bab tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengenal dan mengetahui bagaimana laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Denpasar berkiprah di sektor publik. Sektor publik yang dibahas pada bab ini secara garis besar terklasifikasi ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Keterlibatan perempuan berperan pada sektor produktif sepertinya bukan hal baru. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran yang sering pula disebut dengan peran di sektor publik. Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan publik memang telah mengalami peningkatan namun partisipasi yang diharapkan seperti keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat lokal, maupun nasional masih terhitung rendah.

Sektor publik lebih identik dengan karakter maskulin yang tegas, berani, cekatan dan cepat dalam mengambil keputusan, sehingga dikatakan bahwa sektor publik merupakan domain laki-laki. Kekuasaan publik identik dengan persaingan dan konflik dalam penyelesaian masalah, sedangkan karakteristik unggul dari feminitas berupa kesabaran, kejujuran dan kesetiaan dianggap tidak perlu dan tidak memiliki karakteristik unggul.

Kepemimpinan perempuan di sektor publik sebagai pengambil kebijakan publik sebenarnya sangat penting, terutama bagi lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk menyusun kebijakan yang mempromosikan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan adil untuk semua. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marginalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal.

7.1 Eksekutif

7.1.1 ASN Menurut Golongan Kepangkatan

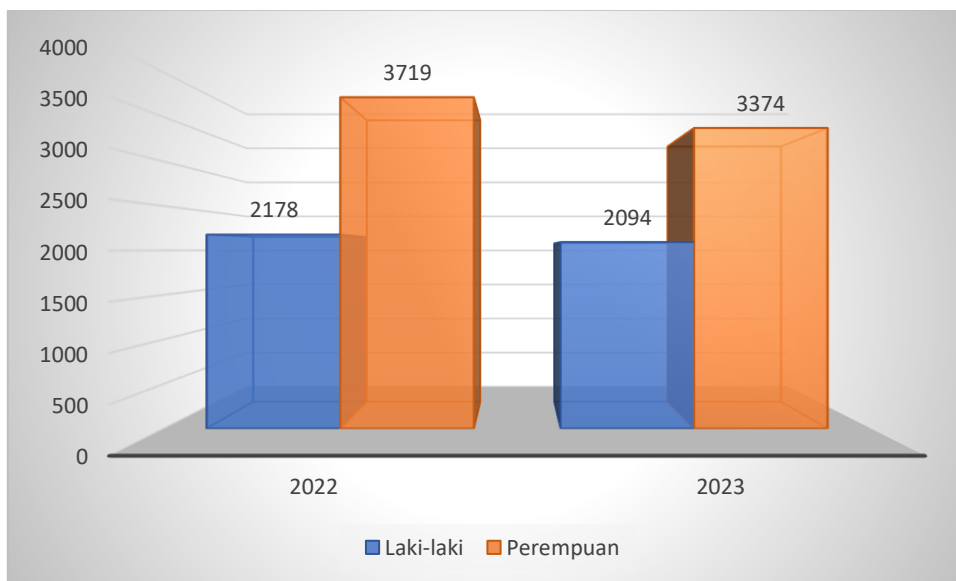
Eksekutif merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan undang-undang yang diamanatkan oleh Montesquieu selain lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif yang familiar disebut dengan pemerintah merupakan lembaga negara yang paling pokok dan paling mendapat perhatian publik dalam berjalannya pemerintahan di Negara Indonesia. Kinerja eksekutif dapat dinilai dari beberapa faktor yang mudah dilihat dan diukur yaitu dari keadaan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain yang semuanya itu dimaksudkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Guna mengetahui peran serta laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar dalam lembaga eksekutif dapat dilihat pada paparan berikut.

Tabel : 7.1. Komposisi ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Gol	ASN					
	Tahun 2022			Tahun 2023		
	L	P	L+P (Orang)	L	P	L+P (Orang)
PNS						
I	38	29	67	23	27	50
II	548	334	882	487	275	762
III	961	1792	2753	930	1706	2690
IV	393	805	1198	328	683	1011
PPPK						
IX	238	759	997	326	683	1334
Jumlah	2178	3719	5897	2094	3753	5847

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2024

Pada Tabel 7.1 di atas menyajikan data terpilah mengenai komposisi ASN yang terbagi menjadi PNS dan PPPK. Tahun 2023 secara umum jumlah PNS yang berjenis kelamin perempuan menurun jumlahnya sebesar 9,9% dari tahun sebelumnya tetapi tetap lebih besar dari jumlah PNS laki-laki. Dari total PNS yang berjumlah 4513 orang, 59,62% berjenis kelamin perempuan. Demikian pula untuk jumlah PPPK berjenis kelamin perempuan juga lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Jika dilihat dari golongan kepangkatan, pada tahun 2023 hampir di semua golongan didominasi oleh kaum perempuan kecuali Gol II. Dan secara keseluruhan jumlah ASN pada tahun 2023 didominasi oleh kaum Perempuan yaitu sebesar 57,70%.



Gambar 7.1 Persentase ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

7.1.2 Pegawai Non ASN

Secara umum jumlah pegawai Non ASN pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah pegawai Non-ASN laki-laki tetap mendominasi sebanyak 4.600 orang lebih banyak dibandingkan perempuan sebanyak 3.138 orang. Jumlah pegawai Non ASN perempuan pada tahun 2023 terlihat mengalami penurunan sebesar 12,88%. Kondisi ini disebabkan pekerjaan yang ditawarkan lebih banyak diperuntukkan bagi laki-laki. Keadaan ini perlu menjadi pemikiran bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan agar tidak terjadi ketimpangan gender.

Tabel : 7.2. Jumlah Pegawai Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Pegawai Non ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2022	4709	3602	8311
2023	4600	3138	7738

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2024

7.1.3 Pegawai yang Mengikuti Diklat

Peranan sumberdaya manusia adalah sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dan fundamental dalam organisasi. Sumberdaya manusia merupakan *human capital* dan *intellectual capital* yang akan menentukan efektivitas dari faktor-faktor lain dalam organisasi seperti modal, peralatan, teknologi organisasi, dan struktur. Sehingga dapat dikatakan sumberdaya manusia merupakan aset yang paling berharga dan menentukan dalam organisasi.

Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan sumber ASN yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kompetensi

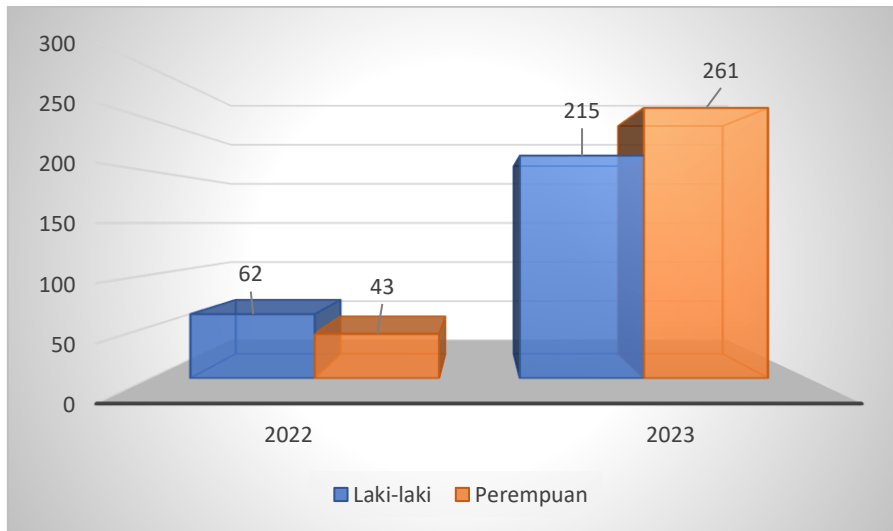
sumberdaya manusia yang mencakup peningkatan pengetahuan, peningkatan keahlian dan keterampilan, dan perubahan sikap dan perilaku serta koreksi terhadap kelemahan kinerja. Pada birokrasi pemerintah, pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk pengembangan atau peningkatan kualitas SDM ASN telah dilembagakan secara formal dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan ASN, yang secara formal diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini Diklat ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Berikut disajikan data jumlah ASN yang pernah mengikuti Diklat pada Tahun 2023 di Kota Denpasar.

Tabel : 7.3. Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023

Tahun	ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2022	62	43	105
2023	215	261	476

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2024

Pada Tabel 7.3 terlihat bahwa secara keseluruhan jumlah ASN yang sudah mengikuti Diklat di Kota Denpasar pada tahun 2023 mengalami peningkatan baik yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tetapi lebih terlihat peningkatan yang sangat tajam pada ASN perempuan yang mengikuti Diklat. Terjadi peningkatan sebesar 83,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa ASN berjenis kelamin perempuan telah diberi kesempatan yang lebih besar untuk dapat mengembangkan potensi diri dan ketrampilannya. Data berupa gambar disajikan pada Gambar 7.2



Gambar 7.2 Persentase ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023

Terkait dengan kepemimpinan, terdapat Diklat Kepemimpinan / Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Diklat PIM). Diklat PIM merupakan proses penyelenggaraan belajar-mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat PIM terdiri atas Diklat PIM Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV. Berikut disajikan data mengenai jumlah pejabat di Kota Denpasar yang sudah mengikuti Diklat PIM.

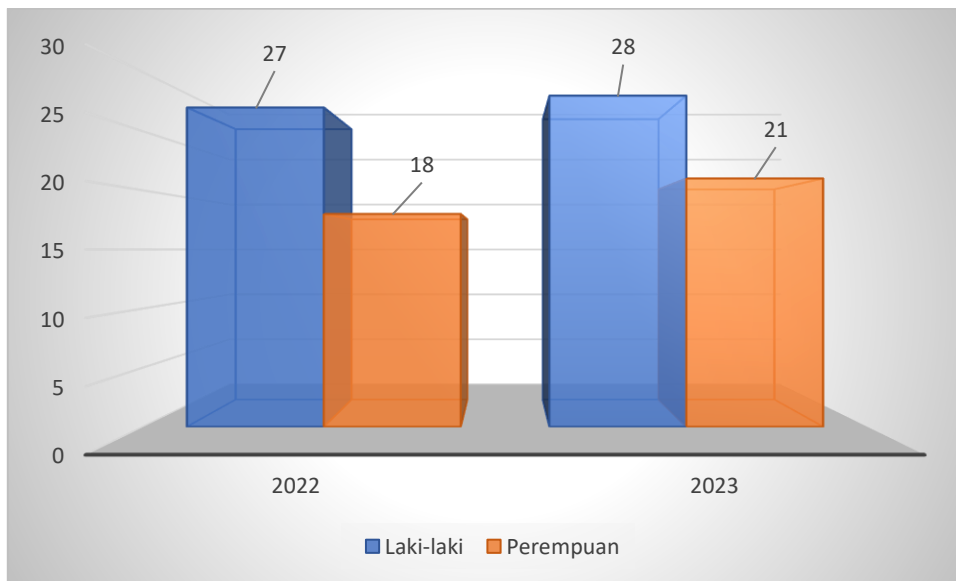
Tabel : 7.4. Jumlah Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

No	Nama Diklat Pejabat	Tahun					
		2022			2023		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PIM. TK. I						
2	PIM. TK. II	3	2	5	5	0	5
3	PIM. TK. III	7	3	10	11	4	15

4	PIM. TK. IV	17	13	30	12	17	29
Jumlah		27	18	45	28	21	49

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2024

Pada Tabel 7.4 terlihat bahwa terdapat 49 orang pejabat di Kota Denpasar yang telah mengikuti Diklat PIM pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut 21 orang merupakan pejabat yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini berarti jumlah pejabat perempuan yang mengikuti Diklat PIM tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 14,28% dari tahun sebelumnya. Jumlah selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 7.3 Persentase Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023

7.1.4 ASN Berdasarkan Unit Kerja

Jumlah ASN berdasarkan unit kerja di Kota Denpasar terbagi menjadi empat yaitu yang bertugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). OPD merupakan perangkat pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. OPD sebagai pelaksana fungsi eksekutif saling berkoordinasi agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Taman Kanak-kanak (TK) merupakan jenjang pendidikan dalam bentuk formal bagi anak-anak

usia dini. Kurikulumnya lebih menekankan pada rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sebagai upaya untuk menyiapkan mereka menyongsong pendidikan lebih lanjut. Sekolah Dasar sebagai jenjang paling dasar pada jenjang pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu mulai kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam). Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah dinyatakan lulus sekolah dasar atau sederajat. SMP ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun yaitu kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga). Data jumlah ASN berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Tabel 7.5.

Tabel : 7.5. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

No	Unit Kerja	2022			2023		
		L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
1	Organisasi Perangkat Daerah Kota Denpasar	1454	1745	3199	1343	1673	3016
2	Taman Kanak-kanak	0	39	39	0	33	33
3	Sekolah Dasar	530	1583	2113	541	1645	2186
4	Sekolah Menengah Pertama	194	352	546	210	402	612
Jumlah		2178	3719	5897	2094	3753	5847

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2024

Pada tabel terlihat secara keseluruhan pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah ASN pada unit kerja untuk perempuan sebanyak 0,9% dan penurunan terjadi pada unit kerja laki-laki sebesar 4%, Di setiap unit kerja terlihat didominasi oleh ASN perempuan dan terlihat juga ketimpangan gender pada unit kerja Taman Kanak-kanak, dimana tidak ada ASN laki-laki. Taman Kanak-kanak lebih diminati oleh kaum perempuan meskipun terjadi penurunan jumlah ASN.

7.1.5 ASN Menurut Eselon

ASN di Kota Denpasar terbagi menjadi tujuh bagian yaitu eselon IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb dan Non eselon. Pada Tabel 7.6 terlihat bahwa pada tahun 2023 ada beberapa eselon yang didominasi oleh ASN perempuan yaitu pada eselon IVb dan non eselon sedangkan sisanya didominasi oleh ASN laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peluang lebih sedikit dikarenakan prinsip-prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan belum semua terpenuhi.

Tabel : 7.6. Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

No	Eselon	Tahun					
		2022			2023		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	II.a	1	0	1	1	0	1
2	II.b	29	8	37	30	8	38
3	III.a	34	18	52	29	25	54
4	III.b	62	57	119	64	55	119
5	IV.a	73	60	133	74	66	140
6	IV.b	43	54	97	44	55	99
7	Non Eselon	1936	3522	5458	1852	3544	5396
Jumlah		2178	3719	5897	2094	3753	5847

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2024

Berdasarkan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Denpasar pada tahun 2023, perempuan dengan pangkat penata muda berjumlah paling banyak yaitu sebesar 37,2% naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 33,6%. Pangkat yang mengalami kenaikan terjadi juga pada Penata Muda Tk 1 yaitu naik menjadi 10,8% dari tahun sebelumnya sebesar 9,1%. Penurunan terjadi pada pangkat Pembina Tk 1 yang turun menjadi 7,8%.

Sedangkan partisipasi perempuan yang paling kecil terdapat pada jabatan Pembina Utama yang hanya sebesar 0,1% saja. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 7.7.

Tabel : 7.7. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

No	Pangkat	Tahun			
		2022		2023	
		Perempuan	(%)	Perempuan	(%)
1	Juru Muda	0	0	0	0
2	Juru Muda Tk.I	0	0	0	0
3	Juru	14	0,4	13	0,3
4	Juru Tk I	15	0,4	14	0,4
5	Pengatur Muda	17	0,5	16	0,4
6	Pengatur Muda Tk 1	27	0,7	19	0,5
7	Pengatur	121	3,3	66	1,8
8	Pengatur Tk I	169	4,5	174	4,6
9	Penata Muda	1251	33,6	1396	37,2
10	Penata Muda Tk I	339	9,1	404	10,8
11	Penata	354	9,5	355	9,5
12	Penata Tk.I	607	16,3	613	16,3
13	Pembina	253	6,8	209	5,6
14	Pembina Tk I	436	11,7	293	7,8
15	Pembina Utama Muda	107	2,9	162	4,3
16	Pembina Utama Madya	7	0,2	16	0,4
17	Pembina Utama	2	0,1	3	0,1
Jumlah		3719	100	3753	100

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2024

7.2 Legislatif

Lembaga Legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Di negara Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu.

DPR sendiri berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan untuk yang berada di tingkat kota/kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten/kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan 5 tahun. DPD adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. DPD memiliki jumlah yang tidak sama di setiap provinsi tetapi paling banyak empat orang dan memiliki masa jabatan yaitu lima tahun. Sedangkan MPR adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Adapun masa jabatan anggotanya adalah selama 5 tahun. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi yang memiliki kedudukan tertinggi di negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan dan diganti dengan lembaga negara.

7.2.1 Keanggotaan DPRD

Tabel 7.9 di bawah menyajikan data terpilih mengenai jumlah keanggotaan DPRD Kota Denpasar menurut partai politik Tahun 2019-2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

Pada Tabel 7.9 tercatat ada 7 (tujuh) partai politik yang berhasil mengantarkan kadernya menduduki kursi DPRD Kota Denpasar. Ketujuh partai politik dengan perolehan kursinya masing-masing adalah Gerindra (4 kursi), PDIP (22 kursi), Golkar (8 kursi), Nasdem (3 kursi), PSI (2 kursi), Hanura (2 kursi),

dan Demokrat (4 kursi). Data yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum tersebut menunjukkan kesenjangan gender yang amat sangat signifikan. Dikarenakan dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang ternyata hanya ada 4 orang perempuan saja dan berasal dari PDIP, Demokrat, Golkar, dan PSI yang bisa menjadi anggota DPRD Kota Denpasar. Kondisi seperti ini perlu disikapi mengingat dalam negara demokrasi, isu kesetaraan gender seharusnya lebih dimunculkan dan tidak sekadar retorika melainkan aksi nyata. Peran partai politik sebagai instrumen sistem demokrasi sudah semestinya mengambil langkah tegas dalam melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang posisi mereka terkait isu kesetaraan gender. Proses sosialisasi dan edukasi semacam itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya langkah konkret kaderisasi baik anggota, caleg maupun upaya meloloskan perempuan dalam posisi strategis yang notabena lebih sulit meraih sektor publik akibat dominasi sistem patriarki.

Tabel : 7.8. Jumlah Anggota DPRD Kota Denpasar Periode 2019-2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Partai	Periode 2019-2024		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	0	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4	0	4
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	20	2	22
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	7	1	8
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3	0	3
6	Partai Gerakan Perubahan (Garuda)	0	0	0
7	Partai Berkarya	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	0	0	0
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0	0
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	1	2
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	0	0	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	0	2
14	Partai Demokrat	4	0	4

15	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0	0
JUMLAH		41	4	45

Sumber : DPRD Kota Denpasar, 2024

7.2.2 Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis yang mengedepankan dasar negara tersebut serta kebijakan tertentu sebagai penguat rasa persatuan. Partai politik telah menjadi bagian utama dari kancah perpolitikan hampir di setiap negara termasuk di Indonesia.

Partai politik memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan di negara demokrasi. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, partai politik haruslah memegang teguh dan menerapkan sistem politik berintegritas. Terdapat lima fungsi partai politik di Indonesia berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008 yaitu sebagai Sarana pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kesejahteraan Masyarakat, menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, tempat WNI dapat berpartisipasi dalam politik serta merekrut untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan hal tersebut keterlibatan perempuan saat ini juga tampak pada pengurus partai politik yang tersebar di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Kota Denpasar. Tabel 7.9 menyajikan data jumlah pimpinan partai politik di Kota Denpasar Tahun 2023.

Tabel : 7.9. Jumlah Pimpinan Partai Politik (Parpol) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021-2023

No		Tahun 2023		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pimpinan Partai politik	16	2	18
JUMLAH		16	2	18

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2024

Dari Tabel 7.9. dapat dilihat di Kota Denpasar pada tahun 2023 kaum perempuan sudah ada yang menjadi pimpinan partai politik yaitu sebanyak dua orang atau sekitar 11%. Walaupun jumlahnya masih tergolong relatif kecil tetapi hal ini merupakan awal yang baik untuk tahun-tahun berikutnya bahwa Perempuan ternyata tidak kalah dari laki-laki menjadi seorang pemimpin partai. Diharapkan akan terus bermunculan perempuan-perempuan lain yang bisa menjadi pemimpin bagi partainya masing-masing. Sehingga aspirasi kaum Perempuan di negeri ini bisa lebih diperjuangkan dan didengar oleh seluruh rakyat Indonesia.

7.2.3 Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan suatu lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk dan bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ini diatur di dalam bab IV Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada Tabel 7.11 menunjukkan jumlah anggota Bawaslu, Pileg, Pilpres dan Pilkada di Kota Denpasar Tahun 2023. Jumlah anggota perempuan sebanyak 2 orang dibandingkan dengan laki-laki sebanyak 3 orang. Anggota Bawaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan di Kota Denpasar kaum laki-laki mendominasi sebanyak 23 orang (53,49%) sedangkan Perempuan hanya sebanyak 20 orang atau sebesar 46,51%.

Tabel : 7.10. Jumlah Anggota Bawaslu Pileg, Pilpres dan Pilkada Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar	3	2	5
Jumlah		3	2	5

Sumber: Bawaslu Kota Denpasar, 2024

Tabel : 7.11. Jumlah Anggota Bawaslu dan Pengawas Kelurahan Desa Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Utara PKD	7	4	11
2	Denpasar Timur PKD	3	8	11
3	Denpasar Selatan PKD	8	2	10
4	Denpasar Barat PKD	5	6	11
Jumlah		23	20	43

Sumber: Bawaslu Kota Denpasar, 2024

7.2.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Jumlah anggota KPU di Kota Denpasar sebanyak 5 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini menunjukkan 40% sudah terwakilkan oleh perempuan.

Tabel : 7.12. Jumlah Anggota KPU Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Periode 2021-2023

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I Wayan Arsa Jaya	1	0	1
2	Dewa Ayu Sekar Anggaraeni	0	1	1
3	Sibro Mulissy	1	0	1
4	I Made Windia	1	0	1
5	Ni Ketut Dharmayanti Laksmi	0	1	1
Jumlah		3	2	5

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2024

7.2.5 Panitia Pemilihan Kecamatan

PPK adalah lembaga penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pilukada, PPK bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah semestinya setiap penyelenggaraan pemilu harus memiliki kredibilitas yang terpercaya, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hendaknya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam menyelenggarakan

pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas efisiensi dan efektivitas. Eksistensi institusi penyelenggaraan pemilihan umum menjadi salah satu aspek yang penting yang cukup mempengaruhi dinamika pemilihan umum. Netralitas PPK memang menjadi syarat penting bagi penyelenggaraan pemilihan umum, selanjutnya menyusun soal integritas, kapasitas dan profesionalisme. PPK dalam kerjanya dihadapkan pada proses kerja yang rawan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik. Berikut merupakan data jumlah anggota PPK di Kota Denpasar Tahun 2023.

Tabel : 7.13. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Kota	Jumlah PPK (Orang)		Total
		Laki-laki	Perempuan	
	Denpasar	17	3	20
	Total	17	3	20

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2024

Berdasarkan Tabel 7.13. dapat diketahui jumlah PPK di Kota Denpasar pada tahun 2023. Secara keseluruhan jumlah total anggota PPK sebanyak 20 orang yang terdiri atas 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Disini terlihat keterlibatan perempuan masih dibawah 30% yaitu sebesar 15%. Tentunya diharapkan jumlah ini akan dapat terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

7.2.6 Panitia Pemungutan Suara

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. PPS merupakan tulang punggung demokrasi karena merekalah basis utama atas integritas hasil pemilu. PPS juga memiliki peran krusial dalam penetapan daftar pemilih tetap sampai pemungutan suara pada tingkat TPS. Integritas PPS sangat penting secara politis karena terkait erat dengan kepercayaan pemilih terhadap pemilu yang merupakan bagian dari

proses politik. Tugas, wewenang dan kewajibannya telah diatur berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada tabel 7.14. terlihat bahwa terjadi ketimpangan gender yang signifikan di setiap kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 129 orang anggota PPS pada tahun 2023 yang terdiri atas 104 orang laki-laki dan 25 orang perempuan atau sebesar 19,4%. Kaum perempuan lebih cenderung kecil untuk terlibat dalam PPS karena diperlukan fisik yang lebih besar untuk tugas ini.

Tabel: 7.14. Jumlah PPS Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Kota	Jumlah PPS Orang)		Total
		Laki-laki	Perempuan	
	Denpasar	104	25	129
	Total	104	25	129

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2024

7.2.7 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

Salah satu prinsip dan prasyarat untuk terselenggaranya pemilu/pemilihan yang demokratis adalah warga negara terdaftar sebagai Pemilih tanpa diskriminasi dalam artian luas. Jaminan pendaftaran Pemilih tanpa diskriminasi termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui data dirinya sebagai Pemilih secara mudah, termasuk untuk memperbaiki data dirinya apabila terdapat kekeliruan atau perubahan elemen data. Oleh sebab itu tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Umum. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih menentukan tahapan Pemilu selanjutnya. Mulai dari penentuan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, kampanye, rekapitulasi hasil suara, dan lain sebagainya. Jika hasil pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan Pemilu selanjutnya juga akan sangat terganggu.

Guna memastikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tersusun dengan baik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo memastikan kerja Pantarlih sesuai regulasi dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit). Penting bagi Pantarlih untuk menggunakan prinsip kerja agar menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara. Prinsip kerja tersebut antara lain: akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Pantarlih wajib melaksanakan kegiatan Coklit terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel dengan berpedoman pada buku kerja, sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) mengemban pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW/nama lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara. Tabel 7.15. – Tabel 7.18. berikut menyajikan data mengenai jumlah pantarlih yang ada di empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar.

Tabel: 7.15. Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dauh Puri	11	13	24
2.	Dauh Puri Kauh	29	11	40
3.	Dauh Puri Kangin	7	6	13
4.	Dauh Puri Klod	12	25	37
5.	Padangsambian	56	28	84
6.	Padangsambian Kaja	32	18	50
7.	Padangsambian Kelod	41	19	60
8.	Pemecutan	53	13	66
9.	Pemecutan Kelod	61	34	95
10.	Tegal Harum	21	16	37
11.	Tegal Kerta	22	23	45
	Total	345	206	551

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2024

Tabel: 7.16. Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dangin Puri Kaja	29	12	41
2.	Dangin Puri Kangin	22	6	28
3.	Dangin Puri Kauh	12	10	22
4.	Dauh Puri Kaja	23	30	53
5.	Peguyangan	17	27	44
6.	Peguyangan Kaja	23	5	28
7.	Peguyangan Kangin	28	25	53
8.	Pemecutan Kaja	49	29	78
9.	Tonja	35	8	43
10.	Ubung	16	10	26
11.	Ubung Kaja	40	25	65
	Total	294	187	481

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2024

Tabel: 7.17 Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dangin Puri	12	16	28
2.	Dangin Puri Kelod	16	12	28
3.	Kesiman	26	14	40
4.	Kesiman Kertalangu	41	12	53
5.	Kesiman Petilan	23	10	33
6.	Penatih	23	10	33
7.	Penatih Dangin Puri	9	13	22
8.	Sumerta	15	9	24
9.	Sumerta Kaja	15	8	23
10.	Sumerta Kauh	11	9	20
11.	Sumerta Kelod	17	21	38
	Total	208	134	342

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2024

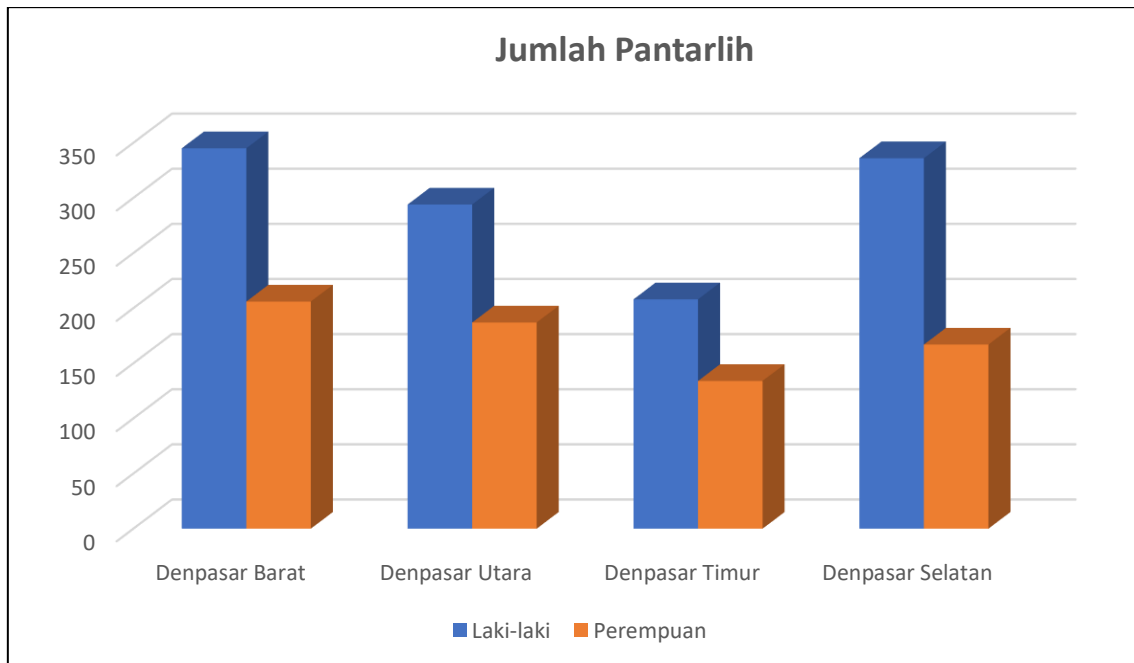
Tabel: 7.18 Jumlah Pantarlih di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Panjer	50	15	65
2.	Pedungan	55	14	69
3.	Pemogan	57	27	84
4.	Renon	19	14	33
5.	Sanur	20	8	28
6.	Sanur Kaja	16	7	23

7.	Sanur Kauh	29	5	34
8.	Serangan	6	6	12
9.	Sesetan	57	50	107
10.	Sidakarya	27	21	48
	Total	336	167	503

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2023

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih. Pantarlih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Dapat dilihat di masing-masing kecamatan di Kota Denpasar jumlah anggota pantarlih seluruhnya masih didominasi oleh kaum laki-laki. Jumlah anggota pantarlih perempuan di Kecamatan Denpasar Barat adalah sebesar 37,4%, di Kecamatan Denpasar Utara sebesar 38,9%, di Kecamatan Denpasar Timur dan Selatan berturut-turut sebesar 39,2% dan 33,2%.



Gambar 7.4. Jumlah Pantarlih di Kota Denpasar Tahun 2023

7.3 Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif merupakan lembaga yang bertugas mengawal dan memantau pelaksanaan perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut *adjudication function*. Fungsi dari yudikatif adalah sebagai lembaga pengawal dan pemantau jalannya roda pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuannya. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Tabel 7.19. menyajikan data mengenai jumlah penegak hukum di Kota Denpasar Tahun 2023.

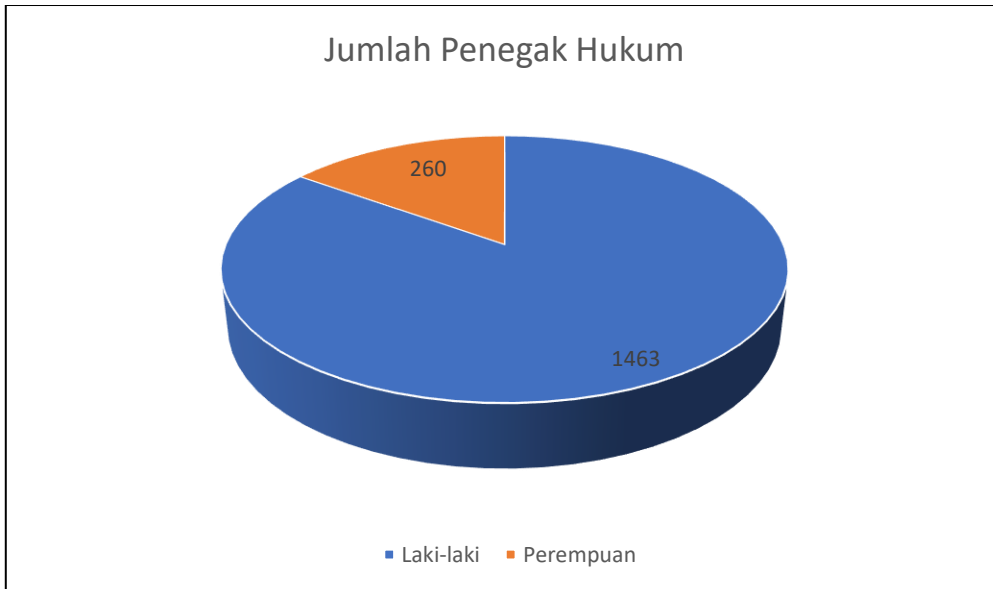
Tabel: 7.19 Persentase Profesi Sektor Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

NO.	Profesi	Jenis Kelamin				JUMLAH
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	
1	Hakim	12	0,8	8	3,1	20
2	Jaksa	15	1,0	21	8,1	36
3	Polisi	1142	78,1	65	25	1207
4	Advokat	186	12,7	59	22,7	245
5	Notaris	108	7,4	107	41,1	215
Jumlah		1463	100	260	100	1723

Sumber : PPA Polresta Denpasar 2024 , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar 2024, Kantor Pengadilan Kota Denpasar 2024

Penegak hukum terdiri dari lima profesi yaitu sebagai hakim, jaksa, polisi, advokat dan notaris. Pada tabel 7.16 terlihat bahwa secara keseluruhan jumlah perempuan dan laki-laki yang berprofesi sebagai penegak hukum di Kota Denpasar memiliki jumlah yang terpaut cukup besar. Jumlah penegak hukum yang berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 15% dari jumlah keseluruhan.

Jumlah perempuan sebagai penegak hukum di Kota Denpasar yang paling banyak adalah sebagai notaris yaitu sebanyak 107 orang dan peringkat kedua terbanyak adalah sebagai polisi. Dapat dikatakan hingga saat ini profesi penegak hukum masih didominasi oleh laki-laki dan diharapkan akan bertambah lagi perempuan-perempuan perkasa yang tertarik terjun di bidang penegak hukum di Kota Denpasar.



Gambar 7.5. Jumlah Penegak Hukum di Kota Denpasar Tahun 2023

BAB VIII LAIN-LAIN

8.1 Kekerasan

Pada zaman era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wacana penegakkan hak asasi manusia sudah demikian berkembang, namun menyangkut stigmasi terhadap seksualitas perempuan, sepertinya masih kuat dan berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk dapat mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu peristiwa realitas kehidupan sosial. semuanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat dimana kekerasan berlangsung adalah sebagai wujud atau manifestasi dari nilai patriarki yang berbeperan sebagai fakta sosial, dimana nilai tersebut merebak dalam struktur sosial masyarakat dan mereduksi peran dan kedudukan perempuan secara wajar, sehingga perempuan berada pada titik rendah (nadir). Pandangan demikian berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan atau memproduksi pengetahuan yang tidak adil tentang peran dan kedudukan perempuan.

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak. UNICEF mendefinisikan 'perlindungan anak' sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti

sunat perempuan dan perkawinan anak. Dalam konteks tersebut jelas bahwa kekerasan anak tercermin dalam berbagai aspek terkait perlindungan anak sesuai dengan definisi dari UNICEF.

Tabel : 8.1. Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Korban Kekerasan	Anak Perempuan	Anak Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2022	167	83	166	416
2023	86	115	135	344

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2024

Pada Tabel 8.1 terjadi penurunan korban kekerasan untuk anak perempuan dan perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Terdapat 166 orang pada kasus kekerasan perempuan di tahun 2022 dan 135 orang pada tahun 2023. Untuk kasus korban kekerasan pada anak perempuan mengalami penurunan sebesar 48,50% dan anak laki-laki meningkat sebesar 38,55% dari tahun 2022 sampai tahun 2023.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan pada perempuan ini tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, namun terdapat jenis kekerasan lainnya, yakni: 1). Kekerasan emosional merupakan tindakan yang menyebabkan korban ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain tindakan berupa cacian dan makian, tanda perilaku kasar pada perempuan dalam rumah tangga yang menyerang psikis ini juga berupa pelarangan, pemaksaan, dan isolasi social; 2). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindakan yang termasuk pada kekerasan fisik meliputi menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya; 3). Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga

umumnya adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual. Perlu diketahui, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki oleh istri juga termasuk dalam kekerasan seksual; 4). Kekerasan ekonomi dimana ini juga biasa disebut dengan kekerasan penelantaran rumah tangga. Jenis kekerasan ini berhubungan dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Tindakan kekerasan ini dapat berupa tidak memberikan nafkah, membatasi finansial korban dengan tidak wajar, atau bahkan menguasai penghasilan pasangan sepenuhnya.

Pada Tabel 8.2 terlihat bahwa bentuk kekerasan psikis (KDRT) menduduki posisi teratas, namun mengalami penurunan sebesar 14,29% dari tahun 2022-2023. Tindakan kekerasan psikis umumnya sulit untuk dilihat. Seseorang yang menjadi korban pun kerap tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban.

Tabel : 8.2. Rekapitulasi Penanganan Kasus Kekerasan di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023

Bentuk Kekerasan	2022			2023		
	Anak Perempuan	Anak laki-laki	Perempuan	Anak Perempuan	Anak laki-laki	Perempuan
Kekerasan fisik (KDRT)	18	15	35	4	5	23
Kekerasan fisik (lainnya)	5	3	2	3	4	5
Kekerasan psikis (KDRT)	22	17	42	4	9	36
Kekerasan psikis (lainnya)	7	3	4	4	15	6
Kekerasan seksual (KDRT)	8	0	6	4	1	3
Kekerasan seksual (lainnya)	19	0	2	15	13	2
Penelantaran	33	16	25	13	11	16
TPPO	1	0	0	0	0	0
ABH	4	5	-	0	0	-
Perkawinan anak	0	0	-	1	1	-
Perebutan kuasa asuh anak	29	13	7	13	19	0
Kasus lainnya	21	11	43	25	37	44

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2024

World Health Organization (WHO) memaparkan bahwa satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun seksual, yang dilakukan oleh pasangannya. Artinya, sekitar 30 persen perempuan pernah mengalami peristiwa tak menyenangkan itu. Jika dilihat dari persentase korban kekerasan menurut jenis kelamin, pada tahun 2022 dan tahun 2023 lebih banyak terjadi pada perempuan. Pada tahun 2022 sebanyak 80% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dimana sebanyak 64,24%.

Tabel : 8.3. Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
2022	20	80
2023	35,76	64,24

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2024

Jenis kekerasan terhadap anak biasanya menyangkut kekerasan seksual dan psikis. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain. Selanjutnya kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain.

Jika dilihat dari persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Denpasar pada 2 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Untuk anak laki-laki terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 19,95% menjadi 33,43%. Untuk anak perempuan mengalami penurunan dari 40,14% menjadi 25%. Untuk perempuan mengalami penurunan dari 39,90% menjadi

39,24% sedangkan kasus kekerasan pada laki-laki terjadi pada tahun 2023 sebesar 2,33%.

Tabel : 8.4. Persentase Korban Kekerasan yang Ditangani oleh UPTD PPA Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Anak Laki-laki (%)	Anak Perempuan (%)	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
2022	19,95	40,14	-	39,90
2023	33,43	25	2,33	39,24

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2024

Secara keseluruhan jenis kasus yang ditangani UPTD PPA Kota Denpasar pada tahun 2023 sudah mengalami penurunan sebesar 17,31% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 KDRT (psikis) menduduki posisi tertinggi, sedangkan pada tahun 2023 kekerasan (fisik, psikis, seksual) menduduki posisi tertinggi.

Tabel : 8.5. Jenis Kasus yang Ditangani UPTD PPA Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Jenis KDRT	2022	2023
KDRT (Fisik)	64	32
KDRT (Psikis)	81	49
KDRT (Seksual)	14	8
KDRT (Penelantaran)	74	40
Kekerasan (Fisik, Psikis, Seksual)	45	67
Tindak Pidana Perdagangan Orang	1	0
Anak Berkonflik Hukum	9	0
Perkawinan Anak	0	2
Perebutan Kuasa Asuh	49	32

Kasus lainnya	75	114
Jumlah	416	344

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2024

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memiliki hotline layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08-111-129-129 sehingga masyarakat yang melihat, mendengar dan mengetahui adanya tindak kekerasan di sekeliling mereka bisa melapor ke kontak layanan tersebut. Banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari Layanan SAPA129, sehingga masyarakat yang menjadi korban kekerasan dapat segera ditangani. Selain Layanan SAPA129 masyarakat ataupun korban juga dapat melapor ke Unit Pelaksana Teknis Daerah - Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat seperti P2TP2A, dan kepolisian.

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Kota Denpasar pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,31%, yang terdiri dari penanganan untuk korban anak perempuan anak laki-laki, laki-laki dan perempuan.

Tabel : 8.6. Jumlah Korban yang Ditangani UPTD PPA Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Korban Kekerasan	Tahun	
	2022	2023
Perempuan	166	135
Laki-laki	-	8
Anak Perempuan	167	86
Anak Laki-laki	83	115
Jumlah	416	344

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2024

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga dibutuhkan strategi pencegahan dan penanganan yang serius dan komprehensif oleh negara. TPPO merupakan

setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. TPPO juga merupakan kejahatan pidana yang berdampak pada laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap terjadi diseluruh Indonesia. Mereka dieksploitasi dalam berbagai jenis sektor termasuk diantaranya pertanian, konstruksi, pariwisata, pekerjaan domestik, industri hiburan dan pekerjaan seks, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan lainnya. Orang-orang dapat diperdagangkan baik antar lintas batas negara maupun antar provinsi dalam suatu negara. Korban perdagangan orang dapat beragam baik dalam hal usia, asal wilayah atau latar belakang etnis, dan pendidikan. Tetapi terdapat sebuah kemiripan karakteristik yang cenderung dimiliki para korban yakni bentuk kerentanan dan upaya isolasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan di Indonesia antara lain adalah kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan gender, dan celah kemudahan pemalsuan dokumen (<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/02e85-petunjuk-teknis-pendataan-dan-pelaporan-tpo.pdf>).

Berdasarkan Tabel 8.7 terlihat bahwa pada tahun 2023 tidak terjadi TPPO jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan menggunakan pendekatan strategis berbasis pilar “3P + Partnership” yaitu: Prevention (Pencegahan), Prosecution (Penuntutan), Protection (Perlindungan), Partnership (Kemitraan), organisasi internasional IOM (International Organization for Migration) bersama dengan mitra kerja yang terdiri dari lembaga pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), institusi akademik, dan masyarakat umum bersinergi memberantas TPPO secara efektif dan efisien.

Tabel : 8.7. Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Anak Perempuan	Anak Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2022	1	0	0	1
2023	0	0	0	0

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2024

8.2 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sementara pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belaskasihan dari orang lain.

Persoalan gelandangan dan pengemis telah menjadi isu nasional kesejahteraan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang memberikan ruang bagi terbukanya pemenuhan kesejahteraan tak terkecuali gelandangan dan pengemis (Yusrizal & Asmara, 2020).

Tabel : 8.8. Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	2023		
	L	P	Jumlah
0-4 Tahun	2	2	4
5-9 Tahun	2	2	4
10-14 Tahun	10	-	10
15-18 Tahun	6	1	7
19 Tahun Keatas	92	20	112
Jumlah	112	25	137

Sumber : Dinas Sosial Kota Denpasar, 2024

Pada Tabel 8.8 terlihat bahwa jumlah gepeng di Kota Denpasar didominasi umur 19 tahun keatas, terdiri atas 112 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Jika dibandingkan pada tahun 2022 jumlah gepeng sebanyak 219 orang, dimana

pada tahun 2023 sudah mengalami penurunan menjadi 137 orang. Gepeng yang ada di Kota Denpasar didominasi berasal dari luar Denpasar.

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bali telah memulangkan sebanyak 344 orang gelandangan dari Bali ke daerah asalnya selama tahun 2023 lalu. Di antaranya 246 orang ke Jawa Timur dan 98 orang ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Dinsos P3A Provinsi Bali telah memfasilitasi transportasi dan konsumsi saat gelandangan ini diberangkatkan. Pendanaannya pun tergantung pada tujuan keberangkatannya yang juga dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan. Antisipasi sudah dilakukan secara intern untuk pembinaan, pemberdayaan, hingga peningkatan kompetensi yang menjadi kewenangan di Provinsi Bali, bersinergi juga dengan kabupaten/kota. Provinsi lain pun tentu sudah melaksanakan hal yang serupa. Hanya saja para gelandangan tersebut memiliki keingintahuan terhadap Bali yang digadang-gadang memiliki banyak lapangan pekerjaan (<https://radarbali.jawapos.com/denpasar/704486786/dinsos-bali-pulangkan-ratusan-gelandangan-pada-januari-maret-2024-terbanyak-asal-jawa-timur>).

8.3 Lansia (Lanjut Usia) Terlantar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Bali menjadi salah satu provinsi dengan fenomena bertambah banyaknya penduduk lanjut usia (lansia). Hal ini menunjukkan angka harapan hidup penduduk Bali terus meningkat. Bali menempati peringkat keempat dengan jumlah penduduk lansia terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Provinsi Bali memiliki populasi lansia sebanyak 621.900 jiwa dari 4.404.300 jiwa penduduk atau sekitar 14,12 persen.

Berdasarkan Tabel 8.9 terlihat bahwa Kecamatan Denpasar Utara memiliki lansia terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya. Secara keseluruhan terdapat 114 orang laki-laki dan 206 orang perempuan lansia di Kota Denpasar.

Tabel : 8.9. Jumlah Lansia Terlantar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2023

No	Kecamatan	Usia 60 Tahun		Total
		L	P	
1	Denpasar Utara	50	110	160
2	Denpasar Timur	29	52	81
3	Denpasar Selatan	19	27	46
4	Denpasar Barat	6	17	23
	Jumlah	114	206	310

Sumber : Dinas Sosial Kota Denpasar, 2024

BAB IX PENUTUP

9.1 Simpulan

Berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, publik dan lain-lain dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pendidikan

- a. Anak usia 7-15 tahun hampir seluruhnya bersekolah, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara usia 16 tahun ke atas, untuk laki-laki berkisar antara 75 hingga 82 persen sementara untuk perempuan berkisar 79 hingga 88 persen. APS penduduk laki-laki tahun 2023 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,45 persen.
- b. Pada tahun 2023, APM SD, APM SMP dan SMA untuk penduduk perempuan angkanya juga lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.
- c. Total jumlah siswa PAUD menyentuh angka 14.208 siswa dengan komposisi 7.302 siswa berjenis kelamin laki-laki dan 1.701 siswa lainnya berjenis kelamin perempuan.
- d. Dilihat dari jumlah siswa SD terdapat 42.095 siswa merupakan siswa dengan jenis kelamin laki-laki dan 39.273 siswa lainnya berjenis kelamin perempuan.
- e. Dari jumlah siswa SMP, terdapat 18.882 siswa diantaranya adalah laki-laki dan 17.637 siswa lainnya adalah perempuan.
- f. Untuk siswa SMA/MA/SMK, siswa dengan jenis kelamin perempuan menduduki posisi tertinggi yaitu sebesar 10.653 orang.
- g. Dilihat dari status putus sekolah, pada tahun 2023 terdapat empat orang SD/ sederajat dan dua orang siswa SMP/ sederajat yang mengalami putus sekolah,
- h. Dilihat dari jumlah guru yang ada di Kota Denpasar, dari total 4.229 guru, terdapat 3.185 guru diantaranya adalah perempuan.

- i. Berdasarkan jumlah guru yang tersertifikasi, untuk tingkatan SD, SMP dan SMA masih didominasi perempuan.
- j. Jumlah kepala sekolah di tingkat SD didominasi oleh perempuan sedangkan di tingkat SMP didominasi oleh laki-laki.

2. Kesehatan

- a. Peningkatan kelahiran pada tahun 2023 terbanyak terjadi pada bayi perempuan yang meningkat sebesar 5,5% dan kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki juga meningkat hanya sebesar 1,6%.
- b. Terjadi penurunan jumlah balita di Kota Denpasar pada tahun 2023 sebesar 32,2%.
- c. Secara keseluruhan kasus ASI Eksklusif di Kota Denpasar mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 12.154 kasus menjadi 25.390 kasus di tahun 2023 atau meningkat sebesar 52,1%.
- d. Status Gizi di Kota Denpasar tahun 2022 dan 2023, mengalami penurunan di seluruh kecamatan.
- e. Semua UPTD Puskesmas di Kota Denpasar memiliki 1 ruang pojok ASI.
- f. Cakupan imunisasi bayi di Kota Denpasar tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.
- g. Secara keseluruhan jumlah dokter perempuan yang ada di Kota Denpasar untuk tahun 2023 sejumlah 1689 orang (48,3%) dan tahun sebelumnya sebesar 1807 orang (48,5%). Dari jumlah tersebut dapat dilihat dokter yang berjenis kelamin perempuan hampir sebanding jumlahnya dengan dokter laki-laki.
- h. Jumlah penggunaan alat kontrasepsi perempuan usia 15-49 tahun yang berstatus kawin tahun 2023, dari 44.262 orang perempuan pengguna alat KB, penggunaan kontrasepsi terbanyak adalah suntikan KB digunakan oleh 21.495 orang, diikuti dengan AKDR/IUD/Spiral sebanyak 12.427 orang. Alat KB yang paling sedikit digunakan pada tahun 2023 di Kota Denpasar adalah MAL yaitu sebanyak 42 orang saja.
- i. Pada tahun 2023 persentase penduduk kota Denpasar yang terlayani air bersih menurun dari 51,83% pada tahun 2022 menjadi 47,07% pada

tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk yang belum terlayani air bersih meningkat dari 48,17% pada tahun 2022 menjadi 52,93% pada tahun 2023.

3. Ekonomi

- a. Ditinjau dari jumlah penduduk usia produktif, terjadi peningkatan sebesar 0,21% untuk penduduk usia produktif laki-laki dan 0,43% untuk penduduk usia produktif perempuan.
- b. Ditinjau dari kegiatan penduduk usia 15 tahun keatas, jumlah perempuan yang bekerja pada tahun 2023 sudah mendekati jumlah laki-laki yaitu sebesar 49,84%. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 328.987 orang menjadi 333.682 orang.
- c. Jumlah KWT yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2023 sebanyak 14 KWT menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan terjadi di Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat.
- d. Jumlah penyuluh pertanian pada tahun 2023 di Kota Denpasar berjumlah 17 orang yang terdiri dari penyuluh perempuan sebanyak 11 orang dan penyuluh laki-laki sebanyak 6 orang.
- e. Secara keseluruhan nilai TPAK untuk Kota Denpasar mengalami kenaikan dari tahun 2021-2023 sebesar 4,46%. TPAK laki-laki cenderung selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan.
- f. Jumlah tenaga kerja asing pendatang di Kota Denpasar dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 32,59% yang didominasi oleh tenaga kerja asing laki-laki.
- g. Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan di Kota Denpasar untuk tahun 2023 adalah sebesar 3,20% sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,39%.
- h. Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta di Kota Denpasar untuk tahun 2023 adalah sebesar 78,13% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 77,72 %.
- i. jumlah tenaga kebersihan yang bertugas di pertamanan di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 124 orang orang.

- j. Pada tahun 2023 jumlah petugas kebersihan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,7%. Petugas kebersihan masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 969 orang dari 1527 orang. Petugas kebersihan berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 36,54% dan paling banyak bekerja sebagai tenaga kebersihan.
- k. Jumlah petugas parkir yang bertugas di gedung dan pelataran (Tabel didominasi oleh laki-laki sebesar 97,21% dibandingkan petugas perempuan yang hanya sebesar 2,79%.
- l. jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha rekreasi dan pariwisata di Kota Denpasar adalah pada tahun 2023 adalah sebanyak 182 orang laki-laki dan 176 orang perempuan.
- m. Pemilik usaha salon kecantikan pada tahun 2023 tetap didominasi oleh perempuan yaitu sebanyak 141 orang atau sebesar 84,9%.
- n. Dilihat dari usaha UMKM terdapat 8 jenis usaha yaitu kuliner, industri makanan ringan, industri kerajinan tangan, dagang, jasa, pertanian, peternakan dan PKL tersebar merata di empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Sebesar 64,87%.

4. Sektor Publik

- a. Tahun 2023 jumlah PNS yang berjenis kelamin perempuan menurun jumlahnya sebesar 9,9% dari tahun sebelumnya tetapi tetap lebih besar dari jumlah PNS laki-laki.
- b. Jumlah pegawai Non-ASN laki-laki tetap mendominasi sebanyak 4.600 orang lebih banyak dibandingkan perempuan sebanyak 3.138 orang.
- c. Dilihat dari jumlah ASN yang mengikuti diklat, terjadi peningkatan sebesar 83,52% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa ASN berjenis kelamin perempuan telah diberi kesempatan yang lebih besar untuk dapat mengembangkan potensi diri dan ketrampilannya.
- d. Jumlah pejabat perempuan yang mengikuti Diklat PIM tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 14,28% dari tahun sebelumnya.

- e. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah ASN pada unit kerja untuk perempuan sebanyak 0,9% dan penurunan terjadi pada unit kerja laki-laki sebesar 4%.
- f. Pada tahun 2023, perempuan dengan pangkat penata muda berjumlah paling banyak yaitu sebesar 37,2% naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 33,6%. Pangkat yang mengalami kenaikan terjadi juga pada Penata Muda Tk 1 yaitu naik menjadi 10,8% dari tahun sebelumnya sebesar 9,1%. Penurunan terjadi pada pangkat Pembina Tk 1 yang turun menjadi 7,8%.
- g. Dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang ternyata hanya ada 4 orang perempuan saja dan berasal dari PDIP, Demokrat, Golkar, dan PSI yang bisa menjadi anggota DPRD Kota Denpasar.
- h. Pada tahun 2023 kaum perempuan sudah ada yang menjadi pimpinan partai politik yaitu sebanyak dua orang atau sekitar 11%.
- i. Anggota Bawaslu dan Pengawas Pemilu Lapangan di Kota Denpasar kaum laki-laki mendominasi sebanyak 23 orang (53,49%) sedangkan Perempuan hanya sebanyak 20 orang atau sebesar 46,51%.
- j. Jumlah anggota KPU di Kota Denpasar sebanyak 5 orang, terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini menunjukkan 40% sudah terwakilkan oleh perempuan.
- k. Jumlah total anggota PPK sebanyak 20 orang yang terdiri atas 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Disini terlihat keterlibatan perempuan masih dibawah 30% yaitu sebesar 15%.
- l. Terdapat 129 orang anggota PPS pada tahun 2023 yang terdiri atas 104 orang laki-laki dan 25 orang perempuan atau sebesar 19,4%.
- m. Denpasar jumlah anggota pantarlih seluruhnya masih didominasi oleh kaum laki-laki.
- n. Jumlah penegak hukum masih didominasi oleh laki-laki, yang berjenis kelamin perempuan hanya sebesar 15% dari jumlah keseluruhan.

5. Lain-lain

- a. Terjadi penurunan korban kekerasan untuk anak perempuan dan perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki terjadi peningkatan dari

tahun sebelumnya. Terdapat 166 orang pada kasus kekerasan perempuan di tahun 2022 dan 135 orang pada tahun 2023. Untuk kasus korban kekerasan pada anak perempuan mengalami penurunan sebesar 48,50% dan anak laki-laki meningkat sebesar 38,55% dari tahun 2022 sampai tahun 2023.

- b. Bentuk kekerasan psikis (KDRT) menduduki posisi teratas, namun mengalami penurunan sebesar 14,29% dari tahun 2022-2023.
- c. Jika dilihat dari persentase korban kekerasan menurut jenis kelamin, pada tahun 2022 dan tahun 2023 lebih banyak terjadi pada perempuan. Pada tahun 2022 sebanyak 80% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dimana sebanyak 64,24%.
- d. Dilihat dari persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Denpasar pada 2 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Untuk anak laki-laki terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 19,95% menjadi 33,43%. Untuk anak perempuan mengalami penurunan dari 40,14% menjadi 25%. Untuk perempuan mengalami penurunan dari 39,90% menjadi 39,24% sedangkan kasus kekerasan pada laki-laki terjadi pada tahun 2023 sebesar 2,33%.
- e. Berdasarkan jenis kasus yang ditangani UPTD PPA Kota Denpasar pada tahun 2023 sudah mengalami penurunan sebesar 17,31% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022 KDRT (psikis) menduduki posisi tertinggi, sedangkan pada tahun 2023 kekerasan (fisik, psikis, seksual) menduduki posisi tertinggi.
- f. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Kota Denpasar pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 17,31%, yang terdiri dari penanganan untuk korban anak perempuan anak laki-laki, laki-laki dan perempuan.
- g. Pada tahun 2023 tidak terjadi TPPO jika dibandingkan dengan tahun 2022.
- h. Jumlah gepeng di Kota Denpasar didominasi umur 19 tahun keatas, terdiri atas 112 orang laki-laki dan 25 orang perempuan.

- i. Jumlah lansia terlantar PPKS di Kota Denpasar pada tahun 2023 adalah 114 orang laki-laki dan 206 orang perempuan. Perempuan lansia masih mendominasi di Kota Denpasar.

9.2 Rekomendasi

Pengumpulan dan pengolahan data terpisah menurut jenis kelamin merupakan syarat yang diperlukan untuk berbagi keperluan, utamanya untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh proses pembangunan. Ini sesuai dengan Inpres No9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional. Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan.

Pemerintah Kota Denpasar sudah menerapkan pemilahan data tersebut. Implementasi gender akan terlihat jika dalam pelaksanaannya selalu menekankan kepada empat hal. Di bidang pendidikan, pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Kedua, di sektor kesehatan, pemerintah fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana. Ketiga, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah sebaiknya fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender. Terakhir, yang keempat ialah terkait pencegahan kekerasan. pemerintah sebaiknya menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus

kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2023. Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Statistik Ketenagakerjaan Kota Denpasar.
- Bing-Jonsson P.C., Hofoss D., Kirkeveld M., Bjørk I.T. & Foss C. (2016) Sufficient competence in community elderly care? Results from a competence measurement of nursing staff. BMC.
- Elliott, C. M. (Ed.). (2007). Global empowerment of women: Responses to globalization and politicized religions. Routledge.
- Hidayah, Z. M. F. R. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 110. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13919>.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024: Indonesia berpenghasilan menengah - tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses 12 September 2019 dari <https://www.bappenas.go.id/files/rpjmnn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024%20Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf>
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries. *Feminist Economics*, 15(3), 91-132. doi: <https://doi.org/10.1080/13545700902893106>.
- Muhammad Arif Fahrudin Alfana, Desta Fauzan, Warastri Laksdiasri, Ayu Rahmaningtias (2015). Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender Di Indonesia. Seminar Nasional Geografi UMS 2015.
- Ni Kadek Sri Utari, I Gede Setiawan Adi Putra, Nyoman Parining (2020). Strategi Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Sanur Asri Lestari dalam Pengembangan Urban Farming di Desa Sanur Kauh, Kecamatan

Denpasar Selatan Jurnal Agribisnis dan Agrowisata ISSN:2685-3809
Vol. 9, No. 3, Desember 2020. Hal. 384-393.

Seguino, S. (2000). Accounting for gender in Asian economic growth. *Feminist Economics*, 6(3), 27-58. doi:
<https://doi.org/10.1080/135457000750020128>.

Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Gramedia Pusataka Utama.

Thome B., Dykes A.K.&Hallberg I.R. (2003) Home care with regard to definition, care recipients, content and outcome: systematic literature review. *Journal of Clinical Nursing* 12(6), 860–872.

World Bank. (2011). *World development report 2011: Conflict, security, and development*. World Bank. Diakses 12 September 2019 dari
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4389>.

Yusrizal & Romi Asmara. (2020). “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)” *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* ISSN 2338-4735/E-ISSN 27225100 Volume VIII Nomor 1 (Mei 2020). Nangore Aceh Darussalam : Universitas Malikussaleh.

<https://www.mpr.go.id/berita/Keterlibatan-Perempuan-di-Sektor-Ekonomi-dan-Politik-Harus-Ditingkatkan> Keterlibatan Perempuan di Sektor Ekonomi dan Politik Harus Ditingkatkan. 2024.